

**STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009
(Studi Pada Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 6,
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**

(Skripsi)

**Oleh:
HENDRA FAUZI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis/ Skripsi/ Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Megister/ Sarjana/ Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun perguruan Tinggi lain.
2. Karya ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juli 2010
Yang membuat pernyataan,

Hendra Fauzi
NPM. 0516011038

ABSTRAK

STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009 (Studi Kasus di Kecamatan Natar Lampung Selatan)

Oleh:
HENDRA FAUZI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi politik caleg perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan ditentukan dengan *purposive sampling* yakni penentuan disesuaikan atas kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display atau penyajian data dan tahap kesimpulan (verifikasi). Lokasi penelitian di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari pengurus partai politik, masyarakat setempat dan caleg perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran parpol dalam mengawal caleg perempuannya masih sangat minim. Strategi politik caleg perempuan terangkum dalam marketing politik meliputi 4Ps, Produk (*product*), Promosi (*promotion*), Harga (*price*) dan Tempat (*place*). Produk politik dibagi dalam tiga (3) kategori yaitu, *Party Platform (Platform Partai)*, *Past Record* (catatan masa lalu), *Personal Characteristic* (Ciri Pribadi). Promosi dapat dijabarkan dalam tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat. Harga digolongkan ke dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga *image* (citra) nasional. Caleg Kabupaten, Provinsi dan RI melakukan kampanye secara bersama-sama. Caleg perempuan menggunakan jaringan sosial, jaringan media, jaringan keagamaan, jaringan kekerabatan, melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis, dan pendekatan tokoh politik. Caleg perempuan juga menghadapi konflik internal partai politik (konflik horizontal dan vertikal) dan konflik eksternal parpol. Hambatan yang dihadapi selama berkampanye seperti, rendahnya dukungan partai politik, tidak semua tim sukses membantu pencalonan secara ikhlas, terdapat tim sukses yang memanfaatkan moment pemilu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melakukan manipulasi data atas perolehan suara politik kandidatnya, terdapat tim sukses yang rangkap jabatan (menjadi tim sukses pada caleg lain) dan selama berkampanye masyarakat banyak menuntut materi yang berlebihan.

**STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009**

**(Studi Pada Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 6,
Kecamatan Natar Lampung Selatan)**

Oleh:

HENDRA FAUZI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Juruan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2010

Judul Skripsi : **STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009** (Studi Pada Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 6 Kecamatan Natar Lampung Selatan)

Nama : **Hendra Fauzi**

No. Pokok Mahasiswa : 0516011038

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI,
Komisi Pembimbing**

**Dra. Erna Rochana, M.Si
NIP 1967 0623 1998 022 001**

Ketua Jurusan

**Drs. Benjamin, M.Si.
NIP 1956 0417 1986 031 001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Erna Rochana, M.Si**

Sekretaris : **Arizka Warganegara, M.A**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Agus Hadiawan, M.Si
NIP.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis terlahir tanggal 25 Mei 1987 di Merak Batin, Natar. Putra pasangan bapak Idris dan Ibu Ernawati ini merupakan anak ke empat dari enam bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah:

1. TK Dharma Wanita Merak Batin yang diselesaikan pada tahun 1993
2. SD Negeri 7 Merak Batin yang diselesaikan pada tahun 1999
3. SLTP N 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2002
4. SMA N 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2005.

Tahun 2005, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila) melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru). Selama belajar di bangku kuliah, penulis juga aktif di beberapa organisasi, baik intra maupun ekstra kampus.

Organisasi Intra Kampus yang ditekuni adalah:

1. LSSP (Lingkar Studi Sosial Politik) Cendekia Sebagai Koordinator Divisi Kajian (Periode 2006/2007)
2. DPM FISIP (Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unila Sebagai Ketua Umum (Periode 2008/2009)

3. DPM U (Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas) Unila Sebagai Ketua Umum (Periode 2009/2010) dan
4. Beberapa organisasi kampus yang ada di tingkat Fakultas maupun Universitas Lampung

Di organisasi Ekstra Kampus, penulis tercatat sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Unila Cabang Bandar Lampung sebagai Sekertaris Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) periode 2008/2009 dan di Kepengurusan HMI Cabang Bandar Lampung sebagai Departemen Pembinaan Anggota (PA) untuk periode 2009/2010.

Pendidikan, Pelatihan, Kegiatan dan seminar-seminar yang pernah di ikuti selama berstatus mahasiswa adalah:

1. Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) oleh HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Tahun 2005
2. LK 1 (*Basic Training*) oleh HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Tahun 2005
3. Pesantren Muslim Cendekia (PCM) oleh FSPI Unila Tahun 2005
4. Masa Perkenalan Calon Anggota (MPC) oleh LSSP Cendekia FISIP Unila Tahun 2005
5. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah oleh LSSP Cendekia Tahun 2005
6. Training Analisis Sosial oleh HMJ Sosiologi Tahun 2006
7. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Islam Tingkat Dasar (LKMI-TD) oleh FSPI FISIP Unila Tahun 2006
8. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah oleh LSSP Cendekia bekerjasama dengan HMJ Sosiologi Tahun 2006
9. Seminar Daerah "Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada 2005" oleh HMJ Pemerintahan bekerjasama dengan BEM FISIP Unila Tahun 2006
10. Pelatihan Insan Cendekia (PIC) oleh LSSP Cendekia Tahun 2006

11. Bedah Buku "1421.... Saat Cina menemukan Dunia" oleh HIMA DIPPUS dan LSSP Cendekia Tahun 2007
12. Sosiologi For Student (SFS) oleh HMJ Sosiologi Tahun 2007
13. Pelatihan dan Lomba Penulisan Opini oleh HMJ Sosiologi Tahun 2007
14. Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian (P4) oleh HMJ Sosiologi Tahun 2007
15. Pelatihan Pembuatan Skripsi oleh LSSP Cendekia dan FSPI FISIP Unila Tahun 2007
16. Kunjungan Mahasiswa Sosiologi ke Desa Binaan di Desa Sukajaya Rajabasa Bandar Lampung oleh HMJ Sosiologi Tahun 2007
17. Training of Trainer oleh HMI Cabang Bandar Lampung Tahun 2008
18. Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar (DJM-TD) oleh Lembaga Penerbitan Mahasiswa Republica FISIP Unila Tahun 2008
19. LK 2 (*Intermediete Training*) HMI Cabang Bandar Lampung tahun 2008
20. Seminar Nasional "Apakah Jiwa Pancasila Masih Diperlukan Dalam Kehidupan Bernegara?" oleh Lampung Research Center Tahun 2009
21. Quick Count Pemilihan Presiden Indonesia oleh Cirus Surveyors Grup bekerjasama dengan SCTV
22. Survey Daerah Lampung oleh Lembaga Survei Indonesia Tahun 2009
23. Survey Daerah Lampung oleh Lampung Research Center Tahun 2010
24. Seminar Nasional dan Kongres Luar Biasa Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia oleh ISI Surakarta Tahun 2010
25. Program Pengalaman Lapangan (PPL) di BAPPEDA Kota Bandar Lampung pada Tahun 2008
26. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya.

MOTTO

- 👉 Orang kuat bukanlah orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan otot, tapi dengan akal yang ikhlas.
- 👉 Langit hanya mampu digapai oleh tekad, keyakinan, usaha dan kerja keras.
- 👉 Waktu tidak akan berhenti menunggu kita untuk berlari, tapi kita yang harus berlari mengejar waktu.
- 👉 Orang pesimis akan terhenti dengan keterbatasan, orang optimis akan berlari melawan keterbatasan.
- 👉 Menjadi pemikir yang tidak hanya berpikir.
- 👉 Aku tidak selalu benar, tidak pula selalu salah: hanya berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan yang kupunya (Kahut)
- 👉 Yakin usaha sampai (Hml)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas nikmat Allah SWT
karya kecil ini kupersembahkan untuk yang tercinta:

Ayah dan Umi
atas tetesan keringat, kulit yang terpanggang matahari, pengorbanan,
limpahan kasih sayang, dan do'a tiada putus demi keberhasilan
anak-anaknya.

Kiai, Aja, Daing dan adikku tersayang,
yang selalu memberikan dukungan serta do'a guna menyelesaikan
studiku

Orang-orang yang menyayangiku dan menjadi warna indah dalam hari-
hariku

Wanita yang selalu kuharapkan menjadi tulang rusukku

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung
Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya terselesaikan juga skripsi yang berjudul **“STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009 (Studi Pada Calon Legislatif Perempuan Di Dapil 6 Kecamatan Natar Lampung Selatan)”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sosiologi Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Shalawat serta salam tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW sang inspirator yang selalu memberi inspirasi positif dan pencerah pemikiran bagi seluruh umatnya.

Ucapan terima kasih setulus hati kepada:

1. Orang tuaku tercinta atas kerja keras dan kesabaran selama ini menghadapi anakmu yang paling nakal, susah diatur dan menyusahkan. Inshaallah sy akan memberikan yang terbaik tuk kalian. Amin
2. Kiai Aan, Kakak tertua yang menjadi cermin dalam langkah. Aja Endri, yunda terbaik, kerja kerasmu menjadi motivasiku. Daing Didi, kakak ketiga yang tak pernah lelah beraktivitas tuk menjadi yang terbaik. Iyus dan Dadan adik terbaik, maaf belum bisa memberikan sesuatu bagi kalian.
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto D. M. S.H., M.H Pembantu Rektor III Unila
4. Bapak Agus Hadiawan., M.Si Dekan FISIP Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Dian Komarsyah., M.Si pendamping mahasiswa dalam berorganisasi dan berkarya
6. Bapak Drs. Ikram., M.Si Pembantu Dekan III FISIP Unila
7. Ibu Dra. Erna Rochana., M.Si, Dosen Pembimbing yang sangat baik, terima kasih atas semua yang ibu berikan dan kesabarannya membimbing anak yang

bandel ini. Oya, Alun juga, nanti qita keliling Unila lagi ya, bakso diperpusnya belum abis thu..hehehe

8. Kanda Arizka Warganegara., M.A selaku Dosen Pembahas, terima kasih kanda atas bimbingannya dan motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak Drs. Usman Raidar., M.Si Pembimbing Akademik, terima kasih untuk bimbingan bapak selama ini, tanpa bapak saya tidak akan pernah dapat beasiswa. hehe
10. Bapak Drs. Benjamin., M.Si Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unila
11. Bapak Drs. Susetyo, M.Si Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Unila
12. Ibu Endry Fatimaningsih, S.Sos., M.Si, senyum ibu seakan menyindir saya tuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Bapak Ibu Dosen di lingkungan FISIP Unila terutama, Jurusan Sosiologi terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan
14. Staf Karyawan FISIP Unila terutama kiai Herman, kiai Samsuri dan Dayat (satpam) terima kasih untuk semua bantuannya
15. Pembentuk & mungkin Perintis Kerajaan Catur di FISIP, sebut saja "Kiai Rokok" hehe, terima kasih tuk ilmu caturnya, entah sudah berapa banyak saya kalah catur ma kiai yang penting saya pernah menang telak 4-0 (tanpa balas), haha. Makasih ya kiai...
16. Kahut, maaf belum bisa menjadi yang terbaik. Sabar ya, semoga mimpi itu bisa terwujud. Mohon doanya di setiap lantunan syair ayat suci alquran yang kau bacakan dalam salat dan Tilawahmu... Udah, jangan nangis trus malu ma dadan. Hehe
17. Endha & Melsi *My Soulmate*, parah ninggalin sy sendiri. Tpi akhirnya sy menyusul kalian. Maksih ya, kalian adalah sahabat sekaligus motivator dalam menampilkan yang terbaik. Kangen lho, Kapan ya bisa kumpul be3 lgi.

18. Yunda Rini Diaputri., S.AN., M.ANc, bidadari yang Allah berikan tuk HMI dan Umat, Uweekkkk. Yunda orang terbaik dan terindah, menyenangkan + menyusahkan binti merepotkan, hehee. Terima kasih atas segala motivasi + buku yang diberikan, eitss dipinjamkan. Tapi harapannya.... hehe. Akhirnya adikmu ini wisuda juga, makasih yahhh yundaaaa.....
19. Keluarga Besar HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik. bg Ismail, bg Istaz, bung Feri, bg arip mus, arif kur, bg Darma, bg Arizka, bg Ardian, bg Baradewa, bg Fansur, bg Asyil, bg Indra bg Taufiq, bg Erwin, bg Qiki, bg Eko, bg Basri, bg Fanie, bg Aan, bg Jeki, bg Aziz, bg Pay, bg Iwan. Pengalaman demo waktu itu buat sy trauma sekaligus mendewasakan pemikiran sy bang., Bang Sanel (kalu maen catur jgn diungkit yang menangnya aja, kalahnya juga gehh, udah kalah asih gk mw ngaku, hehe. Semangat bang dah *deadline* ne kapan nyusul ?, Gk enak diliat adek2 hehe, piss), bg Dedi, bg Rifki pUSDOK, bg Hendri, Yunda Tri, mb Yeyen, mb Amy (ingat gk mb ada gosip yang beredar di Unila ttg qta,wkwkw), mb Rema, yunda Kinoy, yunda Nila, mb Iis, makasih ya tuk ilmu yang kalian berikan. Rekan se-angkatan, Phia, Dhiah, Meli Manda, meliyanti, Sinta, Helda, Boy, Gema (Ketum), Rifky Basri, Ogaf, Apri, Eka niaga, spa lg ya ??? hehe, wah dah "S" smua yaa.. sori tum bukannya nyindir, hehe. Ikatan persaudaraan dan dinamika internal inilah yang mendewasakan qita semua., Dinda-dinda semua, Frengky, Gozali, Rizon, Ersad, Senoaji, Reza, Fidha, Dadang, Erik, Asep, Ijal, Nuna, Nurul (Api), Pipit, Rihana, Didik, Junian, Wawang, Rizky, Ade, Fiqi, Aya, Anisa, Yessi, Eka, Baioni, Iqbal, Fariz, Olish, Doni, Budi, M. Nur, Angga, Gani, Panji, Hafiz, Obrin, Vivn, Mijwad, Dian, Alpin, Ikhsan, Dani, Yoga, Lian, Ramadhan, Toni, Rico, Saka, Yusiana, Shendy, Ayu, Agus, Rian, Stevy, Ricki, Fauzy, Natasha, Irma, Rendy, Mares, Dayu, Rizki....., Maaf gk disebut smua terlalu banyak, dah ngerasa tua, hehe. Jaga persaudaraan karena qita gk tau Tuhan akan menjadikan qita apa nantinya. YAKUSA

20. Keluarga Besar LSSP Cendekia mb Fitri, mb Lian, Mb Frensi, mb Eva (Kalian seperti ibu ketika sy lelah dg rutinitas Cendekia, trima kasih atas do'a dan bimbingannya selama di Cendekia), Sinta, Meri, Aulia, bg Iwan, bg Bagas, Ogaf, Boy, Gema, Ai, Faisol, Arif, Nur, Ayu, Nissa (Sos+Negara), Anisa (Pem), Cris, Selvi, Cristella (Mana???) hehe., Doni (kordum) ayo don, buktikan Cendekia akan kembali bangkit dikepengurusan kmu.. Maaf tidak bisa memberi yang terbaik dan menjadi panutan yang seharusnya, alahh lebayyyy ;-)
SALAM PERADABAN!!!!
21. Keluargaku di Kepengurusan DPM FISIP Periode 2008-2009, Rizon si-sekjen pewaris tahta DPMF, Novri ma Rahman maaf tuk keegoisan sy, Mevi, Endah, Sinta, Alan, Adin, Riska, Nurul, Imron, makasih ya, semoga sukses., Teman-teman Pansus dan Staf Ahli maaf ya janji belum maksimal, Inshaallah tak ganti deh yang salah cetaknya..., tpi sharusnya kalian senang krn jabatan brubah jdi anggota DPMF bukan Staf or Pansus., Hehe
22. Endung (Ketum APS), Riska, Adin, Wiwin + Nisa, Semangat!!! Jaga Persahabatan & APS baik2 yah., Lelah dengan rutinitas itu biasa, tapi menyerah dengan rutinitas jgn sampek lah..!! hehe
23. Keluarga Besar DPMU terima kasih untuk persaudaran kita 1 tahun ini, manajemen konflik dalam pengurusan ini benar-benar tlah mendewasakan sy. Thanks For All.....
24. Keluarga Besar Sosiologi terutama 05, Sorry yang senior gk disebut, gk apal lagi... hehe. Melsi, Yuyun, Guntur, Boy Mareta, Puput (Pem), Makasih ya dah mau jadi Pembahas Mahasiswa dan moderator di Seminar sy, akhirnya bisa sarjana juga., Guntur, bareng qta.... hehe., Endha (masih Feminim gk?? Hihi), mb Jundi, Phia, Dhiah, Erlin, Mia, Ree, Dina, Elya, Erna, Riris, Yusna, Ermai, Kausar, Fredi, Acep, Julius, Doni, Winoto (sesepuh+pemecah telur 05 hehe), Dimas+Putri, Oca, Rika, Linda, Desi, Risky, Meli manda, Meliyanti, Yaya, gk pa2 kalian wisuda duluan tpi semoga yang sukses sy duluan. Amin., Rifa, Dika, Rahmat, Erwan, Kayaknya barng neh qto..hohoho, Dwarte, Yuri,

Nyoman, Dayat, Wisnu, Fitri, Andi, Kpn??? SEMANGAT!!!, Riky, Komeng (jgn ngilang bos, semangat!!).

25. Untuk adik2 Sosiologi smua angkatan dan semua yang penulis kenal... hebatlah kalian sekarang yaaaa, nilai gedek2, cepet lulus pula... Semoga suksess...

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan balasan atas jasa dan budi yang telah diberikan kepada penulis. Demikian juga halnya dalam penulisan skripsi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2010
Penulis,

Hendra Fauzi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL & BAGAN	xviii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Tentang Strategi Politik	12
1. Pengetian Strategi	12
2. Pengetian Strategi Politik	14
B. Tinjauan Konflik Politik	19
C. Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)	22
D. Tinjauan Tentang Calon Anggota Legislatif Perempuan	22
1. Pengertian Gerakan Perempuan	22
2. Pengertian Keterwakilan Perempuan	24
3. Pengertian Calon Anggota Legislatif Perempuan (Caleg Perempuan)	26
4. Kendala Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif	26
E. Tinjauan Tentang Keterwakilan (Kuota 30 Persen) Perempuan	27
1. Pengertian Kuota	27

F. Tinjauan Tentang Partai Politik	28
1. Pengertian Partai Politik	28
2. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik	30
G. Kerangka Pikir	31

BAB III. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Penentuan Informan	39
D. Lokasi Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara Mendalam	41
2. Dokumentasi	42
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Uji Validitas Data Kualitatif	44
1. Kreadibilitas	44
2. Dependabilitas dan Komfirmabilitas	45

BAB IV. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Kecamatan Natar	46
1. Keadaan Geografis	46
2. Keadaan Penduduk	47
3. Kondisi Sosial Ekonomi	49
4. Kondisi Pendidikan	51
5. Kondisi Kesehatan	51
6. Kondisi Politik	52
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi	53

BAB V. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Tentang Informan	55
2. Pandangan Informan	55
a. Informan I	55

b. Informan II	61
c. Informan III	65
d. Informan IV	67
e. Informan V	70
f. Informan VI	75
g. Informan VII	82
h. Informan VIII	88
B. Analisis Penelitian	94
1. Caleg Perempuan Sebagai Pemersatu Kaum Perempuan	94
2. Peran Partai Politik Dalam Membantu Pembentukan Dan Penerapan Strategi Politik Caleg Perempuan	96
3. Strategi Caleg Perempuan Dalam Membangun Rasionalitas Pemilih Guna Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009	101
a. Penerapan Marketing Mix Dalam Politik	110
1) Produk (<i>product</i>)	112
2) Promosi (<i>promotion</i>)	114
3) Harga (<i>Price</i>)	117
4) Tempat (<i>Place</i>)	118
b. Strategi Terselubung	121
4. Konflik Politik	122
a. Konflik Internal Partai Politik	124
b. Konflik Eksternal Partai Politik	126
5. Kendala Caleg Perempuan Dalam Menerapkan Strategi Politik	127

BAB V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL & BAGAN

Halaman

Tabel 1 Perempuan di Lembaga Legislatif	4
Tabel 2 Jumlah Perempuan Anggota DPR Terpilih 2009-2014 (per partai)	5
Tabel 3 Perempuan di Lembaga Eksekutif 2009	5
Tabel 4 Perempuan di lembaga Yudikatif.....	5
Tabel 5. Perempuan di Birokrasi 2007	5
Tabel 6 Klasifikasi Pekerjaan Penduduk	47
Tabel 7. Jumlah Penduduk	48
Tabel 8. Daftar Pemilih Tetap	49
Tabel 9. Persebaran Lembaga Ekonomi	50
Tabel 10. Lembaga Pendidikan	51
Tabel 11. Lembaga Kesehatan	52
Tabel 12. Gambaran Informan	55
Bagan Kerangka Pikir	36

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia pemilihan wakil rakyat dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun sekali. Partai politik menjadi jembatan penting (media formal) bagi warga negara untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Partai politik digunakan sebagai lembaga politik formal yang berfungsi untuk mengagregasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyat. Dalam konsep idealis, partai politik merupakan perwakilan rakyat di parlemen guna memberi kontrol efektif terhadap jalannya pemerintahan. Penerapan demokrasi atas perkembangan partai politik perlu mengedepankan norma-norma *egalitarianism* (persamaan) dan *Liberty* (kebebasan), bagi setiap warga negara untuk yang berpartisipasi di ranah politik.

Penerapan demokrasi yang diharapkan masyarakat Indonesia atas keberadaan partai politik ternyata belum menampakkan perubahan signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan pendewasaan politik rakyat. Partai politik dan budaya politik Indonesia belum mampu memberikan porsi yang seimbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif di politik, terutama perempuan.

Budaya Indonesia cenderung tumbuh dalam lingkungan yang menganut paham patriarkhi. Keyakinan itu didasari oleh adanya nilai superioritas laki-laki berada di atas derajat perempuan. Sementara konsepsi terhadap gerakan keterwakilan perempuan terkesan terjun bebas dan terpinggirkan. Pandangan akan superioritas laki-laki tersebut tertanam kuat di masyarakat, menjadi dasar berpikir dan bertindak setiap orang. Membentuk paham atau konstruksi sosial dengan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Secara kultural gerakan politik terkesan mengeksploitasi perempuan dibandingkan memberdayakannya. Menempatkan perempuan hanya terlibat dalam urusan domestik semata, tidak dalam urusan publik.

Hal tersebut terlihat dari aktivitas keseharian masyarakat misalnya, di keluarga, seorang istri hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh suaminya. Pada tatanan luas, perempuan sering tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan konsep perencanaan strategis kebutuhan dan masa depan komunitas atau organisasinya. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kecerdasan pemikirannya guna mengabdikan kepada masyarakatnya.

Padahal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan bahwa ada komitmen berbagai bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang tanpa terkecuali, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik dan kelahiran maupun kedudukan.

Riewanto (2009: 16) menganggap bahwa urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terutama mengaitkannya dengan kuota 30% adalah untuk memperjuangkan nasib dan kepentingan kaumnya. Perempuan akan berjuang menghapus ketimpangan kultur sosial yang dialaminya selama berpuluh-puluh tahun. Angka kemiskinan, jumlah buta huruf, rendahnya mutu kesehatan hingga pekerja sektor informal (buruh tani, migran, maupun PRT), kaum perempuan yang mendominasi.

Arief (2008: 52) menjelaskan bahwa gerakan kebangkitan atau keterwakilan perempuan guna menghapus bias gender dimasyarakat digawangi oleh munculnya kaum feminisme. Kata feminisme pertama kali dimunculkan oleh aktivis [sosialis utopis, Charles Fourier](#) tahun [1837](#) dan berkembang pesat sejak dipublikasikan oleh [John Stuart Mill, the Subjection of Women \(1869\)](#). Kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan di semua bidang dan dinomor duakan oleh laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang menggunakan paham patriarki. Dibidang sosial, pekerjaan, pendidikan, terutama politik hak-hak kaum perempuan lebih inferior dibandingkan yang dapat dinikmati laki-laki. Hal ini begitu dirasakan oleh masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan perempuan di dalam rumah.

Kaum feminis menuntut adanya persamaan hak bagi setiap individu. Tokoh feminis yang aktif mengkampanyekan persamaan hak tersebut seperti, [Betty Friedan](#) di tahun [1963](#) menuntut agar kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan

yang sama, dan *Equal Right Act* ([1964](#)) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang. Memasuki era 1990 gerakan feminis semakin berkembang dan gencar mengkampanyekan gerakan anti penindasan dan marginalisasi kaum perempuan.

Kaum feminis mengkritik institusi *sains* yang merupakan struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi *sains* dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi *sains*. Feminis menuntut hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dikotomi privat-publik dan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen serta mendiami ranah politik kenegaraan.

Sejak 2004, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik, belum mampu mengangkat jumlah partisipasi perempuan hingga 30%. Harian Media Indonesia edisi 28 Desember 2009 menggambarkan jumlah partisipasi perempuan di lembaga publik, sebagai berikut :

Tabel 1. Perempuan di Lembaga Legislatif

Institusi	Periode 2004-2009 (%)	Periode 2009-2014 (%)
DPR RI	11	18
DPD RI	21	27
DPRD I	10	21

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 2. Jumlah Perempuan Anggota DPR Terpilih 2009-2014 (per partai)

No	Partai	Perempuan		Laki-laki		Total
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Demokrat	35	23.5	113	76.5	148
2	golka	18	16.9	88	83	106
3	PDIP	17	18.1	77	81.9	94
4	PKB	7	25	21	75	26
5	PAN	7	15.2	49	84.8	46
6	PKS	3	5.3	54	94.7	57
7	PPP	5	13.2	33	86.8	38
8	Gerindra	4	15.4	22	84.6	26
9	Hanura	4	25	13	75	17

Sumber:

Media Indonesia

Tahun 2009

Tabel 3. Perempuan di Lembaga Eksekutif 2009

No	Institusi	Perempuan		Total
		Jumlah	(%)	
1	Menteri	5	14.7	34
2	Gubernur	1	3	33
3	Wakil Gubernur	1	3	33
4	Bupati/Wakil Bupati	8	1.8	440
5	Wakil Bupati/Wakil Walikota	18	4	440

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 4. Perempuan di lembaga Yudikatif

No.	Institusi	Perempuan		Total
		Jumlah	(%)	
1	MK	1	11	9 Hakim
2	MA	5	8.3	60 Hakim
3	Komisi	1	14	7 Komisioner

Sumber: Media Indonesia Tahun 2009

Tabel 5. Perempuan di Birokrasi 2007

Eselon	Perempuan	Laki-laki	Total
I	62	534	596
II	709	9.870	10.579
III	7.156	45.079	52.235
IV	45.240	153.900	199.140
V	2.815	9.922	12.737
Tenaga ahli	957.597	894.898	1.852.855
Staf	566.972	1.030.117	1.597.089
TOTAL	1.580.911	2.144.320	3.725.231

Sumber: Media
Indonesia Tahun
2009

Tabel-tabel di atas memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan di ranah publik masih sangat minim. Di setiap lembaga negara masih di dominasi oleh kaum laki-laki. Berdasarkan tabel di atas terdapat dua asumsi yang menjelaskan rendahnya partisipasi perempuan. Pertama, rendahnya jumlah keterwakilan perempuan itu disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Untuk itu, perempuan harus memiliki kekuatan dalam segi pendidikan dan pendapatan, agar mampu bersaing dengan laki-laki. Kedua, disebabkan oleh budaya patriarki, penguasaan kekayaan pribadi (private property), kelas sosial, kapitalisme, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara (feminisme liberal, marxis, sosialis).

Menurut David Mc. Celland dalam Fakih (2008: 57) bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki dorongan atau hasrat berprestasi disetiap level yang digelutinya, *Need for Achievement*, (N'ach). Prestasi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan yang baik. Menurutnya hasrat berprestasi tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan imbalan. Akan tetapi, untuk mendapatkan kepuasan secara batin. Setiap individu memiliki hak dan dorongan memanfaatkan peluang, dalam meraih kesempatan untuk membentuk dan merubah nasibnya sendiri. Prestasi tersebut bergantung dari tingkat motivasi dan kerja kerasnya setiap individu masyarakat.

Peningkatan keterwakilan perempuan merupakan hal penting. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan status sosial mereka melalui

pemberdayaan perempuan. Mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini belum mendapat perhatian lebih di masyarakat. Melalui sistem ini pula proses kesejahteraan perempuan dapat ditingkatkan secara maksimal, memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota masyarakat tanpa memandang sara (Fakih. 2008).

Peningkatan keterampilan dan kompetensi perempuan dapat dilakukan melalui program "*women in development*" yaitu memberikan program bagi "peningkatan taraf hidup keluarga seperti, pendidikan dan keterampilan" serta "kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan". Program ini menjadi pemicu meningkatnya keahlian perempuan yang dapat merangsang meningkatnya partisipasi politik.

Keberadaan kaum perempuan di Indonesia, secara kuantitas setara dengan laki-laki, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pun sama. Menggunakan N' Ach yang dimiliki, kaum perempuan mampu bersaing dengan laki-laki secara lebih sehat. Perempuan yang menjadi caleg tentu memiliki pemahaman dalam menangkap isu, rumor, maupun opini publik yang berkembang di masyarakat. Isu itu dijadikan sebagai wacana politiknya sebagai media yang mampu mempengaruhi persepsi pemilih. Hal ini memberikan persepsi bahwa perempuan juga mampu membentuk sistem ketatanegaraan yang lebih mapan di Indonesia. Bergantung dari motivasi, aturan-aturan negara, pemanfaatan peluang dan kesempatan serta penggunaan strategi yang baik.

Salah satu strategi yang dapat digunakan caleg perempuan dalam meningkatkan perolehan suaranya yaitu, melalui retorika tentang kesamaan dan kesetaraan.

Strategi ini dilakukan dengan argumentasi persuasif yang mampu mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kesamaan dan kesetaraan. Wacana-wacana politik perempuan, pidato maupun tulisan-tulisan yang digerakkan oleh para pemimpin partai politiknya menjadi tindakan konkrit atas strategi tersebut.

Menurut Lovenduski (2008: 106) bahwa secara historis peningkatan partisipasi politik perempuan dilakukan melalui strategi-strategi institusional, bekerja di dalam partai-partai dan menerima peraturan-peraturan permainan yang ada. Proses ini dilakukan agar perempuan mampu memahami aturan konstitusional yang diterapkan partai politik. Selain itu, kaum feminis juga sangat gencar mewacana dasar-dasar persamaan gender ke seluruh elemen masyarakat. Hal ini terutama dilakukan pada negara yang menganut demokrasi modern.

Strategi yang dilakukan caleg perempuan tentu dengan memasifkan wacana persamaan tersebut di tengah masyarakat. Caleg perempuan dapat menggunakan komunitasnya sebagai bagian dari komoditas politik. Kaum perempuan akan lebih cepat mengembangkan isu dan mempertahankannya secara permanen. Proses tersebut dapat dilakukan melalui, kelompok arisan, berbelanja di pasar, forum pengajian dan sebagainya.

Selain itu, caleg perempuan harus memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat di luarnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan lembaga-lembaga profesional lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah bekerja sama dengan para caleg lain dalam partai politiknya dan membuat sekutu dengan mitra-mitra sosial serta paguyuban-paguyuban warga

yang bersifat sukarela. Membangun kerja sama dengan beberapa caleg merupakan suatu upaya untuk menghimpun dan membentuk agenda politik bersama.

Kerja sama politik yang dilakukan dengan berbagai pihak menjadi sangat efektif untuk menciptakan atau meningkatkan isu strategis di masyarakat. Caleg perempuan tentu membutuhkan informasi lebih atas permasalahan di masyarakat. Lembaga-lembaga ini akan sangat membantu caleg guna mendapatkan informasi secara akurat. Dengan demikian, caleg akan mudah melakukan pemetaan isu yang tepat untuk digulirkan saat berkampanye.

Pencitraan perempuan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan strategi-strategi politik klasik seperti, pewacanaan dan perdebatan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, pemahaman caleg perempuan terhadap peraturan tentang pencalonan anggota legislatif, mobilitas dukungan, pembangunan jaringan, penataan ulang wacana politik dan akumulasi serta sosialisasi visi-misi mampu menjadi pengeksposan tersendiri atas berbagai keahlian yang dimiliki, sesuai tugas dan fungsinya dalam mengusung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Secara umum, pemilih menjatuhkan pilihannya didasari oleh orientasi *policy problem solving* dan orientasi *ideology* (Firmanzah, 2008: 109). Orientasi *policy problem solving* adalah pemilih menaruh perhatiannya pada caleg perempuan yang mampu menawarkan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakatnya. Solusi yang ditawarkan caleg perempuan harus didukung oleh data-data yang valid dan disampaikan melalui argumentasi persuasif secara matang.

Orientasi *ideology* menggambarkan bahwa masyarakat akan memilih caleg perempuan didasari oleh adanya ikatan ideologi. Pemilih ideologi lebih menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau kedekatan subjektifitas caleg perempuan dengan masyarakat, kemungkinan dipilih semakin besar.

Untuk itu, caleg perempuan harus mampu mengelola sistem komunikasi dengan baik. Komunikasi tersebut berfungsi untuk menyampaikan ide perubahan kepada masyarakat dengan cara yang santun dan bijak. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menyerap ide perubahan yang ditawarkan. Komunikasi dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media (Massa dan Elektronik). Media komunikasi tersebut seperti, telephon, koran, majalah, televisi, radio, internet, baleho, spanduk, stiker dan sebagainya.

Strategi caleg perempuan dengan menggunakan komunikasi efektif perlu memperhatikan berbagai objek sasaran yang dituju seperti, latar belakang pendidikan, budaya, mata pencaharian, dominasi gender, suku, agama, sehingga pola penyampaian informasi dapat berjalan maksimal. Selain itu, caleg perempuan perlu memanfaatkan sisi feminisme (keperempuanan) dan pengetahuan (N'ach) yang dimilikinya. Dengan demikian, masyarakat akan mudah tersentuh oleh pendekatan yang dilakukan secara persuasif tersebut.

Komunikasi tidak terlepas dari interaksi dan aktivitas keseharian masyarakat. Indikasi terjadinya konflik dimasyarakat sangat mungkin terjadi. Konflik tersebut terjadi atas kesalahpahaman dari komunikasi yang terbangun. Caleg perempuan

harus mampu mengelola konflik yang berkembang guna dijadikan sebagai komoditas politiknya yang memungkinkan strategi dapat berfungsi dengan baik. Menghindari dampak negatif yang muncul atas interaksi yang terbangun dimasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai strategi yang digunakan calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya pada kajian sosiologis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aktivis perempuan, pemerintah, partai politik, masyarakat luas dalam memahami serta mengkaji berbagai strategi caleg perempuan, khususnya untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif 2009.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG STRATEGI POLITIK

1. Pengertian Strategi

Kata strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer, secara etimologis berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang berarti pasukan dan *agein* yang berarti memimpin atau *Strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan. (Schroder. 2009:1).

Dalam Wikipedia Indonesia Pengetian Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan".

Lucian Marin (2007: 1) merangkum definisi Strategi sebagai berikut, Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam buku "*Exploring Corporate Strategy*") mendefinisikan strategi sebagai arah atau cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah guna mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai "penipuan" (*Ploy*) yaitu muslihat rahasia. Sebagai Perspektif, dimana strategi

dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai Posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai Perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai Pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. (Lucian Marin. 2007. Pengertian Strategi. <http://strategika.wordpress.com>. Didownload tanggal 12 April 2010, pukul 19.48 wib)

Menurut Daoed Yoesoef (1981: 2) bahwa studi strategi dan studi hubungan internasional merupakan hal yang sangat berkaitan. Keduanya dapat dibedakan secara substansial namun sulit untuk dipisahkan. Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui empat tahapan :

1) Tahap perumusan yaitu, perbuatan intelektual

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

2) Tahap pemutusan yaitu, perbuatan politis

Tahap kedua yakni peralatan politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat.

3) Tahap pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis

Pada tahap ketiga, pengertian strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni

menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik

4) Tahap penilaian adalah perbuatan intelektual

Keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik berikut :

1. Penting
2. Tidak mudah diganti
3. Melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.

2. Pengertian Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder. 2009: 7).

Hennida (2009: 2) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai acuan dasar dalam merencanakan strategi politik agar berjalan dengan baik. Pertama, bahwa berbagai hal yang dikatakan orang tentang dirinya (caleg perempuan) itu adalah tidak penting dan tidak perlu di sikapi secara mendalam. Biarkan orang mengatakan apapun tentang dirinya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang telah atau akan dilakukan, bukan apa yang mereka katakan. Kedua, pemilikan atas pemikiran yang strategis. Pemikiran tersebut bersifat tidak habis, terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu membuat berbagai perencanaan yang bersifat dinamis. Menjadi ahli strategi bukan ahli taktik yaitu dengan melihat apa yang ada diatas perang itu sendiri, dan lebih melihat pada tujuan jangka panjangnya, bukan tentang apa yang akan dinikmati hari ini.

Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang baku dalam menyusun (membangun) dan menerapkan strategi. Strategi dapat diterapkan dalam membangun perekonomian, menyelesaikan konflik sosial, persaingan dalam bisnis, akulturasi budaya, hingga membangun pertahanan negara. Berbagai strategi itu pun dapat diterapkan dalam bidang politik, termasuk untuk memenangkan caleg perempuan di pemilihan legislatif 2009.

Menurut Kotler dalam Swastha (1984: 5) pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Apabila dikaitkan terhadap dunia politik, definisi tersebut sejalan dengan strategi pembangunan komunikasi politik. Di dalam komunikasi politik seorang caleg perempuan harus berupaya menawarkan berbagai solusi

alternatif terhadap permasalahan masyarakat. Janji-janji politik seorang caleg harus memperlihatkan kemampuannya dalam memberikan kepuasan dan kebahagiaan konstituen. Sedangkan, konstituennya diharapkan dapat menetapkan pilihan (memberikan suaranya) kepada caleg perempuan.

Komunikasi merupakan upaya membangun pencitraan dan gerakan politik yang baik. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui guna membangun komunikasi yang baik (strategi komunikasi), yaitu:

1. Mendengarkan, beraksi (berdiskusi) dan menanggapi
2. Mengungkapkan kebutuhan dan keinginan
3. Memberikan informasi sebaik mungkin
4. Persuasif
5. Negosiasi

Menurut Schroder (2008: 76) penyampaian informasi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penyampaian informasi harus steril dari indikasi adanya orang luar atau hal-hal yang dapat mengganggu (tingkat keamanan);
2. Berapa jumlah tim yang menerima informasi dan seberapa jauh jangkauan informasi dapat tersampaikan;
3. Seberapa cepat umpan balik (*feedback*) yang diterima dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi;
4. Berapa biaya yang diperlukan dalam penyampaian informasi untuk mencapai tahap berikutnya.

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa komunikasi (informasi) dapat dibedakan dalam dua aspek. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal bersifat rahasia dengan jumlah partisipasi rendah. Komunikasi eksternal bersifat terbuka dan harus disebarakan secara luas.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN), pemerintah memberikan bantuan pada keluarga miskin yang sifatnya langsung, seperti Subsidi Langsung Tunai (SLT). Pemberian SLT sejalan dengan penerapan strategi politik melalui pemberian barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti sembilan bahan pokok, sumbangan perlengkapan sholat, alat-alat pertanian maupun lainnya. Tindakan ini dilakukan untuk membangun persepsi bahwa kehadiran caleg akan memberikan sentuhan positif terhadap kemajuan masyarakat. Para caleg akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah permasalahan ekonomi.

Selain itu, terdapat beberapa strategi lain yang dapat diterapkan atau dikaitkan dengan strategi politik. Contoh, strategi keluarga dalam mencukupi kebutuhannya. Strategi keluarga (*coping strategy*) dalam upaya menanggulangi perubahan kebutuhan yang dihadapi, suami istri biasanya melakukan penghematan atau mengganti kebutuhan tertentu dengan alternatif lain yang setara namun lebih terjangkau. *Coping strategy* dapat dibedakan dalam tiga (3) bentuk, strategi penghematan (*Cutting Back*) yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, strategi penambahan pendapatan (*Generating Income*) dan hutang ataupun bantuan (Puspitawati. 2007).

Apabila dikaitkan dengan politik, hal itu sejalan dengan strategi politik caleg perempuan saat mengalami kemacetan terhadap pendanaan kampanye. Langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui penghematan (*Cutting Back*), mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan (*Generating Income*) dengan mencari bantuan (hutang) pada orang dan lembaga pendukung. Dalam hal ini, keterlibatan partai politik sebagai *suplayer* pendukung caleg perempuan harus dapat diberdayakan atau dimanfaatkan secara maksimal. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menyokong pendanaan kampanye politik para caleg perempuan. Strategi ini juga dilakukan untuk menekan atau mengefektifkan dana kampanye politik dengan lebih bijak dan tepat sasaran.

Porter (1980: 32) tentang strategi bersaing menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga pendekatan strategis generik yang potensial untuk mengungguli pesaing, yaitu:

1. Keunggulan biaya menyeluruh (maksimalisasi dana kampanye)
2. Diferensiasi (penyebaran wacana politik atau pencitraan politik)
3. Fokus

Strategi mengungguli pesaing tersebut mampu menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi hal negatif gerakan politik. Pendekatan lain yang dapat dilakukan oleh caleg perempuan untuk menekan persaingan terbuka atas ketidakstabilan dilapangan adalah melalui metode *ofensif* (serangan) dan *defensif* (bertahan).

Sikap *ofensif* digerakkan ketika caleg perempuan memiliki keyakinan yang matang atas kemampuan pribadinya. Strategi ini dilakukan untuk memperluas pasar dan menembus pasar baru, sebagai upaya meningkatkan jumlah pemilihnya.

Oleh karena, caleg perempuan harus *kapabel* dalam menawarkan solusi-solusi strategis terhadap wacana-wacana (permasalahan) yang berkembang di masyarakat. Strategi *defensif* dimunculkan apabila caleg perempuan ingin mempertahankan mayoritas suara yang diperolehnya. Sehingga langkah yang ditempuh adalah untuk menjaga stabilitas suara pemilihnya, agar tidak beralih pada kontestan (caleg) lain.

B. TINJAUAN TENTANG KONFLIK POLITIK

Penerapan strategi politik akan mengalami beberapa benturan, persaingan bahkan konflik, baik terhadap calon legislatif di internal maupun antar partai politik. Menurut Scroder (2008: 414) konflik adalah pertentangan yang dialami antara dua orang atau lebih (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, ambisi dan nilai-nilai etika), terjadi antara beberapa pihak atau kelompok, negara dan komunitas lainnya.

Teori mengenai terjadinya konflik:

1. Peneliti perilaku biologi, berangkat dari asumsi mengenai dorongan biologis manusia yang selalu muncul. Ia juga mengasumsikan adanya potensi umum tindakan agresif dan dengan menyimpulkan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang alami.
2. Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi psikologis manusia di satu sisi dan tuntutan norma masyarakat di sisi lain.

3. Masyarakat terbentuk dan tetap terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan keharusan. Karena itu, dimanapun manusia membentuk suatu ikatan sosial, di situ akan terjadi konflik.
4. Dari sudut marxisme, konflik disebabkan atas perbedaan suatu kepemilikan.

Menurut Djuhandar (2005: 61) bahwa salah satu dampak dari kekuasaan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk konflik di masyarakat, antara lain:

1) Konflik Rasial

Secara mendasar konflik rasial dibedakan atas konflik rasial horozontal dan konflik rasial vertikal. Konflik rasial horizontal adalah pertentangan antara dua ras yang berada dalam hubungan anak tangga sosial yang sama. Contoh konflik antara suku-suku di beberapa negara Afrika. Konflik rasial vertikal adalah pertentangan antara dua kelompok rasial yang berada dalam hubungan anak tangga sosial berbeda. Contoh konflik antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam di beberapa negara jajahan.

2) Konflik Antara Kelompok-Kelompok Horizontal

Konflik ini menggambarkan adanya dorongan dari kelompok-kelompok yang lebih rendah menginginkan kesamaan sosial, yang berarti pembagian horizontal dari masyarakat. Di antara kelompok horizontal ini antagonisme berkembang banyak yang bercorak politik, yaitu dengan tujuan merebut kekuasaan atau keuntungan yang berasal dari kekuasaan. Antagonisme ini dapat menjadi tameng bagi konflik lainnya seperti, kelas sosial. Konflik ini

pula memainkan peranan penting di dalam pengembangan antagonisme politik.

3) Konflik Antara Kelompok Teritorial

Pada pertengahan abad kedua puluh, bangsa-bangsa masih merupakan entitas teritorial yang mendasar. Baik dalam hukum dan kenyataan. Sebagai suatu hukum, kekuasaan internasional tidak mempunyai alat-alat meterial untuk memaksa agar bangsa-bangsa menaati keputusan-keputusannya. Dalam komunitas internasional, antagonisme cenderung lebih kuat daripada interaksi. Dari sini, konflik antar bangsa cenderung diselesaikan baik dengan kekerasan (perang) atau semata-mata dengan prosedur kontraktual (perjanjian, persetujuan diplomatik), bilamana tidak ada arbitrase kekuasaan politik.

Menurut Charles Watkins dan Duverger dalam artikel PB Anzor bahwa konflik terjadi karena kedua pihak (kelompok) secara potensial dan praktis/operasional dapat saling menghambat dan mengejar sasaran yang sama. (PB Anzor. *Konflik Melanda Partai Politik*. <http://www.gp-ansor.org>. Di download tanggal 20 maret 2010, pukul 20.00)

Pernyataan tersebut bila disimpulkan menggambarkan bahwa konflik tidak akan dapat dihindari, setiap moment/aktivitas cenderung berdekatan dengan konflik. Baik atas dorongan biologis, psikologis maupun sosiologis. Hal yang dapat dilakukan terletak pada pengurangan korban atau dampak atas terjadinya konflik tersebut.

C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA LEGISLATIF (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. (Eryanto Nugroho. *Dewan Perwakilan Rakyat*. <http://id.wikipedia.org>. Didownload tanggal 28 Januari 2009, pukul 20.25 wib).

D. TINJAUAN TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

1. Pengertian Gerakan Perempuan

Alfarez (1990: 58) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial politik, yang terdiri dari sebagian besar perempuan dan memperjuangkan keadilan gender.

Molyneux (2001: 87) mencirikan Gerakan perempuan sebagai berikut :

1. Suatu gerakan yang dimobilisasi untuk memperjuangkan hak pilih perempuan, hak perempuan untuk menjadi pemimpin, hak menjadi anggota organisasi atau hak-hak untuk berpartisipasi di bidang publik dan politik.
2. Suatu gerakan sosial yang dapat berupa jaringan kerja, klub atau group.

3. Dapat memberikan efek perubahan yang diekspresikan melalui bentuk hukum, budaya, sosial dan politik.
4. Meliputi substansi makro tentang perempuan.
5. Gerakan tersebut tidak dibangun secara eksklusif oleh perempuan.

Menurut Mirsell (2004: 178) terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan gerakan politik perempuan, yaitu:

1. Mengumpulkan pengalaman empiris perempuan sebagai akibat dari sistem politik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
2. Menggunakan HAM, Hak Asasi Perempuan dan demokrasi sebagai penentu arah gerakan pemberian dukungan dan upaya penolakan.
3. Menggunakan sejarah gerakan perempuan sebagai panduan dan kewaspadaan terhadap arah perjuangan.
4. Melakukan seleksi isu dan menentukan arah gerakan, dukungan dan penolakan.
5. Melakukan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan yang akan mempengaruhi gerakan penolakan dan dukungan.
6. Memilih beberapa sasaran utama untuk mencapai tujuan.
7. Membangun *vokal poin* di semua kekuatan kelompok masyarakat maupun pemerintah.
8. Melakukan strategi bersama lintas organisasi baik organisasi politik masyarakat maupun organisasi politik formal.

Menurut Kalyanamitra (2001: 2) setidaknya terdapat dua pemahaman umum terhadap gerakan perempuan, yaitu :

1. Membangkitkan kelompok-kelompok diskusi (yang tidak terhitung banyaknya), mengorganisir berbagai kegiatan profesi, serikat buruh, birokrasi pemerintah dan lembaga lainnya.
2. Merubah gambaran kaum perempuan (seperti yang dilakukan oleh media), mengorganisir kegiatan di bidang keagamaan, olahraga dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam berpartisipasi serta tingkat kepemimpinan kaum perempuan mulai berubah.

2. Pengertian Keterwakilan Perempuan

Lovenduski (2005: 35) menjelaskan tentang teori perwakilan politik yang isinya bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka yang telah memilihnya ataupun yang akan memilihnya di masa depan. Meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan tersebut. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pemilihan merupakan sebuah pasar yang sempurna, di mana seluruh permintaan politik diberikan. Masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang mereka inginkan dengan lebih seksama dan lebih bertanggung jawab.

Kusumaningtyas dalam Irianto (2006: 347) mengemukakan bahwa ilmu politik dan feminisme telah saling mempelajari satu sama lain. Feminisme telah mengembangkan ilmu politik dalam rangka memberi perhatian secara lebih hati-hati dan seksama terhadap perempuan. Hal itu diartikan bahwa feminisme dapat belajar melalui ilmu politik tentang hal-hal yang penting bagi perempuan, politik di dunia publik dan negara, serta cara-cara di mana perempuan dapat secara lebih efektif terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara.

Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, yang ditandatangani dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 640 (VII) tanggal 20 Desember 1959 menyebutkan bahwa perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan atas syarat-syarat sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Perempuan pun berhak dipilih untuk semua badan atau lembaga yang diselenggarakan secara pemilihan umum, dengan hak dan syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi apapun (Irianto. 2006).

Khairnur (2008: 3) mengatakan bahwa sudah saatnya menempatkan para perempuan pada wilayah-wilayah pengambil dan pembuat kebijakan strategis. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa *pertama*, yang paling mengerti mengenai persoalan perempuan adalah perempuan itu sendiri. *Kedua* adalah adanya prinsip keadilan. Khairnur mengatakan bahwa sudah saatnya penduduk terbesar, jumlah pemilih yang terbesar ini mendapatkan wakilnya yang bisa berbicara atas nama perempuan dan untuk memajukan kepentingan perempuan dengan porsi yang adil pula.

Lovenduski (2008:37) mengungkapkan bahwa Perwakilan politik perempuan dapat diartikan sebagai kehadiran anggota kelompok tertentu (perempuan) dalam lembaga-lembaga politik formal. Teori perwakilan politik menyebutkan bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang memilihnya atau yang akan memilih mereka di waktu mendatang.

Para perumus teori demokrasi membedakan perwakilan menjadi dua yaitu, perwakilan deskriptif dan perwakilan substantif. Perwakilan deskriptif menjelaskan bahwa kaum perempuan seharusnya berada dalam pembuat keputusan sebanding dengan jumlah penduduk mereka secara proporsional.

Sedangkan perwakilan substantif mengarahkan perhatian pada ide mengenai kepentingan-kepentingan perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan diharapkan dapat memadai sesuai porsinya.

3. Pengertian Calon Anggota Legislatif Perempuan (Caleg Perempuan)

Caleg Perempuan adalah para perempuan yang dipilih atau dipercaya oleh partai politik untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum anggota legislatif pada periode tahun tertentu. Strategi politik caleg perempuan adalah suatu rangkaian asas/prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan oleh perempuan untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif di daerah tertentu.

4. Kendala Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif

Terdapat empat kendala dalam membangun keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu:

1. Kendala Tradisi Organisasi Partai Politik

Pada tradisi-tradisi organisasi lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki laki-laki. Politik jauh dari menghormati nilai-nilai kolaborasi atau pembangunan konsensus. Aturan-aturan partai juga lebih menguntungkan kader laki-laki. Laki-laki lebih banyak diletakkan pada nomor jadi (*winable*), sementara perempuan ditempatkan pada nomor urut besar.

2. Kendala Sistem Sosial Budaya

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada dibawah laki-laki (*sub-ordinat*), rawan akan kecenderungan merebaknya berbagai *stereotip* (pembelahan negatif), *marginalisasi* (peminggiran dan pemiskinan perempuan), *subordinasi* (yang berdampak pada eksploitasi), dan tindakan

kekerasan (*violence*). Keputusan penting dan menyangkut masyarakat luas dianggap terlalu riskan untuk diserahkan pada perempuan.

3. Kendala Psikologis

Ketidakpercayaan diri perempuan untuk berhadapan dengan proses politik, menyebabkan tidak tampilnya perempuan dalam pentas politik formal. Terutama dengan adanya persepsi bahwa permainan politik itu sangat “kotor”.

4. Kendala Sosial Ekonomi

Ketidakteruntungan perempuan secara sosial ekonomi telah menempatkan perempuan menjadi kelompok warga negara yang rentan akan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi sangat kecil.

E. TINJAUAN TENTANG KETERWAKILAN (KUOTA 30 PERSEN) PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

1. Pengertian Kuota

Kuota adalah penetapan sejumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, majelis, komite, ataupun pemerintahan. Kuota untuk perempuan bertujuan agar adanya kaum minoritas kritis (*critical minority*) terdiri dari 30 sampai 40 persen perempuan. Pemikiran awal munculnya kuota adalah untuk memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik dan agar perempuan tidak menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi.

Dalam modul perempuan untuk politik (2004: 9) dijelaskan bahwa terdapat tiga macam kuota, yaitu:

1. Kuota yang terdapat di dalam Undang-Undang/Konstitusi (*legislated quota*).
2. Kursi yang diberikan khusus bagi perempuan (*reserved seats*)
3. Kuota partai (*party quota*)

Angka 30 dipandang sebagai angka kritis yang harus dicapai untuk memastikan sebuah perubahan. Angka 30 persen menunjukkan massa kritis yang akan memberikan dampak kualitas pengambilan keputusan. Jumlah 30 persen ditetapkan sebagai upaya menghindari dominasi salah satu jenis kelamin pada lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

F. TINJAUAN TENTANG PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Undang-Undang No 2 Tahun 2008, Pasal 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syahbani (2008: 57) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi, stabil, mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, berusaha mencari atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu. Dalam hal ini keberadaan partai politik merupakan suatu media bagi

seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik.

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik, sebagai kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu. Tindakan tersebut dilakukan melalui praktek kekuasaan secara langsung ataupun melalui partisipasi rakyat dalam pemilu. Partai politik dipandang sebagai lembaga atau organisasi yang lahir untuk mengembangkan kepentingan sosial dan politik. Partai politik dapat pula dijadikan sebagai rangkuman mekanisme-mekanisme untuk menyatakan serta mengatur perselisihan-perselisihan di masyarakat. (Hagopian, 1982: 38).

Partai politik merupakan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Partai politik menempatkan diri sebagai bagian yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Melalui partai politik kepentingan-kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi serta diperjuangkan. Kepentingan tersebut akan tersalurkan melalui berbagai bentuk kebijakan negara. Dirumuskan serta diaplikasikan oleh badan legislatif yang menjadi ranah formal dari berlakunya fungsi-fungsi partai politik. Partai politik dapat pula dijadikan sebagai media pengatur konflik yang berkembang di masyarakat. (Syafiie, 1997: 45).

Menurut Duverger dalam Djuhandar (2005: 98) terdapat tiga tipe keanggotaan partai politik, yaitu:

- a. Partai politik "kader" yang keanggotaannya didasarkan atas suatu kelompok elite terbatas yang terdiri atas individu-individu penting

- b. Partai politik "sel" dan partai "milisia" keanggotaannya didasarkan atas suatu hierarki terpusat yang langsung bertanggung jawab kepada pemimpinnya masing-masing
- c. Partai politik "massa" yang keanggotaannya didasarkan atas pembagian iuran dan pemimpin bertanggung jawab secara konstitusional sampai pada tingkatan yang berbeda.

2. Pengertian Tentang Partisipasi Politik

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela, di mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung pada pembentukan kebijaksanaan umum. Tindakan ini mencakup kegiatan-kegiatan memilih dalam pemilihan umum atau menjadi anggota golongan politik. Seperti, partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik formal (Lembaga Eksekutif maupun Legislatif) atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu. Seperti, berkampanye, menghadapi kelompok diskusi dan sebagainya (Budiardjo, 1982: 161).

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di saat itu, masyarakat dapat menyalurkan sikap politiknya terhadap salah calon pemimpinnya, secara langsung tanpa intervensi dari pihak manapun.

Menurut Robert Lane dalam Djuhandar (2005: 103) mengemukakan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
- 2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial
- 3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
- 4) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan psikologis tertentu

Berdasarkan empat fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan melakukan partisipasi politik apabila partisipasi tersebut dipandang memiliki pertautan dengan dirinya, baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut menjadi sarana bagi seseorang untuk memenuhi hasrat pribadinya.

G. KERANGKA PIKIR

Penggunaan suara terbanyak merupakan tantangan besar bagi partai politik. Penggunaan suara terbanyak menggambarkan bahwa setiap caleg memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kursi legislatif. Mereka tidak lagi terbatas oleh nomor urut. Hal ini begitu dirasakan oleh kader perempuan yang terkesan dinomor duakan, terutama di masyarakat yang menganut budaya patriarkhi.

Partai politik harus berupaya keras agar kader perempuannya dapat memenangkan pemilihan legislatif 2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan penggunaan suara terbanyak akan mengancam jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri. Jumlah Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dapat jatuh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya isu dan stereotipe yang

berkembang dimasyarakat. Isu dan stereotipe tersebut menyebabkan perempuan sulit menerapkan strategi politiknya secara maksimal.

Partai politik harus memberikan pendidikan politik secara maksimal. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang strategi politik yang baik, sehingga mampu memenangkan pemilihan legislatif. Melalui pendidikan politik proses penyerapan dan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif. Melalui komunikasi (secara langsung maupun tidak langsung), hubungan interaksi terhadap berbagai element masyarakat yang menjadi objek sasarannya dapat tersalurkan secara baik. Hal ini membuktikan bahwa partai politik mampu menjadi lembaga politik formal yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat.

Caleg perempuan harus mampu membaca karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Secara umum masyarakat dibedakan atas daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan terhadap dua karakteristik masyarakat ini tentunya berbeda-beda. Metode pendekatan yang dilakukan perlu memperhatikan berbagai kebudayaan yang ada di setiap daerahnya. Menurut Koentjaraningrat dalam Bungin (2008: 53) bahwa terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan universal meliputi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian dan ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Budaya ini tentu harus diperhatikan secara bijak oleh caleg perempuan sehingga, strategi politik yang dibentuk tidak menjadi sia-sia.

Pengetahuan caleg perempuan dalam membaca budaya yang berkembang dapat memudahkannya untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Proses penyampaian informasi, maksud dan tujuan pencalonan dapat tersalurkan dengan baik. Pengetahuan itu pula akan memudahkan caleg perempuan dalam merumuskan dan membentuk strategi yang cocok digunakan pada karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tersebut.

Pengetahuan akan budaya masyarakat dapat menjadi modal utama dalam pembentukan strategi politik. Akan tetapi, caleg perempuan tetap akan sulit menerapkan strategi pada masyarakat yang menganut budaya patriarkhi. Caleg perempuan harus mampu memberikan nilai lebih atas keberadannya sebagai wakil rakyat. Caleg perempuan harus mampu menawarkan sisi lain dari dirinya yang mampu mengalihkan perhatian masyarakat dari budaya patriarkhi.

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2008: 199) setidaknya terdapat empat strategi dalam marketing politik yang dapat digunakan oleh caleg perempuan yaitu, Produk, Promosi, Harga dan *Place* (tempat). Pertama, Produk. Dalam hal ini parpol atau caleg digambarkan sebagai "barang". Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen (pemilih). Produk dapat dirasakan keindahan, kenyamanan dan kenikmatannya ketika telah digunakan (dipilih). Kebermanfaatan keberadaan caleg perempuan dapat dirasakan ketika telah terpilih sebagai wakil mereka (rakyat) di parlemen. Untuk itu, mutu dari sebuah produk merupakan hal utama yang dapat menarik perhatian masyarakat. Produk politik dibagi dalam tiga (3) kategori yaitu, *Party Platform* (*Platform Partai*), *Past Record* (catatan masa lalu), *Personal Characteristic* (Ciri Pribadi).

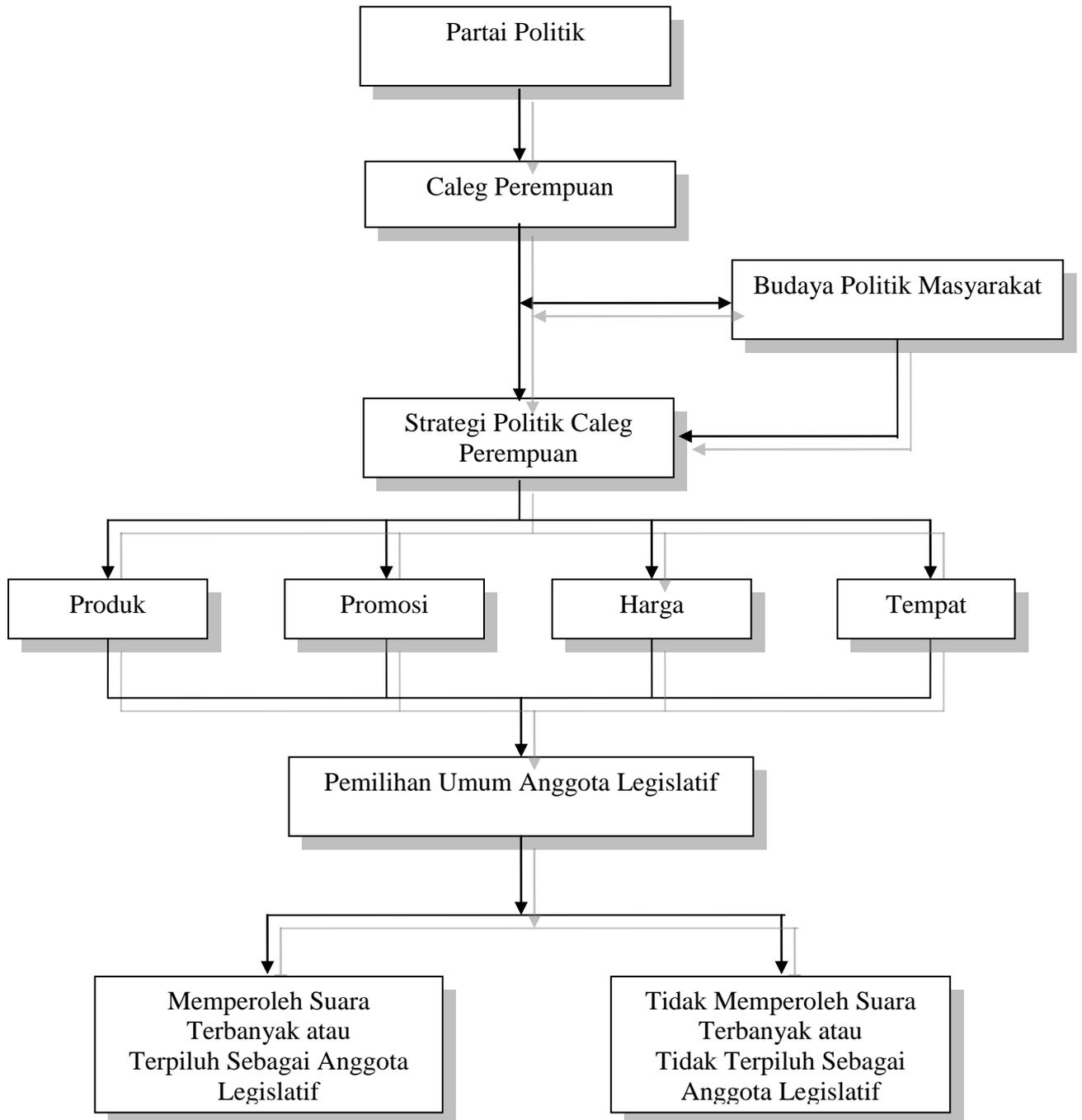
Kedua, Promosi. Caleg perempuan harus mampu melakukan promosi secara maksimal. Promosi dapat dilakukan melalui media lisan maupun tulisan. Promosi akan terasa lebih maksimal ketika caleg perempuan mampu memperhatikan tingkat elektabilitas media promosi tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak semua media tepat dijadikan sebagai alat promosi. Promosi dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat.

Ketiga, Harga. Dalam politik, harga digolongkan ke dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga *image* (citra) nasional. Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye. Harga psikologis yaitu mengacu kepada kenyamanan masyarakat atas latar belakang dari caleg perempuan seperti, etnis, agama dan pendidikan. Harga *image* nasional berkaitan dengan citra seorang caleg. Caleg perempuan harus dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa dirinya mampu memberikan citra positif bagi daerah dan menjadi kebanggaan nasional.

Keempat, tempat (*Place*). Caleg perempuan harus memperhitungkan wilayah atau daerah yang menjadi basis suaranya. Dalam berkampanye caleg harus mampu mengidentifikasi, memetakan struktur dan karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Identifikasi dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di setiap daerah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pengetahuan caleg terhadap berbagai hal tersebut memudahkan dalam menentukan dan merumuskan strategi yang pantas bagi masyarakat dengan keadaan geografis dan karakteristiknya masing-masing.

Kemampuan dan pemahaman caleg dalam mengkolaburasikan keempat rangkaian strategi marketing politik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal itu tentu akan berdampak signifikan bagi perolehan suara politik yang diraih oleh caleg perempuan. Keberhasilan strategi politik akan terbukti dalam pemilihan legislatif. Strategi yang baik dapat meningkatkan suara hingga hal yang tidak terbayangkan, menjadikan caleg perempuan sebagai orang nomor satu di daerahnya dan terpilih sebagai anggota legislatif. Kesalahan dalam penerapan strategi akan berdampak negatif bagi perolehan suara politik hingga hal yang tidak terbayangkan, bahkan dapat menghabiskan harta benda yang dimiliki.

Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini Deskriptif Kualitatif. Tujuannya agar dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan di lapangan dengan teori dan konsep, dari data penelitian yang didapat, Nawawi (2001: 240). Menurut, Hotomo dalam Bungin (2003: 56) deskriptif kualitatif artinya mencatat secara teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca via wawancara atau catatan lapangan, foto, videotape, dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan lain-lain. Peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan.

Moleong (2005: 11) menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan atau sudah diteliti. Penelitian ini akan menggambarkan tentang berbagai strategi pemenangan yang dipilih dan diterapkan, potensi serta kendala yang dihadapi caleg perempuan dalam menerapkan strategi politiknya.

Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat singkat dan jelas, guna mempermudah pembaca dalam memahaminya. Untuk memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, dilapangan proses pendekatan kepada informan dilakukan

dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

B. Fokus Penelitian

Miles dan Haberman (1992: 36) menyatakan bahwa fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang samar-samar. Dalam proses mengumpulkan data, kerangka penelitian harus bersifat fleksibel, sehingga dapat mengubah arahan dengan baik dan memfokuskan kembali data yang terkumpul guna pelaksanaan penelitian berikutnya.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui strategi politik calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009, sebagai upaya untuk duduk dilembaga legislatif 2009-2014. Fokus penelitian ini adalah:

1. Peran partai politik dalam membantu pembentukan dan penerapan strategi politik caleg perempuan.
2. Proses pembentukan dan penerapan strategi politik caleg perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009.
3. Konflik-konflik yang dihadapi caleg perempuan dalam menerapkan strategi politiknya
4. Kendala-kendala yang caleg perempuan dalam menerapkan strategi politiknya

C. Penentuan Informan

Informan adalah sumber data utama dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penentuan mengenai siapa yang menjadi informan kunci harus melalui beberapa pertimbangan (Bungin. 2003: 63) antara lain:

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
2. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
3. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelekkan orang lain dan;
4. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Menurut Spradley dalam Miles (1992), untuk memperoleh informasi yang baik terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran serta perhatian penelitian.
2. Subjek yang masih terkait dan sedang atau pernah terlibat secara penuh pada lingkungan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subjek memiliki cukup banyak informasi, waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah informan yang menguasai pokok permasalahan, memiliki data serta mengerti tentang topik masalah penelitian. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif perempuan dan masyarakat di daerah Kecamatan Natar, terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah pemilihan para caleg perempuan tersebut. Untuk informan caleg perempuan dibedakan atas caleg

perempuan yang menjadi anggota legislatif, caleg perempuan yang gagal tetapi telah berusaha maksimal dan caleg perempuan yang tidak jadi dan tidak bekerja maksimal.

D. Lokasi Penelitian

Moleong (2000: 86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik untuk ditempuh adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan guna mencari kesesuaian kenyataan yang ada. Sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga juga perlu dijadikan pertimbangan penentuan lokasi penelitian. Untuk itu, penelitian ini akan dilakukan di Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar pemilihan lokasi penelitian bahwa daerah tersebut merupakan penghubung (antara) Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. Persinggungan ini akan memudahkan para calon anggota legislatif untuk mengakses berbagai informasi maupun perkembangan isu di masyarakat. Informasi ini berfungsi dalam membentuk strategi pemenangan yang tepat berdasarkan karakteristik masyarakat di daerah pemilihannya (Kecamatan Natar).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi (studi pustaka).

1. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka. Pelaksanaannya dilakukan tidak sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Dalam proses pelaksanaannya sebelum mengumpulkan data di lapangan, akan disusun daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Namun, pedoman tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat ketat. Melainkan bersifat fleksibel sesuai situasi dan

kondisi di lapangan. Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kehabisan pertanyaan ketika wawancara berlangsung (Bungin, 2003: 63).

Pengamatan dilakukan kepada orang-orang yang paham dan mengenal secara mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun informan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif perempuan dan masyarakat di daerah kecamatan natar, terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah pemilihan para caleg perempuan tersebut. Wawancara kepada pengurus partai politik untuk mengetahui peranserta partai politik dalam membantu caleg perempuan agar memenangkan pemilihan legislatif 2009. Wawancara kepada caleg perempuan dilakukan untuk mengetahui tentang berbagai strategi politik yang digunakan untuk memenangkan pemilihan legislatif 2009. Wawancara kepada masyarakat untuk mengecek dan ricek kesesuaian konsep strategi politik caleg perempuan dengan penerapannya di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atau memastikan bahwa strategi politik yang disampaikan informan (caleg perempuan) dalam penelitian ini adalah benar dan sesuai dengan yang dilakukan di lapangan. Bukan sekedar konsep idealis tanpa implementasi strategis (strategi fiktif).

2. Dokumentasi (studi pustaka)

Dokumentasi (studi pustaka) merupakan suatu upaya mencari dan meningkatkan referensi yang berkaitan dengan kajian penelitian. Dokumen yang digunakan antara lain adalah buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet, koran dan lain-lain. Dilakukan untuk mencari atau memasukkan data sekunder sebagai referensi penelitian dengan prinsip kehati-hatian dan kejelian. Berbagai data tersebut perlu disaring secara bijak dan harus disesuaikan dengan kajian penelitian itu sendiri. Dalam hal ini tentang berbagai strategi politik calon legislatif dalam memenangkan pemilihan legislatif.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1983:91) analisa data adalah suatu kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan manipulatif serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis melalui analisa kualitatif, yaitu menganalisa data, memecahkan permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Miles dan Habermas dalam Bungin (2003: 229) bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini akan dipusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan itu, kemudian dipilih, untuk dilihat kerelevansiannya terhadap tujuan penelitian. Berbagai data yang terpilih, disederhanakan, diklasifikasikan serta dijabarkan atas dasar tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian hasilnya akan diuraikan secara singkat dalam bentuk ringkasan.

2. Tahap Penyajian Data (Display)

Pada tahap ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif terlebih dahulu. Hasil teks naratif tersebut diringkas dalam bentuk uraian sederhana yang menggambarkan alur proses perubahan cultural, dari monokulturalis ke interkulturalitas. Masing-masing komponen dalam uraian merupakan abstraksi dari teks naratif data lapangan. Penyajian informasi hasil penelitian dilakukan berdasarkan susunan yang telah diabstraksikan dalam uraian tersebut.

3. Verifikasi (Kesimpulan)

Tahap ini akan dilakukan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul pada data penelitian. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data, perlu juga memfokuskan perhatian pada abstraksi data yang tertuang dalam uraian. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklasifikasikan kembali, baik dengan informan di lapangan maupun melalui diskusi-diskusi dengan rekan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap dihentikan.

Hasil analisis data akan menggambarkan berbagai penerapan strategi yang digunakan para caleg perempuan untuk memperoleh suara terbanyak pada pemilihan legislatif 2009.

G. Teknik Uji Validitas Data Kualitatif

Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, realibilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Beberapa usaha agar persyaratan tersebut terpenuhi. Usman (1995: 88-89) mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Kreadibilitas

Kreadibilitas adalah kesesuaian antara konsep penelitian dengan konsep informan.

Agar kreadibilitas terpenuhi maka haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- a. Pengamatan yang terus menerus
- b. Mengadakan triangulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.
- c. Mendiskusikan dengan teman seprofesi

- d. Menganalisis kasus negatif, yaitu kasus-kasus yang bertentangan dengan hasil penelitiannya pada saat-saat tertentu.
- e. Menggunakan alat-alat bantu dalam mengumpulkan data seperti tape recorder, tustel, video, dan sebagainya.
- f. Menggunakan *member chek*, yaitu memeriksa kembali informasi kepada informan dengan mengadakan pertanyaan ulang atau mengumpulkan sejumlah informan untuk dimintai pendapatnya tentang data yang telah terkumpul.

2. Dependabilitas dan Komfirmabilitas

Dependabilitas adalah apabila hasil penelitian kita memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang diulang pihak lain, karena desain yang *emergent*, lahir selama penelitian berlangsung. Untuk membuat penelitian kualitatif dependabilitas maka perlu disatukan dengan komfirmabilitas. Hal ini dikerjakan dengan cara *audit trail* yang dilakukan oleh pembimbing.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Natar

1. Keadaan Geografis

Berdasarkan letak geografis, Kecamatan Natar termasuk kepada kawasan bagian sebelah barat Lampung Selatan. Kecamatan Natar merupakan daerah yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Lampung Selatan. Secara administratif luas wilayah Kecamatan Natar adalah 24,94 Km² yang terdiri dari 22 Desa. Ibukota kecamatan berada di Desa Merak Batin. (Arsip Kecamatan Natar 2009).

Adapun batas wilayah Kecamatan Natar adalah :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang (Lampung Selatan)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tagineneng (Pesawaran)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa (Bandar Lampung)

Secara geografis, Kecamatan Natar merupakan daerah strategis bagi perkembangan pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Akses informasi teknologi, pengembangan jaringan kota ke desa, *controlling*, evaluasi hingga permasalahan-permasalahan dalam pembangunan Provinsi Lampung dapat segera terserap (*up date*) dengan cepat oleh masyarakat di Kecamatan Natar.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk yang bermukim di Kecamatan Natar memiliki pekerjaan yang heterogen. Heterogenitas tersebut terlihat dari keberagaman pekerjaan yang dilakukan masyarakat, meskipun masih didominasi sektor pertanian. Akan tetapi, tidak mendominasi secara mutlak. Pekerjaan masyarakat tersebar ke berbagai bidang dengan pembagian yang hampir merata.

Klasifikasi penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Klasifikasi Pekerjaan Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	19,673
2	Peternak	1000
3	Nelayan	0
4	Pedagang	892
5	Pengrajin	248
6	Pengusaha	1,877
7	PNS	1,591
8	TNI/POLRI	708
9	Lain-lain	18,762
	Total	44,751

Sumber : Kecamatan Natar. 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Natar bekerja sebagai petani, dengan jumlah 19.673 jiwa. Selebihnya adalah peternak, pedagang, pengrajin, pengusaha, PNS, TNI/POLRI. Pekerjaan lain-lain seperti, supir, buruh kasar, tukang parkir, menempati urutan kedua setelah petani, yakni sebanyak 18.762 jiwa.

Berdasarkan informasi dari Kasi Infokom Kesos dan Naker bahwa sampai akhir Januari 2009 jumlah penduduk di Kecamatan Natar adalah 157.775 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 80.316 jiwa dan 77.439 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk

No.	DESA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	HAJIMENA	5052	6600	11652
2	SIDODADI	1770	1620	3390
3	PEMANGGILAN	3164	3008	6172
4	NATAR	7161	7135	14296
5	MERAK BATIN	9129	8740	17869
6	KRAWANG SARI	1981	2093	4074
7	MUARA PUTIH	2696	2455	5151
8	TANJUNG SARI	8000	3441	11441
9	NEGARA RATU	5121	4829	9950
10	REJOSARI	2104	2276	4380
11	BUMI SARI	3217	3542	6759
12	CANDIMAS	4797	4844	9641
13	PANCASILA	1249	1291	2540
14	SUKA DAMAI	2199	2560	4759
15	BANDARREJO	1635	1841	3476
16	PURWO SARI	1633	1637	3270
17	RULUNG RAYA	3063	3200	6263
18	RULUNG HELOK	4875	4580	9455
19	BRANTI RAYA	2798	2885	5683
20	HADUYANG	2795	3200	5995
21	BANJAR NEGERI	2675	2215	4890
22	MANDAH	3202	3447	6649
	JUMLAH	80316	77439	157755

Sumber : Bidang Kependudukan Kecamatan Natar. 2009

Dari 22 desa yang ada di Kecamatan Natar, kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Merak Batin dengan jumlah penduduk sebanyak 17.869 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling rendah berada di Desa Pancasila dengan jumlah 2.540 jiwa. Untuk daftar pemilih tetap yang memiliki hak suara pada pemilihan legislatif 2009 berjumlah 109.968 jiwa.

Jumlah pemilih tetap pada pemilihan umum anggota legislatif di Kecamatan Natar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Daftar Pemilih Tetap

NO URUT	DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH TERDAFTAR		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BANDAREJO	7	1220	1178	2398
2	BANJARNEGRI	10	1594	1560	3154
3	BRANTI RAYA	22	3244	3128	6372
4	BUMI SARI	14	2536	2568	5104
5	CANDIMAS	20	3734	3884	7618
6	HADUYANG	14	2032	1913	3945
7	HAJIMENA	28	4447	4504	8951
8	KRAWANG SARI	8	1347	1271	2618
9	MANDAH	9	1369	1361	2730
10	MERAK BATIN	38	6525	6260	12785
11	MUARA PUTIH	12	1853	1720	3573
12	NATAR	32	5651	5530	11181
13	NEGARA RATU	23	3562	3335	6897
14	PANCASILA	6	994	945	1939
15	PEMANGGILAN	15	2235	2189	4424
16	PURWOSARI	6	1170	1079	2249
17	REJOSARI	10	1282	1269	2551
18	RULUNG HELOK	16	2831	2491	5322
19	RULUNG RAYA	10	1832	1634	3466
20	SIDOSARI	8	1380	1272	2652
21	SUKADAMAI	14	2255	2274	4529
22	TAMJUNG SARI	14	2880	2631	5511
	JUMLAH	336	55973	53996	109969

Sumber : PPK Kecamatan Natar. 2009

Berdasarkan tabel di atas, dari total penduduk sebanyak 109.969 jiwa. Desa Merak Batin memiliki kepadatan penduduk tertinggi, dari total 17.869 jiwa yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.785 jiwa. Sedangkan Desa Pancasila sebagai desa dengan jumlah penduduk paling rendah, dari total penduduk 2.540 jiwa, sebanyak 1.939 jiwa yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Natar sangat dipengaruhi oleh perkembangan kota yang cukup signifikan. Heterogenitas pekerjaan, suku budaya dan status sosial menyebabkan hubungan antar masyarakat terjadi dengan sangat

terbatas. Interaksi antar penduduk terjadi apabila ada kepentingan atau dalam moment-moment tertentu. Hanya di desa-desa tertentu saja interaksi antar masyarakatnya masih terjaga dengan baik.

Wilayah Kecamatan Natar terletak di jalur lintas sumatera serta bersinggungan langsung dengan Ibukota Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung. nya Wilayah Kecamatan Natar yang strategis menyebabkan kawasan ini dapat dikembangkan menjadi daerah perdagangan dan jasa. Selain itu, wilayah Kecamatan Natar juga merupakan kawasan peindustrian yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Natar.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, di Kecamatan Natar telah berdiri berbagai lembaga ekonomi seperti BUMN, Perusahaan Swasta, Industri Rumah Tangga (*Home Industri*), Pasar, Pusat Perbelanjaan (Mall), dan yang paling menjamur adalah toko swalayan atau mini market. Keadaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Lembaga Ekonomi di Kecamatan Natar, sebagai berikut :

Tabel 9. Persebaran Lembaga Ekonomi

No.	Nama	Jumlah
1	BUMN	4
2	BUMD	0
3	Perusahaan Swasta	175
4	Home Industri	80
5	Toko Swalayan	1880
6	Pusat Perbelanjaan (Mall)	1
7	Pasar	7
	Total	2147

Sumber : Bidang Ekonomi Kecamatan Natar. 2009

4. Kondisi Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kecamatan Natar dapat dikatakan baik, hal itu ditandai dengan tumbuhnya beberapa lembaga pendidikan yang menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas generasi muda.

Lembaga Pendidikan di Kecamatan Natar, yaitu:

Tabel 10. Lembaga Pendidikan

No.	Nama	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	3
2	SLTA/Sederajat	14
3	SLTP/Sederajat	30
4	SD/Sederajat	115
5	TK	45
6	PAUD	20
7	Kursus, Bimbel dll	15
Total		242

Sumber : Monografi Kecamatan Natar. 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Natar telah mampu memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas. Perkembangan kualitas pendidikan tersebut dapat dilihat mulai dari jumlah hingga klasifikasinya (formal dan informal) lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Natar. Penyebaran lembaga pendidikan formal tersebut dapat dilihat dari jenjang paling dini (PAUD) hingga ke tingkat pendidikan paling tinggi (Perguruan Tinggi).

5. Kondisi Kesehatan

Kecamatan Natar merupakan wilayah dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Tingginya angka kesehatan masyarakat tidak luput dari peran serta pemerintah dan warga dalam menyediakan, menjaga dan menggunakan fasilitas kesehatan yang telah diberikan. Fasilitas kesehatan tersebut seperti, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Dokter praktek, Ahli gigi, Apotek, dan Posyandu.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Natar dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 11. Lembaga Kesehatan

No.	Nama	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	4
3	Klinik	3
4	Dokter praktek	3
5	Ahli gigi	6
6	Apotek	5
7	Posyandu	115
Total		137

Sumber : Kecamatan Natar. 2009

6. Kondisi Politik

Kecamatan Natar merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkembangan politik begitu cepat. Masyarakat semakin gemar memperbincangkan (mengkritisi) permasalahan yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya diskusi-diskusi jalanan atau dadakan bentukan pemuda, pemudi dan masyarakat sekitar. Warung kopi, jeda antara salat magrib dengan isya, gardu ronda menjadi media perbincangan politik, terutama saat-saat mendekati waktu pemilihan. Observasi terlibat. Tanggal 16-22 Maret 2009 di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar.

Perkembangan wacana politik tersebut tidak luput atas kegemaran masyarakat meng-up date berita terkini yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, masyarakat Natar sebagian besar telah mencoba terlibat aktif dalam politik praktis (partai politik). Tahun 2009 jumlah masyarakat Natar yang terlibat dalam partai politik meningkat tajam.

Meningkatnya jumlah keterlibatan masyarakat di dalam partai politik dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, semakin cerdas atau pintarnya masyarakat dalam berpolitik. Kemudahan dalam mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satunya media Internet secara tidak langsung membawa dampak positif terhadap wacana politik masyarakat. Masyarakat semakin selektif dalam menilai dan memilih caleg yang akan memperjuangkan aspirasinya 5 tahun ke depan.

Kedua, peluang untuk berkembang. Undang-Undang No 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengungkapkan bahwa syarat menjadi badan hukum, partai politik harus memiliki kepengurusan yang berimbang (Pusat/DPP hingga Desa/Ranting). Meningkatnya jumlah partai politik pasca orde baru menyebabkan masyarakat memiliki kesempatan besar untuk terlibat dalam ranah politik. Moment tersebut dapat tersalurkan dengan cara terlibat aktif dalam politik (kader/anggota Partai Politik) maupun menjadi partisipan (Tim Pemenangan/Pendukung).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalan utama yang dimiliki masyarakat Natar adalah Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum). Jalinsum merupakan alat penghubung wilayah Jawa dengan Sumatra dan antar wilayah Kabupaten/Kota di Lampung dengan Pusat Kota (Bandar Lampung). Akses jalan yang menjadi penghubung antar wilayah ini menjadikan Natar sebagai tempat yang strategis bagi penerimaan budaya dan informasi.

Kantor Kecamatan Natar merupakan pusat informasi guna menerima dan menampung permasalahan. Sarana transportasi yang memadai dapat memudahkan masyarakat menjangkau kantor kecamatan. Sepeti becak, ojek, dan angkutan

pedesaan. Posisi kecamatan yang berada pada sisi jalan raya sangat mempengaruhi sarana transportasi. Kondisi sarana transportasi ini mempengaruhi animo penduduk dalam menyelesaikan permasalahannya di Kecamatan Natar.

Kondisi jalan pedesaan yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah lainnya terbilang cukup baik, meskipun sedikit bergelombang. Mudahnya akses jalan ini berkorelasi positif terhadap mobilisasi para caleg perempuan dalam mengkampanyekan dirinya di tengah masyarakat. Koordinasi antara partai politik, caleg dan tim pemenangan dapat dilakukan secara cepat dan mudah.

Kecamatan Natar juga memiliki Bandar Udara, yaitu Bandar Udara Radin Intan. Keberadaan Bandar Udara semakin memudahkan proses kampanye yang dilakukan para caleg perempuan dan partai pengusungnya. Partai politik dan kandidatnya dapat dengan mudah menghadirkan tokoh-tokoh politik guna meningkatkan simpati masyarakat. Dengan demikian, proses kaderisasi dan pendewasaan politik masyarakat dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tentang Informan

Tabel 12. Gambaran Informan

No.	Nama	Pendidikan	Asal Partai	Usia	Kode
1.	Sunarto.,B.SE	Sarjana Muda Ekonomi	PDIP	63 Th	A
2.	Farida Ariani	SMU	PDIP	32 Th	B
3.	Istiah	SMP	-	54 Th	C
4.	Kausar Chospan S.Psi	Sarjana Psikologi	Hanura	47 Th	D
5.	Intip	SMU	PDK	33 Th	E
6.	Sugiharti,. S.E	Sarjana Ekonomi	Hanura	29 Th	F
7.	Sumiyati	SLTA	Hanura	41 Th	G
8.	Halimatus Sakdiah	SLTA	PKNU	40 Th	H

2. Pandangan Informan

a. Informan I.

Sunarto.,B.SE (Kode A) adalah seorang Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PAC PDIP) yang cukup peduli terhadap ketewakilan perempuan. Keberadannya di PDIP sudah sangat lama, sekitar 12 Tahun. Sebelum aktif di PDIP A adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tahun 1998 bergabung dengan PDIP dan menjabat sebagai wakil ketua. Tahun 1999, A terpilih sebagai Anggota Dewan dari Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan. Ditahun yang sama dalam Komfercab (Komfrensi Cabang) A terpilih sebagai Ketua PDIP di tingkat kecamatan (PAC) hingga sekarang.

A mengatakan bahwa sudah sangat lama PDIP menggagas adanya keterwakilan perempuan di partai politik. Sebelum adanya himbauan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keterwakilan perempuan 30% dalam setiap partai politik, PAC PDIP telah memiliki keterwakilan perempuan sebesar 20%. Namun, hal itu memang baru mampu dilakukan di tingkat Kecamatan, salah satunya di Natar. Untuk tingkat Ranting, PDIP belum mampu memberikan keterwakilannya secara maksimal.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang maksimalnya keterwakilan perempuan di Tingkat Ranting (desa), yaitu:

1. Rendahnya respon atau minat perempuan untuk terjun berpolitik.
2. Rendahnya respon dari suami (tidak mendapat izin suami) untuk terjun berpolitik.

Akan tetapi, A mengatakan hal ini tidak menjadi kendala besar dalam membangun sistem demokrasi yang baik di Indonesia terutama Kecamatan Natar. PAC PDIP Kecamatan Natar memiliki keyakinan melalui pendidikan politik yang dilakukan partainya. PDIP mampu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Natar. Karena pada dasarnya perempuan sangat membutuhkan keterwakilan dari dirinya di lembaga legislatif. Dengan demikian berbagai aspirasi mereka dapat disalurkan dan diperjuangkan dengan baik.

Metode Pendidikan politik yang dilakukan oleh PAC PDIP digolongkan dalam beberapa hal :

1. Pendidikan Formal

Pembinaan kepada para kader dilakukan melalui diskusi-diskusi internal, kader perempuan sering dilibatkan untuk menjadi pembawa acara (MC) dalam rapat partai. Tindakan ini dilakukan untuk melatih kader perempuan agar berani tampil di depan publik. Membiasakan diri mereka menyuarakan jeritan rakyat atas ketidakadilan. Dengan demikian, pemikiran para kader akan terlatih secara sendirinya seiring keaktifan dan loyalitas mereka kepada parpol.

2. Pendidikan Informal

Pendidikan dan Penyadaran politik kepada masyarakat dilakukan oleh PDIP melalui para kadernya yang ada di setiap daerah. Kader-kader PDIP akan memberikan wacana politik kepada masyarakat melalui diskusi ringan atas suatu permasalahan yang terjadi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami, minimal mendapatkan gambaran tentang demokrasi yang ada di Indonesia.

A mengatakan bahwa partainya tidak pernah membedakan para kadernya, semua mendapatkan hak sesuai porsinya masing-masing. Pemilihan Anggota DPRD Lampung Selatan untuk periode 2009–2014 pun demikian. Setiap kader memiliki hak yang sama untuk dicalonkan. Pendaftaran menjadi Anggota DPRD Lampung Selatan di Dapil 6 Kecamatan Natar, PAC PDIP menggunakan aturan main yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat. Dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan perempuan 30%.

Mekanisme mendapatkan penetapan nomor urut calon anggota DPRD dari Partai PDIP didasari atas kemampuan kader di dalam partai. Posisi (jabatan) dan senioritas di parpol masih sangat diperhitungkan. Semakin tinggi jabatan dan tingkat senioritas di partai akan memberikan kontribusi besar guna mendapatkan nomor urut kecil atau strategis.

Demikian pula untuk menyokong kemenangan kadernya dalam pemilihan legislatif di Dapil 6 Kecamatan Natar. Partai PDIP memberikan andil besar bagi para kadernya untuk dapat memenangkan pertarungan politik. Bantuan partai kepada kadernya disalurkan dalam bentuk pemberian berbagai atribut kampanye secara maksimal dengan berasaskan keadilan. Atribut-atribut itu seperti kaos, bendera partai dan pemberian pemahaman kepada kader tentang data dan tipologi pemilih.

A mengatakan setiap pemilihan legislatif pasti ada konflik, baik internal maupun eksternal. Setiap kontestan politik (caleg) akan berebut suara di masyarakat, hal itulah yang menjadi pemicu adanya konflik parpol. Akan tetapi menurutnya, konflik itu hanya sebatas pada penunjukan yang terbaik di depan publik. Suatu sikap dan tindakan guna memperoleh suara terbanyak di Dapilnya. Agar caleg dapat duduk di lembaga legislatif ditempatnya mencalonkan diri. Konflik-konflik tersebut tidak pernah meningkat sampai tataran partai dan lingkungan masyarakat secara umum. Pasca pemilihan kehidupan partai kini dapat berjalan stabil.

Berikut ini adalah petikan wawancara antara peneliti dengan informan A.

Peneliti : “Apakah dalam pemilihan legislatif kemarin bapak ikut mencalonkan diri?”

A : “Iya, saya ikut. Akan tetapi, tindakan tersebut dilakukan hanya untuk meningkatkan perolehan suara partai supaya caleg dari partai saya bisa duduk sebagai Anggota Legislatif. Bukan serius untuk menduduki kursi legislatif. Yang penting saya ada suara, biar gak malu-maluin. Masak ketua partai sekaligus mantan anggota dewan gak punya massa”.

Peneliti : “Kenapa seperti itu pak, bukanya bapak sebagai Ketua Partai memiliki peluang yang lebih besar?”

A : “Dalam berpolitik itu harus cerdas dek, harus memperhatikan siapa-siapa saja lawan politik kita. Jangan sampai main trabas, itu sama saja mati konyol. Semua sudah saya hitung, siapa-siapa saja yang mencalonkan diri, dari partai mana, apa latar belakang politiknya, tingkat pendidikannya, bagaimana ketokohnya, pengaruhnya dimasyarakat, berapa jumlah uangnya dan lain-lain. Setelah saya hitung-hitung, kemungkinan menang sangat kecil. Tinggal saya fokuskan membantu rekan-rekan saya se-partai untuk dapat memenangkan pemilihan legislatif 2009 ini”.

Menurut A, Strategi politik dalam memenangkan pemilihan legislatif dapat dilakukan melalui berbagai cara. Penerapan Strategi politik berkorelasi positif dengan kepemilikan ruang strategis dari caleg itu sendiri. Kepemilikan Massa, Pengaruh di masyarakat (kekuasaan), Finansial (keuangan yang cukup), dan juga kedekatan emosional si caleg dengan birokrat setempat. Dengan demikian, penguasaan jaringan menjadi potensi yang luar biasa guna memenangkan pemilihan legislatif 2009.

A menuturkan, di Partai PDIP pelaksanaan strategi secara teknis (dilapangan) sepenuhnya diserahkan kepada caleg itu sendiri. A mengatakan itulah fungsi dari kaderisasi sebagai upaya memberikan pendewasaan politik kepada para kader-

kader partai. Partai PDIP hanya mengarahkan sesuatu yang bersifat umum kepada para calegnya. Dalam proses pemilihan, partai hanya memberikan pengarahan berupa gambaran tentang tipologi atau rasionalitas pemilih, jumlah suara tetap (rill) partai, ataupun tingkat penerimaan masyarakat terhadap PDIP.

Partai tidak akan mengintervensi calegnya untuk menggunakan strategi manapun, semua diserahkan kepada setiap individu caleg itu sendiri. Partai tidak akan ikut campur terhadap teknis lapangan. PDIP khawatir, keterlibatan partai dalam ranah politik kadernya justru menjadikan mereka tidak produktif. Selain itu, PDIP ingin memberikan keleluasaan bagi kader dalam mengekspresikan kemampuannya, salah satunya mempengaruhi massa.

Akan tetapi, A mencontohkan dua strategi yang bisa digunakan oleh caleg. A menggambarkan strategi terkait kepemilikan pengaruh atau kekuasaan di masyarakat. Pertama, menggunakan kekuasaan yang dimiliki kerabat atau keluarga besar. Apabila didalam keluarga besar caleg, terdapat orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat (kekuasaan), tentu sangat bermanfaat guna meningkatkan perolehan suara.

Misalnya, Penguasa tersebut si X. Si X dapat meminta orang-orang yang berada di dalam sistemnya untuk mendukung pencalonan si caleg tersebut. Dengan sedikit otoriter melalui komunikasi yang baik, orang-orang yang berada dalam sistem tentu akan mengikuti permintaan si X (penguasa). Mau tidak mau, suka tidak suka, orang dalam sistem akan mengikuti permintaan penguasa karena hal itu berpengaruh terhadap perjuangan karier sistem. Hal inilah yang dimanfaatkan caleg guna memenangkan pemilihan legislatif 2009.

Kedua, bekerjasama dengan para pemilik kekuasaan, terutama pejabat setempat. Caleg berupaya melakukan komunikasi politik dengan beberapa penguasa setempat. Komunikasi tersebut berkaitan dengan metode untuk meningkatkan perolehan suara caleg.

Contohnya, Caleg menjanjikan akan membelikan kendaraan bermotor kepada penguasa apabila dia mampu mengumpulkan sekian ribu suara di daerahnya. Sebagai tanda sepakat, caleg akan membelikan kendaraan bermotor dengan cara kredit. Apabila caleg menjadi anggota legislatif, kendaraan tersebut akan dilunasinya. Namun, apabila caleg tidak menjadi anggota legislatif (suara tidak mencapai target), pemilik kekuasaanlah yang berkewajiban melunasi kendaraan tersebut. Penjaringan suara di masyarakat tentu akan diserahkan kepada para penguasa di daerah tersebut. Caleg akan membantu dalam mempersiapkan atribut-atribut kampanye guna menjaga suara agar tetap stabil. (Wawancara dengan Sunarto., B.SE tanggal 09 Desember 2009, Pukul 10.00-12.00 wib).

b. Informan II

Farida Ariani (Kode B) adalah seorang aktivis perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui partai PDIP. B aktif di Partai PDIP memang masih cukup muda, baru 2th. Akan tetapi, atas kerja keras, keaktifan serta loyalitasnya, kini dia menduduki jabatan sebagai Wakil Sekertaris di Partai PDIP untuk tingkat Kecamatan Natar (PAC).

Alasan keterlibatnya berpolitik didasari atas keinginannya memberikan sentuhan perubahan bagi masyarakat, terutama di Kecamatan Natar. B menganggap hingga hari ini masyarakat di daerahnya kurang mendapat perhatian lebih dari

pemerintah. Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat di daerah sekitarnya. “Atas niat yang suci dan luhur saya mencoba memberanikan diri maju sebagai caleg. Dengan harapan mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat saya”. Ungkap B saat wawancara.

Apabila B menjadi anggota DPRD Lampung Selatan, perwakilan Kecamatan Natar, masyarakat berharap ini menjadi satu langkah nyata demi mewujudkan kesetaraan pembangunan bagi masyarakat. Pembangunan yang adil dan merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Demi mewujudkan hal tersebut pencalonannya yang pertama ini, B memfokuskan perhatiannya di sektor pendidikan. B berharap 1-2 tahun kepengurusannya akan terjadi kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, pangkat, dan golongan.

B mengakui selama aktif berpolitik di Partai PDIP tidak ada perbedaan perlakuan (sikap) antara kader laki-laki terhadap kader perempuan. Para kader diperlakukan dan memperlakukan kader lain secara baik sesuai porsinya masing-masing. Begitu pula respon masyarakat terhadapnya terasa sangat luar biasa. B menuturkan bahwa keberadaan perempuan sebagai calon legislatif ternyata mendapat perhatian dan dukungan yang signifikan. Dukungan warga dapat terlihat dari antusias mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh caleg perempuan.

Strategi politik yang digunakan untuk memenangkan pemilihan legislatif terlihat begitu memperhatikan keberadaan perempuan. B mengungkapkan orang-orang yang menjadi pendukung (tim sukses) dalam pencalonannya sebagian berasal dari

para ibu-ibu. Hal itu diungkapkannya ketika muncul pertanyaan. “Siapa saja Tim Pemenangan (Tim Sukses) ibu?”. “Ya, ibu-ibu, terutama yang ada di setiap dusun serta beberapa warga sekitar. Tapi ada juga yang laki-laki”. Ungkap B saat wawancara.

Selain menggunakan kaum perempuan sebagai Tim Pemenangan utamanya. B juga menggunakan berbagai atribut kampanye seperti yang digunakan oleh kebanyakan calon legislatif lainnya. Perlengkapan tersebut digunakan untuk menarik simpati masyarakat desa agar memilihnya. Tindakan tersebut juga dilakukan sebagai upaya mempertahankan suara politiknya sehingga tetap stabil.

Atribut kampanye politik diperolehnya melalui bantuan partai maupun dana pribadinya. Atribut dari partai biasanya terbatas karena harus berbagi dengan caleg lainnya. Untuk menambah atribut sesuai kebutuhan kampanye, B harus mengeluarkan dana pribadi. Atribut yang disiapkan partai biasanya berupa Bendera dan kaos partai.

Atribut-atribut yang diperolehnya dari dana pribadi, digunakan untuk pembelian menambah bendera dan kaos partai, stiker, baliho, banner dan spanduk bergambarkan dirinya beserta partai politik pengusung (PDIP). Selain itu, B juga membuat kartu nama untuk mempermudah masyarakat mengingatnya sebagai calon legislatif.

Moment-moment pertemuan besar dan kecil dimanfaatkannya dengan baik, sebagai upaya mensosialisasi dan mengkampanyekan diri. Jaringan sosial yang telah dijaga dengan baik semakin dikembangkan olehnya melalui berbagai proses

sosialisasi. Halal-bihalal, yasinan, tahlilan, moment pernikahan menjadi ruang positif untuk berdiskusi dan mengkampanyekan diri.

Selain itu, B juga memberikan bantuan kepada warga baik yang bersifat keagamaan, rumah tangga dan bakti sosial. Setiap berkunjung kerumah warga, mereka selalu meminta sesuatu kepada setiap caleg, sebagai buah tangan. Apabila memiliki rezeki yang cukup B terkadang memberikan bantuan kepada warga.

Strategi lain yang digunakan B adalah dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap suaminya. Suami B bernama Herry Putra adalah Kepala Desa (Lurah) di Desa Negara Ratu. Sebelumnya, ayah Herry Putra adalah mantan Kepala Desa. Di pemilihan berikutnya Herry Putra mencalonkan diri dan terpilih sebagai Kepala Desa. Periode ini adalah masa ketiga keluarga Herry Putra menjabat Kepala Desa.

Jabatan struktural penting yang dimiliki suami B ternyata cukup berpengaruh secara signifikan terhadap pencalonannya. Kepercayaan masyarakat Desa Negara Ratu terhadap keluarganya berbuah perolehan suara terbanyak dari Partai PDIP. B mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung meminta aparat desa untuk mengajak warga memilihnya. Intensitas pertemuan, kedekatan emosional, dan kepercayaan masyarakatlah yang membuatnya terpilih. Berikut hasil petikan wawancara dengan B.

Peneliti : “Suami ibu kan lurah, pernahkah ibu meminta suami dan aparat desa untuk menajak warga memilih ibu?”

B : “Tidak, kerena Biasanya kalau orang sudah suka dengan yang lain apapun akan dilakukannya. Sama kasusnya seperti saya (bukan bermaksud sombong). Keluarga suami saya sudah tiga periode memimpin desa, artinya masyarakat percaya akan kinerja keluarga saya. Bukan tidak mungkin mereka juga akan membantu saya dalam pencalonan ini. Dengan harapan desa tempat tinggal mereka akan jauh lebih baik”.

B mengungkapkan dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif tidak ada permasalahan yang berdampak serius. Secara umum tentu terdapat masalah, apalagi dalam suasana politik guna memperoleh suara terbanyak dari masyarakat. Masalah tersebut masih berskala kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencalonannya. Masyarakat merespon kehadirannya sebagai caleg dengan sangat baik dan antusias.

Kendala terbesar justru muncul dari keluarga besarnya sendiri. Hal itu disebabkan oleh salah satu keluarganya ada yang juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Dapil 6 Kecamatan Natar melalui partai lain. Namun, masalah tersebut mampu diatasinya dengan baik. Mengantarkannya sebagai satu-satunya orang yang duduk sebagai anggota Legislatif dari partai moncong putih (PDIP).

c. Informan III

Informan III adalah Istiah, 54 Tahun (Kode C). C adalah seorang pedagang kecil yang biasa berjualan pecel dan gorengan bagi warga sekitar. Aktivitas kesehariannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga sekitar mempermudahnya mendapatkan berbagai informasi dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Rumah keluarga C cukup dekat dengan salah satu calon anggota DPRD Lampung Selatan (Kode B) yang berdomisili di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar. Tempat tinggal yang cukup dekat ini menyebabkan C dapat mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan B dalam mengembangkan berbagai strategi politik. Selain itu, warungnya menjadi tempat berbincang para warga sekitar dalam mendiskusikan pemilihan legislatif.

Menurut C keluarga B dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, peduli dan dekat dengan rakyat. Terutama suaminya yang kini masih menjabat sebagai Kepala Desa di Negara Ratu. C menambahkan bahwa keluarga B sangat terbuka dan tidak pernah membedakan berbagai golongan masyarakat. Mereka melayani dengan ramah setiap tamunya, meski terkadang hingga larut malam.

Kedekatan keluarga B dengan masyarakat terlihat dari keinginan masyarakat mendudukkan B sebagai anggota legislatif. C menuturkan bahwa Kepala Dusun (RW), RT, tokoh masyarakat dan warga di Desa Negara Ratu aktif membantu pencalonan B secara sukarela.

C mengakui bahwa rumahnya pernah digunakan oleh B untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Tujuannya selain bersilaturahmi yaitu untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan dirinya sebagai caleg dari partai PDIP. Selain itu, C pernah melihat keluarga B memasang atribut kampanye dilingkungan desanya seperti, spanduk, baliho, stiker. C tidak pernah melihat B membagikan kaos ataupun bendera partai. Akan tetapi, C pernah melihat B membagikan perlengkapan salat kepada masjid di sekitar tempat tinggalnya.

d. Informan IV

Informan IV bernama Kausar Chospan S.Psi (Kode D). D adalah koordinator dan pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Kecamatan Natar. D mendapat wewenang langsung dari Pak Wiranto untuk membesarkan Partai Hanura di Kecamatan Natar. Kini D menjabat sebagai Wakil Ketua di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lampung Selatan

Sebelum masuk ke Partai Hanura, D adalah Dosen di Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung dan aktivis PAN (Partai Amanat Nasional). Sejak tahun 1998 sampai 2008, dia mencurahkan pemikirannya guna mengembangkan partai berlambang matahari tersebut. Keaktifan dan loyalitasnya terhadap PAN telah membawanya merasakan hangat kursi DPRD Lampung Selatan Periode 2005-2009. Akan tetapi, konflik internal yang terjadi dalam tubuh PAN memaksanya keluar dari partai tersebut. D akhirnya di PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh pengurus PAN setelah menjabat selama 2 tahun.

Keluar dari PAN, D sempat ditawari berbagai partai politik. D diminta untuk memajukan partai-partai tersebut di Kecamatan Natar. Partai politik tersebut diantaranya, PKNU (Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Golkar (Partai Golongan Karya) dan Demokrat, termasuk Partai Hati Nurani Rakyat.

Melalui pertimbangan yang matang, D akhirnya memilih Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai perahu politiknya, menempati posisi sebagai wakil ketua untuk tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lampung Selatan. Partai inilah yang akhirnya membawanya memperoleh kursi legislatif dari Dapil 6 Kecamatan Natar, Lampung Selatan untuk Periode 2009-2014.

D mengungkapkan sebagai partai baru, Hanura masih agak sulit mencari kader perempuan. Hanura baru mampu memberikan keterwakilan 30% perempuan pada tingkat Provinsi (DPD). Sedangkan untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, partai ini belum mampu memenuhinya. Salah satu sebabnya karena partai ini menggunakan seleksi calon pengurus yang cukup ketat. Kriteria calon pengurus partai dilihat melalui keinginan (niat yang tulus) untuk memajukan partai dan Kemampuan (kualitas) dari seorang calon kader tersebut. Hingga kini Hanura masih terus mencari perempuan yang cocok untuk menjadi pengurus partai.

Sebagai Koordinator di Kecamatan Natar, D diberikan kesempatan menduduki nomor urut 1 (satu) dalam pencalonan legislatif di Dapil 6 Kecamatan Natar. D diberikan kekuasaan dan wewenang yang besar dalam menseleksi para calon

pengurus dan anggota Legislatif dari partainya. Dalam dunia politik, kesempatan ini menjadi salah satu strategi yang cukup strategis. Dengan Demikian, D dapat meningkatkan perolehan suara melalui sistem yang dimonopoli olehnya.

Struktur pengurus di tingkat Kecamatan (PAC) dan Desa (Ranting), hingga calon legislatif (Caleg) di Dapil 6, Kecamatan Natar, termasuk tim pemenangan (kampanye politik) sepenuhnya diatur olehnya. Orang-orang tersebut diperolehnya melalui kedekatan emosional terhadap masyarakat, jaringan sosial dan para pendukung setianya yang mengikutinya sejak berada di PAN.

Meskipun demikian, bukan berarti ruang gerak dari pengurus dan caleg dikendalikan olehnya. D hanya mencari orang untuk menempati tempat-tempat strategis yang mampu meningkatkan perolehan suara. Tidak ikut campur dalam menentukan strategi politik caleg lainnya. Setiap caleg tetap bebas menggunakan dan mengembangkan strategi politik untuk bersaing secara politis.

Selain melalui pembentukan struktur politik, D juga menggunakan strategi lama dalam berkampanye. Strategi tersebut seperti pengenalan diri, menghadiri forum-forum diskusi, pengajian, memasang spanduk, banner, stiker, kartu nama hingga bagi-bagi kaos dan bendera partai. Semua dilakukannya semata untuk meningkatkan perolehan suaranya.

D sempat menceritakan pengalamannya dalam forum diskusi bersama masyarakat. D menceritakan bahwa masyarakat di Desa Muara Putih, Dusun Cisarua pernah memintanya memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid secara langsung saat D berkunjung ke dusun tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan D.

Peneliti : “Saat berkampanye, pernahkan ibu di minta oleh masyarakat memberikan sesuatu untuk kemajuan daerah mereka?”

D : “Ya, Pernah. Tapi tidak saya penuhi.

Peneliti : “Mengapa tidak dipenuhi bu?”

D : “Saya mengatakan seperti ini kepada warga. Ibu, bapak, saya ingin bertanya kepada ibu bapak semuanya, tahu kan bahwa jumlah caleg di dapil 6 Kecamatan Natar ini ada sekitar 144 orang. Apabila yang masuk ke dusun ini ada 10 orang saja, semuanya memberikan sumbangan ke dusun ini siapa yang akan bapak ibu pilih?”. “Ya, yang ngasih sumbangan paling banyak.” Jawab salah satu warga.

“Bapak ibu, memberikan sumbangan tidak bisa dibatasi saat-saat politis seperti ini. Agama jangan dibawa dalam ranah politik. Masjid adalah tempat beribadah bukan tempat berkampanye. Saya akan memberikan bantuan untuk dusun ini dan itu akan dilakukan secara kontinu hingga terjadi perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Tidak untuk saat-saat seperti ini saja, jika bapak/ibu berkehendak tolong bantu saya untuk mewujudkan semuanya”.

Pendekatan psikologis yang dilakukan oleh D ternyata berdampak positif terhadap pandangan masyarakat di dusun tersebut. Meskipun tidak 100% warga Dusun Cisarua memilihnya, tetapi perolehan suaranya di dusun tersebut terbilang stabil. warga Desa Merak Batin, terutama Dusun Cisarua kini tinggal menunggu realisasi dari janji yang telah ditawarkan oleh D kepada mereka.

e. Informan V

Informan V bernama Intip Herlintari (Kode E) berusia sekitar 30 tahun. E banyak bercerita tentang pengalamannya sebagai caleg dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). E merupakan seorang perempuan yang aktif berorganisasi. Sejak tahun 1995 dia menjadi pengurus Dekanas (Dewan Kerajinan Nasional) di Tingkat Provinsi Bidang Pemasaran.

Selama menjadi pengurus Dekanas, E merasa bahwa tidak ada perkembangan yang berarti bagi para Pengrajin dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah kurang memperhatikan keberadaannya sebagai bagian terpenting dari penopang perekonomian negara. Tujuan utamanya menjadi anggota legislatif adalah untuk menyuarakan aspirasi Pengrajin dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sebagai upaya mewujudkan perekonomian negara yang dinamis, kokoh dan tidak mudah diterpa krisis.

E menuturkan mulanya di tidak pernah aktif berpolitik. Keberadaannya pertama kali di panggung politik hanya sekedar melengkapi keterwakilan perempuan 30%. Salah satu prasyarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. E ditawarkan oleh pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk menjadi Bendahara Umum sekaligus menjadi salah satu calon anggota legislatifnya.

E tidak pernah merasa kesulitan dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mulai dari pendaftaran, penjaringan hingga penetapan calon telah diurus oleh partai politik pengusungnya. Kedekatan emosionalnya dengan partai-partai lain pun tetap terjaga.

Tidak ada argumentasi yang kuat untuk menerima atau menolak PDK sebagai perahu politiknya. Meski akhirnya setelah E ditetapkan sebagai calon legislatif banyak partai yang menawarkan diri menjadi perahu politiknya seperti, Golkar dan PPP. Menurutnya waktu itu partai politik manapun tidak menjadi masalah. Dalam pemilu kali ini penetapan anggota legislatif ditentukan dari suara perseorangan bukan nomor urut.

Selama berkampanye E masyarakat menyambutnya dengan sangat baik. Antusias warga terlihat dari penyambutan yang begitu hangat, banyak aspirasi dan dukungan moril yang diberikan kepadanya. Antusiasme tersebut terwujudkan melalui jumlah perolehan suara yang begitu mengangumkan. E mendapatkan suara terbanyak keempat perorangan dari 126 caleg di Dapil 6 Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Selain di Dekanas di juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal itu menyebabkan dirinya terasa begitu dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial telah dilakukannya. Bentuk kepeduliannya pada masyarakat diwujudkan melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, bantuan ke masjid, panti jompo, yatim piatu. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut rutin dilakukannya tiap tahun, jauh sebelum pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Namun, bukan berarti itu semua yang mendasarinya memperoleh suara terbanyak. Satu tahun sebelum pencalonannya (pemilu), E pernah mengadakan pasar murah bertepatan dengan menyambut hari Idul Fitri. Mengadakan pelatihan menjahit secara gratis bagi 250 warga di Kecamatan Natar (22 Desa) yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Meski yang bertahan hingga akhir hanya 200 orang. Hal itu disebabkan oleh alasan-alasan pribadi. Seperti jarak tempuh yang jauh, urusan rumah tangga (RT) terbengkalai, anak menangis dan lain-lain.

E meminta kepada setiap peserta pelatihan untuk mencarikan dukungan bagi dirinya. Mereka diminta untuk mensosialisaikan dirinya kepada para tetangga, saudara, teman-teman. Mereka dibekali sebuah buku catatan yang berisi nama-nama warga yang telah dikunjunginya. Setiap orang diminta untuk mencari

dukungan sebanyak 40 orang. Akan tetapi, itu bukan menjadi titik tekan yang utama. Mereka hanya diminta untuk mensosialisaikan diri E kepada warga di sekitar tempat tinggalnya, berapa pun jumlah yang siap mendukung tidak menjadi masalah.

Selain itu, E juga meminta izin kepada Ketua RT untuk dapat melakukan pembuatan kue di rumah warga. Pembuatan kue dilakukan bekerjasama dengan Perusahaan Rose Brand. Pembuatan kue tersebut dilakukan secara bergilir di 22 Desa di Kecamatan Natar.

E juga memberikan bantuan pada masjid, seperti perlengkapan shalat, pembuatan sumur, pemberian kubah masjid. E juga berencana memberikan baju gamis atau batik kepada warga bahkan tiap tahun akan diganti. Meski baru rencana yang disosialisasikan kepada warga. Sebagian baju batik telah diberikan kepada warga desa.

E menuturkan jumlah tim pemenangan yang membantu pencalonannya berkisar 350 orang. Tiga ratus orang yang melakukan sosialisasi kepada warga dan 50 orang sebagai tim bayangan atau pemantau. Tim pemenangan ini terdiri dari berbagai golongan dari para ulama (ustad) hingga preman turut membantu pencalonannya. Bahkan terdapat tim pemenangan yang dibekali oleh E kendaraan bermotor dan memperoleh gaji bulanan. Hal itu dilakukan agar para tim dapat bekerja secara lebih nyaman tanpa diselimuti rasa khawatir akan nafkah keluarga.

Kendala yang dihadapi selama mencalonkan diri terletak pada lemahnya dukungan partai terhadap pencalonan anggota legislatif. Struktur partai politik dibentuk secara mendadak, tidak ada pembinaan kepada para kader, tidak ada dana kampanye yang jelas (dana kampanye keluar dari kantong pribadi calon), dan perhatian partai terhadap kader masih lemah. Dengan demikian, semua calon legislatif harus berusaha secara mandiri. E menuturkan selama pencalonan telah mengeluarkan dana sekitar Rp. 400.000.000,-.

Saat perhitungan di PPK berlangsung E dan tim pemenangannya merasa terjadi kesalahan yang menyebabkan pengelembungan suara di Tingkat TPS. Suara partai dan suara calon dihitung secara terpisah, sehingga di 1 kertas dihitung 2 suara (suara calon dan suara partai). Pengelembungan tersebut terjadi di Desa Tanjung Sari, TPS 7 dan 8, sebanyak 117 suara ke partai lain (PKB). Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah menyepakati bahwa terjadi pengelembungan suara di dua TPS tersebut.

Ketua di dua TPS tersebut pun telah membuat pernyataan tertulis bermaterai 6000 atas kesalahan perhitungan yang dilakukannya. E meminta kepada PPK untuk melakukan perhitungan ulang di dua TPS tersebut. Namun, perdebatan perebutan kursi DPRD Lampung Selatan tidak mampu berjalan mulus seperti diharapkan. Perhitungan ulang akhirnya tidak bisa dilakukan.

E kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dilakukan perhitungan ulang di dua TPS tersebut. Akan tetapi, saat sidang berlangsung hal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan tersebut

didasari oleh sikap ketua di kedua TPS yang mencabut surat pernyataannya yang sebelumnya telah mereka ajukan. E akhirnya kalah dalam pemilihan, digantikan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kalah dalam pemilihan tidak menyebabkan E kalah dalam bersilaturahmi. Silaturahmi tetap terjaga, baik terhadap pemenang pemilu, tim pemenangnya, dan masyarakat pendukungnya. E mengungkapkan kalah dalam berpolitik itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kalah dalam bersilaturahmi itu baru menjadi permasalahan yang besar.

Di pemilihan berikutnya E masih berharap diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi kembali. Hal itu senada dengan ungapannya, jika pemilu yang akan datang kembali diberikan kesempatan menjadi calon legislatif. E akan lebih selektif dalam memilih partai politik dan mempelajari politik dengan lebih baik.

f. Informan VI

Informan VI bernama Sugiharti., S.E, kode F. Wanita kelahiran 18 Agustus 1971 ini adalah seorang pegawai di salah satu bank terkemuka di Indonesia (BNI). Sebelum di BNI, F pernah bekerja di Perusahaan Asuransi Jiwa Seraya. Disiplin, kerja keras, pantang menyerah serta kerja tuntas merupakan prinsipnya dalam mengemban amanah, dimanapun F berada.

Karier politiknya pertama kali dimulai dari partai Golkar. Namun tidak aktif, bahkan bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap organisasi. Kegiatan-kegiatan kepartaian di Partai Golkar tidak digelutinya secara maksimal. Hal itu juga yang

menyebabkannya tidak begitu mengerti akan mekanisme dan pola pendidikan di partai politik, terutama Golkar.

F menuturkan bahwa D merupakan salah satu pelanggannya di Perusahaan Asuransi Jiwa Seraya. Setelah bertransaksi, D mengatakan bahwa akan pindah partai dari PAN ke Partai Hanura, serta menawarkan F untuk bergabung bersamanya. F memang merupakan salah satu penggemar pak Wiranto. F merasa bangga dengan kedisiplinan dan kerja keras dari seorang Wiranto. Selain itu, F melihat bahwa di Hanura ternyata banyak orang-orang besar yang cinta pendidikan, seperti Yusup Barusman dan Armalia Reni. F pun tertarik dan menerima tawaran dari D untuk bergabung di dalamnya.

F resmi bergabung dengan Hanura tanggal 16 Desember 2007 dan menjabat sebagai Sekertaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura untuk wilayah Kecamatan Natar. F kemudian bersama dengan D, dibantu oleh beberapa wanita dan pemuda mencoba mengembangkan partai hingga ke tingkat Desa (Ranting) dan Dusun (Anak Ranting). Untuk wilayah Kecamatan Natar yang aktif membesarkan partai 70% adalah wanita. Meskipun kader yang kemudian aktif di dalam kepengurusan partai dari tingkat PAC, Ranting dan Anak Ranting masih di dominasi oleh laki-laki. Ranting yang terbentuk sebanyak 22 dan 36 Anak Ranting. Kader aktif partai Hanura di Kecamatan Natar hingga hari ini berjumlah 987 orang.

Dalam upaya menjaga netralisir dan independensi partai, pendaftaran dan seleksi atau Verifikasi calon anggota Legislatif dilakukan oleh Tim Tujuh yang berjumlah 7 orang. Tim tujuh merupakan kader-kader internal Partai Hanura yang direkrut

dari Kabupaten. Tim tujuh bertugas untuk menseleksi layak atau tidaknya seorang kader untuk menjadi calon anggota legislatif dari daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Titik tekan utama tim tujuh dalam menseleksi calon anggota legislatif terletak pada loyalitas dan militansi kader terhadap Partai Hanura. Hasil seleksi menetapkan bahwa F menjadi salah satu kandidat anggota legislatif dengan nomor urut 2 (dua).

F menuturkan bahwa ia tidak memiliki tim kampanye khusus. Metode yang dilakukannya adalah dengan memanfaatkan kader-kader dari ranting dan anak ranting yang telah terbentuk. F menuturkan bahwa sikap politik itu diambilnya atas dua alasan utama.

Pertama, F tidak begitu berambisi untuk dapat duduk sebagai anggota legislatif. F hanya berupaya untuk membesarkan partai, terserah siapa saja yang nantinya akan duduk sebagai anggota dewan dari partai tersebut. Semenjak ketua PAC tidak aktif, F merangkap jabatan sebagai ketua sekaligus sekretaris PAC. Kesuksesan dan kejayaan Partai Hanura di Kecamatan Natar menjadi tanggung jawabnya, sehingga strategi-strategi politiknya pun mengarah pada pembesaran partai.

Kedua, Pengurus tingkat Ranting dan Anak Ranting 70-80% adalah orang-orang yang di bentuk oleh F, secara tidak langsung para pengurus tersebut akan cenderung lebih dekat dengan F dibandingkan caleg-caleg lainnya. F menuturkan alasan lainnya adalah F tidak memiliki begitu banyak modal (financial) jika harus membentuk tim kampanye lagi, karena semakin banyak orang maka biaya yang dikeluarkan juga menjadi meningkat.

Untuk menekan pembiayaan kampanye F melakukan berbagai metode yaitu bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Untuk mensosialisasikan diri dalam bentuk gambar F bekerja sama dengan rekannya yang memiliki percetakan. F menuturkan media sosialisasi seperti kartu nama, poster, banner, kalender, pamflet, liflet semua dimiliki dan didapatkannya secara cuma-cuma (gratis).

Biaya pencetakan digantinya dengan mencarikan orang lain yang ingin membuat barang yang sama/sejenis. Misalnya, F membutuhkan kartu nama 5000 buah, untuk mendapatkannya secara gratis maka F diminta untuk mencarikan orang yang ingin membuat kartu nama sebanyak 2500 buah. Apabila F membutuhkan banner 5 buah, F diminta mencarikan orang yang ingin membuat banner sebanyak 50 buah. Begitu pula yang lainnya. Dengan demikian, angka pembiayaan partai dapat ditekannya hingga 50-100%. “Kalau dihitung-hitung atau tidak gratis, hutang saya dengan Pak Darwis (pemilik percetakan) ada sekitar 50juta lebih”, tutur F saat wawancara.

Kampanye atau bersosialisasi dengan warga F bekerjasama dengan caleg provinsi (DPRD Provinsi) dan caleg RI (DPR RI). F mengatakan bahwa masyarakat kini sudah pintar berpolitik dan semakin pintar memanfaatkan keadaan/kesempatan serta sangat pragmatis. Apabila tidak berhati-hati dan cerdas akan menjadi korban kepintaran masyarakat. Untuk itu, ketika berkampanye, F membagi peran dengan caleg-caleg yang lainnya. F khusus bagian konsumsi, caleg provinsi bagian pembagian kaos/bendera dan caleg RI bagian pemenuhan permintaan warga (cendramata).

F menuturkan 22 desa yang dikunjunginya, semua desa meminta cenderamata. Permintaan tersebut dicetuskan oleh warga dalam berbagai kegiatan seperti, pemuda desa ingin mengadakan perlombaan, pembangunan atau renovasi tempat ibadah, bahkan ada desa/dusun yang meminta uang tunai, diberikan sebelum perhitungan suara (serangan fajar). Akan tetapi, hal tersebut tidak dipenuhi oleh para caleg. Setiap berkunjung, caleg harus mengeluarkan uang antara Rp. 500.000 – 1.000.000,-per desa.

F tidak pernah membagi-bagikan uang kepada warga, bagian itu diserahkan kepada caleg lainnya. Disamping itu, F juga tidak memiliki cukup banyak uang untuk di bagi-bagikan. Metode lain yang diterapkan oleh F dalam meraih, mempertahankan dan merebut atau merubah pilihan warga agar memilihnya adalah dengan melakukan pendekatan emosional. “tidak bisa lewat depan, saya lewat belakang” tutur F saat wawancara.

Tindakan tersebut diaplikasikan dalam bentuk datang ketika ada yang meninggal (turut belasungkawa terhadap meninggalnya seorang warga), pernikahan, membantu kesulitan warga, membantu pencairan proposal kegiatan dan lainnya. Selain itu, tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat pun harus mampu dirangkul dengan baik. Apabila para tokoh-tokoh tersebut telah dirangkul oleh caleg lainnya. Metode yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendekatan emosional (psikologi) warga dengan F. Selama berkampanye F hanya mengeluarkan dana Rp. 50.000.000,-

Tertib administrasi yang dilakukan Partai Hanura guna mengkampanyekan para calegnya terasa sangat membantu F dalam membangun pendekatan emosional dengan warga. Izin kecamatan, kepala desa, kepolisian dan tokoh masyarakat dilakukan dengan baik. Proses ini menjadikan F dikenal oleh berbagai tokoh masyarakat setempat. Secara umum tokoh masyarakat mengenal F dengan baik, hingga massa pencalegan selesai pun hubungan interaksi antar mereka tetap terjaga dengan baik.

F mengakui, kekurangannya dalam memahami politik menjadi salah satu penyebab kekalahannya. F tidak memiliki saksi pribadi yang mengawal suaranya secara maksimal. F hanya menggunakan saksi dari Partai. Saat perhitungan di TPS, saksi partai yang melakukan pengawalan suara sudah pulang sebelum perhitungan selesai. Perhitungan suara di TPS selesai pukul 02.00 wib (malam), sedangkan pukul 19.00 wib saksi utusannya sudah tidak di tempat. Dengan demikian, perhitungan suara riil yang terjadi di TPS tidak diketahui olehnya.

Lembar C1 sebagai lembar control/perhitungan suara tidak akan sah apabila tidak di bubuhi tanda tangan ketua TPS. Ketua TPS tidak bersedia, selalu menghindar atau tidak berada di tempat ketika para saksinya ingin meminta tanda tangan. Menurut F pengawalan suara harus dilakukan mulai dari perhitungan di tingkat TPS, PPS, PPK dan Kabupaten. Apabila tidak dilakukan pengawalan, potensi hilangnya suara sangat besar.

Pada awalnya suara F masih cukup tinggi, bahkan tertinggi dari 9 orang caleg separtainya, mengalahkan jumlah suara D (caleg no urut 1). Perpindahan sistem perhitungan dari manual ke komputer, menjadi salah satu penyebab

berkurang/menghilangnya sebagian suaranya. F menuturkan dalam perhitungan suara secara manual, jumlah suaranya mencapai 1400 suara. D hanya memperoleh suara sekitar 600-700 suara.

Setelah dilakukan perhitungan ulang menggunakan sistem komputerisasi, suara F berubah menjadi 896 suara. Terdapat 504 suaranya yang hilang. Sedangkan jumlah suara D berubah menjadi 911 suara. Sebagai contoh F mengungkapkan, di Kampung Cina, F memperoleh 27 suara, Sidorejo 7 suara, Rejosari 9 suara dan Muhajirun 11 suara. Semua suara tersebut hilang, hanya Kampung Cina yang disisakan 1 suara.

Berikut ini adalah petikan wawancara antara peneliti dengan informan F.

Peneliti : “ Apakah Ibu tidak melakukan penuntutan terhadap hilangnya suara ibu?”

F : “Tadinya mau seperti itu dek. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, hal itu akan sia-sia. Karena setiap lembar C1 harus mendapatkan tanda tangan ketua TPS, apabila tidak ada tanda tangan ketua TPS hal itu tidak sah. Sedangkan para saksi kita yang mencoba mendapatkan tanda tangan ketua TPS terasa terus dipersulit. Apabila saya teruskan ke MK, itu akan percuma, sama saja kita menuntut tanpa dasar. Seperti yang dilakukan oleh informan E. E kan akhirnya tidak berhasil. Saya akan mengalami nasib yang sama apabila melakukan penuntutan tanpa dasar yang kuat, secara legal formal (tanda tangan pihak-pihak terkait).”

F menuturkan bahwa tidak terpilih menjadi anggota dewan tidak menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam. F tidak begitu berambisi untuk menjadi anggota legislatif. Selain itu, F telah melakukan perjanjian dengan seluruh caleg Partai Hanura yang ada di dapil 6 Kecamatan Natar. Perjanjian dilakukan di DPC Partai Hanura yang isinya bahwa seluruh pembiayaan caleg mulai dari pendaftaran hingga perhitungan suara akan diganti oleh caleg terpilih, perjanjian

bermaterai 6000. Batas pengembalian diberikan waktu selama 1 tahun, artinya apabila hingga batas waktu 1 tahun, D (caleg terpilih) tidak mengembalikan pembiayaan yang telah dilakukan oleh caleg lainnya, proses selanjutnya akan dilakukan secepatnya. F menyerahkan segalanya pada kebijakan partai HANURA.

g. Informan VII

Informan VII bernama Sumiyati berusia 41 tahun (Kode G). G menceritakan bahwa pada mulanya G tidak pernah bermimpi terlibat dalam partai politik, apalagi menjadi caleg. Keterlibatannya dalam politik karena diajak oleh informan D. D selalu mengajaknya dalam setiap kegiatan kepartaian, kunjungan ataupun sosialisasi, proses ini yang kemudian membawa G bergabung menjadi salah satu anggota Partai Hanura tahun 2007 silam. G menjabat sebagai Wakil Sekretaris PAC Partai Hanura untuk Kecamatan Natar.

Tujuan G mencalonkan diri sebagai caleg adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terutama kaum perempuan. G memandang bahwa kaum perempuan selalu ditindas dan disepelekan. Tidak ada posisi tawar yang jelas bagi para kaum perempuan. G merasa pemerintah dan masyarakat masih memandang lemah perempuan, kehadirannya sebagai caleg diharapkan dapat menjadi media perubahan bagi kaum perempuan itu sendiri.

Ketika mendaftarkan diri sebagai caleg G menuturkan bahwa proses penjaringan, seleksi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh tim independen yang diberi nama tim tujuh. Tim tujuh merupakan Pengurus DPC Partai Hanura dari Kabupaten Lampung Selatan

yang netral dan dijamin keindependensiannya. Tim tujuh yang memutuskan layak atau tidaknya seorang kader menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihannya (dapilnya) masing-masing. Selain kelengkapan berkas pendaftaran, ketentuan layak tidaknya menjadi caleg terlihat dari tingkat loyalitas kader terhadap partai.

Selama G aktif di Partai Hanura pengurus memperlakukan antar anggota dengan baik. Tidak ada kesenjangan yang terjadi antara pengurus dengan para anggota. Perbedaan latar belakang bukan menjadi suatu permasalahan yang menghambat pergerakan kader untuk terus maju dan berkembang. Dengan demikian, hubungan interaksi yang terbangun antara anggota dengan pengurus dapat terbina dengan baik.

G mengatakan bahwa di Partai Hanura pendidikan politik bagi setiap anggota terbina dan terlaksana dengan baik. Pendidikan politik tersebut diterapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kepartaian. Partai Hanura setiap bulan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) membahas kinerja serta mengevaluasi kegiatan kepartaian yang telah terlaksana, demi kemajuan partai di masa depan. Kader-kader perempuan diminta menjadi pembawa acara secara bergantian, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk belajar berbicara dan tampil di muka umum.

Begitu pula di masyarakat, ketika mengetahui G mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat anggota legislatif di tingkat Kabupaten dari dapil VI Kecamatan Natar, warga menyambutnya dengan baik. Dukungan masyarakat dalam menyokong G untuk menjadi anggota legislatif, terpatritasi dalam antusiasisme warga

membantu pencalonannya. Respon masyarakat setiap G turun berkampanye selalu di sambut dengan hangat.

G menuturkan bahwa keberadaannya dalam pencalonan anggota legislatif hanya sebuah ajang penunjukkan eksistensi diri. G tidak begitu berharap bahwa dirinya harus menjadi anggota legislatif, menjadi caleg saja sudah cukup membuatnya merasa bangga dan bahagia. Tingkat keseriusannya tampil dalam panggung politik ini berkorelasi dengan strategi politik yang digunakannya.

Strategi politik yang digunakan G di antaranya seperti pertama, sosialisasi dari rumah ke rumah (door to door). Metode ini diterapkannya untuk mengkampanyekan diri kepada sanak famili dan teman dekatnya. G mengungkapkan tujuannya ke rumah sanak famili selain bersilaturahmi dan mengkampanyekan diri, sekaligus meminta mereka menjadi tim sukses, terutama untuk desa atau dusunnya masing-masing.

G sama dengan F, mereka tidak memiliki tim sukses khusus yang membantu pencalonannya sebagai anggota legislatif. Tim sukses G di ambil dari sanak famili dan teman dekatnya yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Natar. G menuturkan adanya tim sukses dapat menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sedangkan G tidak memiliki dana yang cukup banyak. Untuk menekan pembiayaan G menggunakan sanak famili dan teman dekatnya guna membantu pencalegannya tersebut.

Kedua, menggunakan organisasi yang diembannya. G merupakan Sekertaris Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mereka rutin mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor). Tingkat Desa rakor diadakan sebulan sekali dan untuk tingkat dusun dilaksanakan dua minggu sekali. Selain itu, setiap bulan dibentuk pengajian rutin yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan pengajian, rakor di tingkat desa dan dusun dimanfaatkannya untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan diri. Di sela-sela sebelum dan setelah rapat atau pengajian G mengungkapkan keinginannya maju dalam pencalonan legislatif 2009 ini kepada seluruh peserta sambil membagi-bagikan stiker dan kartu namanya.

Ketiga, sosialisasi dan kampanye terbuka. Metode ini diterapkan dengan cara mengumpulkan warga dalam satu forum atau tempat, sama seperti yang dilakukan berbagai caleg lainnya. Di dalam forum tersebutlah G menyampaikan keinginannya mencalonkan diri, memperlihatkan alat peraga pemilih (pencontrengan) dan sebagainya. Proses ini sekaligus memperkenalkan langsung calon legislatornya dengan warga (bertatap muka langsung) serta menghindari anggapan dalam masyarakat bahwa mereka membeli kucing dalam karung.

G menuturkan bahwa tidak semua desa dikunjunginya. Desa yang paling sering dikunjunginya adalah Hajimena, Pemanggilan, dan Negara Ratu. Desa lain dikunjungi oleh G hanya sekedarnya saja. G biasanya mengunjungi sanak saudaranya yang ada di berbagai desa terlebih dahulu, bersilaturahmi dan berbincang sedikit tentang pencalonannya.

Ketika berkampanye secara terbuka, G menyayangkan sikap masyarakat yang terlihat begitu pragmatis. Dalam berkampanye warga selalu meminta sedikit buah tangan dari para caleg. Buah tangan tersebut dapat berupa barang materiil maupun non-materiil. G menceritakan sedikit atas pengalamannya berkampanye secara terbuka.

Peneliti : “Pernahkah ibu berkampanye secara terbuka dengan masyarakat?”

G : “Cukup sering dan memang harus memperkenalkan diri dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pun tidak merasa kecewa dengan kandidat pilihannya karena mereka telah bertemu secara langsung”.

Peneliti : “Ibu tentu memiliki hitung-hitungan berapa yang menjadi suara politik ibu dan berapa milik lawan. Bagaimana cara ibu untuk mempertahankan suara politik tersebut agar tidak beralih ke caleg lain dan bagaimana cara untuk mempengaruhi atau merubah suara politik lawan sehingga mengalihkan pilihan politiknya ke ibu?”

G : “Menjaga saja susah. Apalagi mengambil suara politik lawan. Masyarakat Indonesia kini semakin pragmatis. Siapa yang memberi lebih, dialah yang dipilih. Jadi susah, saya contohkan, hari ini saya datang ke Desa Hajimena, mensosialisaikan diri sebagai caleg. Selesai berkampanye warga meminta sesuatu seperti buah tangan.

Besok caleg lain ada yang masuk, mengungkapkan hal yang sama dengan buah tangan yang lebih besar, warga akan memindahkan pilihannya. Apalagi jika seperti saya yang hanya berkampanye tanpa memberikan sesuatu. Ya, gak di anggap oleh warga. Apabila terus di ikuti, maka caleg tersebutlah yang bodoh.”

Peneliti : “Adakah sikap warga yang ibu anggap tidak pantas atau terlalu berlebihan?”

G : “ Ya itu tadi, setiap berkunjung warga selalu meminta buah tangan, mereka memang tidak secara langsung meminta dalam bentuk

uang. Warga biasanya meminta barang seperti, jilbab, perbaikan jalan, pembentukan kegiatan olahraga pemuda desa, bagi-bagi sembako, pasir, batu krikil dan lainnya.

Seperti yang terjadi di desa Hajimena, warga meminta diperbaiki jalan sehingga membutuhkan pasir. Ada oknum desa Hajimena yang menjanjikan membulatkan suara di desanya apabila G sanggup memberikan bantuan. G pun memberikan pasir untuk membantu warga. Namun ternyata, janji membulatkan suara jauh meleset, G hanya mendapatkan 20 suara. G kecewa atas ketidak konsistenan mereka dalam bersikap.”

G mengungkapkan sedikit kekecewaannya terhadap warga dan sistem penggunaan suara terbanyak. Berikut petikan hasil wawancara dengan G. “Penggunaan suara terbanyak memang baik, setiap calon dengan nomor urut berapa pun dapat terpilih sebagai anggota legislatif. Namun hal itu telah meningkatkan sikap pragmatis masyarakat. Masyarakat tidak melihat dari bibit, bebet dan bobot caleg. Masyarakat hanya melihat siapa yang memberi lebih, dialah yang akan dipilih.

G mengungkapkan tentang adanya beberapa orang oknum desa yang secara terang-terangan mengajak kerjasama dalam membangun suara masyarakat. Oknum tersebut menjanjikan suara warga desa mutlak untuk G. G mencontohkan beberapa desa yang menawarkan hal tersebut seperti, Desa Sidosari meminta uang Rp. 50.000/orang. Kerjasama dalam bentuk kontrak politik atau kesepakatan (Memorandum of Understanding, MoU). Sistem yang digunakan adalah dengan serangan fajar. Sebelum warga melakukan pencontrengan/masuk dalam bilik suara, oknum dan kelompoknya akan memberikan amplop kepada warga (beiri uang dan kartu nama G). Mereka akan mencatat nama-nama warga yang telah diberi amplop, sehingga ketika ada penyimpangan suara mudah terbaca oleh si oknum.

Desa Mandah juga menawarkan hal yang sama, meski dengan sistem yang agak berbeda. Perorang hanya dikenakan Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,-. Kerjasama dalam bentuk kontrak politik/kesepakatan (MoU). Sistem yang digunakan adalah dengan serangan fajar. Apabila dalam di desa tersebut tidak bulat memilih G, uang akan dikembalikan. Dengan demikian, tidak ada yang merasa dirugikan. Namun berbagai tawaran tersebut di tolak oleh G. Terpilihnya G menjadi salah satu kandidat anggota legislatif saja sudah membuatnya merasa puas, senang bahagia dan bangga.

G meyakini dalam pemilihan legislatif 2009 terdapat berbagai permainan yang dilakukan oleh caleg maupun oknum tertentu, salah satunya serangan fajar. Namun, G tidak mengetahui siapa caleg yang melakukan dan di desa mana hal tersebut terjadi. Untuk itu, G berharap masyarakat dapat berfikir jauh ke depan, caleg yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pencalonannya, ketika terpilih sebagai wakil rakyat, sikap politik yang dilakukannya adalah berupaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. Tidak memikirkan bagaimana warga dapat terus maju. Akan tetapi, bagaimana dan dengan cara apa caleg dapat menghabiskan uang rakyat.

G menurkan suara politik secara perorangan yang telah dikumpulkannya berjumlah 250 suara. Namun, G tidak mengetahui apakah ada suara politiknya yang hilang. Sembilan (9) Caleg Hanura yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan hanya diwajibkan untuk mengawal (memberikan saksi) di 2 desa. G bertugas mengawal (memberikan saksi) di Desa Hajimena dan Pemanggilan dan tidak begitu mengetahui perkembangan di desa

lainnya. Setelah perhitungan suara, seluruh C1 diserahkan kepada Koordinator Kabupaten yaitu, informan D. G tidak mengetahui perkembangan selanjutnya. G meyakini bahwa untuk Partai Hanura tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

h. Informan VIII

Informan VIII bernama Halimatus Sakdiah berusia 40 tahun (Kode H). H tinggal di Tanjung Marga, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar Lampung Selatan. Selain sebagai ibu rumah tangga, kegiatan H aktif mengisi pengajian ibu-ibu di berbagai tempat (ustadzah) dan kini H sedang melanjutkan pendidikannya strata satu (S1) di IAIN Radin Intan, Sukarame Bandar Lampung.

H menuturkan bahwa ini adalah pertama kalinya H belajar berpolitik. Selama ini H tidak pernah aktif dalam kegiatan politik, apalagi kepartaian. H mengatakan pada waktu itu beberapa orang dari kelompok pengajiannya yang menjadi pengurus Partai Kedaulatan Nahdatul Ulama (PKNU) berkunjung ke rumah dan menawarkan untuk bergabung. Setelah dipertimbangkan secara matang H resmi bergabung dengan PKNU tahun 2007. Di PKNU informan H diberikan posisi sebagai Bendahara Umum.

Alasan H bergabung dengan PKNU karena partai ini merupakan salah satu gerakan perjuangan masyarakat islam yang berhaluan Nahdaul Ulama. H berharap melalui PKNU perjuangan kebangkitan islam dapat terus terpompa secara aktif. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, pengajian, pembentukan pondok pesantren, dapat terus ditingkatkan.

Untuk menjadi caleg dari PKNU, H tidak merasa kesulitan. Pengurus partai membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para kadernya untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota legislatif 2009. Proses pendaftaran dan penseleksian mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta aturan dari KPU. Selain itu, pengurus PKNU pun ikut membantunya mendaftarkan diri sebagai caleg. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, pengurus yang mencalonkan diri sebagai caleg dari PKNU hanya 3 orang, Ahmad Darwis., S.E, Informan H dan Drs. Sapri.

H mengungkapkan saat berkampanye dirinya tidak pernah mengalami kesulitan, respon masyarakat dalam menilai H sebagai caleg tergolong baik. Keberadaan H dianggap dapat menjadi media untuk menunjukkan eksistensi perempuan. Hal tersebut tergambar dari antusias warga dalam menyambutnya saat berkampanye.

Dalam berkampanye, strategi politik yang digunakan H adalah dengan cara membentuk tim pemenangan, disebar keseluruh dusun yang ada di setiap desa. Satu dusun terdiri dari 4 orang dengan rincian, 1 orang koordinator membawahi 2 orang tim sukses dan 1 orang yang mengawasi kinerjanya tim sukses tersebut, begitu seterusnya. Apabila di jumlahkan 22 Desa di Kecamatan Natar terdapat sekitar 400-500 orang tim sukses.

Metode yang digunakan H adalah para tim sukses diminta untuk mengunjungi rumah-rumah warga (door to door) guna mensosialisasikan dirinya sebagai caleg perempuan. H menekankan kepada para tim suksesnya untuk mengunjungi rumah warga setiap hari. Tim sukses akan memberikan gambaran tentang profil H, tujuannya mencalonkan diri dan apa saja program-program kerjanya jika menjadi

anggota legislatif. Tim sukses akan melaporkan kepada H tentang perkembangan suara politiknya, berapa persentase suara yang mendukungnya dan berapa suara miliki lawan politiknya.

H mengunjungi semua desa yang ada di Kecamatan Natar. H menggunakan sistem pendekatan yang dilakukan secara kontinu, melalui pengajian rutin. Setiap desa H mengunjungi warga minimal tiga kali (3X). Tingkat intensitas pertemuan akan semakin ditingkatkan terhadap desa-desa dimana masyarakatnya dirasa belum mengenal dirinya dengan baik. Desa yang sering dikunjunginya ialah Sukadamai, Bandarejo, Purwosari, Merak batin, dan Negara ratu. Kendala utama yang menyebabkan terhambatnya proses kampanye politik yaitu pertama, medan yang sangat jauh. Kedua, sebagai perempuan, H kurang begitu bebas untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

H menuturkan bahwa mereka tidak pernah dituntut untuk memerikan uang pembesaran partai. Dukungan partai politik terhadap pencalonan kader-kadernya masih begitu minim, hanya dalam bentuk motivasi saja. PKNU merupakan partai kecil sehingga belum memiliki pendanaan yang cukup untuk membantu pembiayaan kampanye para calegnya. Berbagai atribut sebagai media kampanye seperti bendera partai, kaos partai, pamflet, liflet/stiker, banner, kartu nama dan lainnya harus ditanggung oleh caleg masing-masing.

Dalam melakukan kampanye politik, tim sukses H memang pernah bersinggungan dengan tim sukses dari caleg lain. Menurut H sesuai aturan apabila suatu daerah telah dimasuki oleh caleg tertentu maka, caleg lainnya tidak boleh masuk ke daerah tersebut juga. Berikut petikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Peneliti : “Pernahkan Ibu/tim sukses itu bersinggungan dengan caleg/tim sukses caleg lain saat berkampanye?”

H : “Dalam nuansa politis seperti ini persinggungan/konflik pasti ada. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, hanya sebuah pembentukan dinamika politik.”

Peneliti : “Bisa di contohkan bu, persinggungannya seperti apa?”

H : “Sesuai aturan kan apabila suatu daerah telah dimasuki oleh caleg tertentu maka, caleg lainnya tidak boleh masuk ke daerah tersebut juga. Nah, waktu itu ada tim sukses dari caleg lain masuk ke daerah yang telah kita bina. Setelah di beritahu bahwa daerah tersebut telah kita bina, mereka akhirnya mengerti. Alasannya masuk karena mereka tidak tahu kalau daerah tersebut telah di bina.”

Peneliti : “Ibu sendiri pernah masuk ke daerah yang telah dibina oleh caleg lain tidak?”

H : “Kalau saya tidak. Tapi tim sukses saya pernah. Ya, sama karena tidak tahu kalau daerah tersebut telah dibina oleh caleg lain. Tapi itu tidak masalah, semua caleg ingin menjadi yang terbaik. Jadi wajar jika terjadi sedikit konflik, sudah biasa itu.”

Menurut H proses demokrasi dalam pemilihan legislatif 2009 terasa telah tercemarkan oleh sikap dan tindakan yang kurang pantas. Menurut tim suksesnya, saat pemilihan berlangsung terdapat oknum-oknum tertentu yang mengarahkan masyarakat untuk memilih caleg dari partai politik tertentu. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat secara bebas memilih caleg sesuai kehendak hatinya.

Kedua, H mengungkapkan bahwa cara perhitungan suara yang kurang baik menjadi kendala struktural pemilihan legislatif 2009. Peraturan pemerintah mengatakan bahwa perhitungan suara harus diselesaikan dalam waktu satu hari sebagai upaya menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Realita dilapangan membuktikan bahwa hal tersebut menjadi sumber konflik. Perhitungan dimulai pukul 16.00 wib dan selesai terkadang hingga larut malam, ada yang sampai pukul 02.00 wib atau 03.00 wib perhitungan baru selesai. Banyak saksi parpol yang tidak bisa hadir sampai perhitungan selesai. Penyimpangan-penyimpangan saat perhitungan suara tersebut dapat saja terjadi.

H mengatakan bahwa banyak suara politiknya yang hilang. Prediksi awal dengan membaca kinerja dilapangan, laporan perolehan suara dan evaluasi tim sukses, H optimis 5000 suara mampu diraihnya. Dipotong sampling error dan penyimpangan pemilih, H masih tetap optimis 1 (satu) kursi mampu diraihnya. Namun, saat perhitungan dilakukan H merasa ada kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum tertentu. H merasa banyak suara politiknya yang hilang. H hanya mampu meraih 950 suara, jauh dari prediksi, sedangkan di dusunnya saja H mampu meraih suara sekitar 800.

Namun, kasus tersebut tidak diusut olehnya. H berfikir bahwa hal tersebut hanya sia-sia. H tidak ingin memperpanjang masalah. Selain itu, apabila dilihat secara sepintas terpilihnya H sebagai anggota dewan terasa sudah tidak memungkinkan. Membutuhkan lebih dari 2000 suara untuk dapat terpilih, sedangkan seluruh tim sukses yang ada sudah merasa pesimis.

H berharap untuk pemilihan legislatif 5 tahun mendatang perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen guna melakukan pengamanan atau penyelamatan suara. Pengamanan atau penyelamatan harus dilakukan ketika kotak suara di TPS hingga di KPU. Dengan demikian, suara masyarakat yang telah mendukung caleg tertentu tidak mengalami perubahan. Untuk itu, para petugas diharapkan dapat bekerja secara lebih profesional dan konsisten.

B. Analisis Penelitian

1. Caleg Perempuan Sebagai Pemersatu Kaum Perempuan (Feminis)

Jumlah perempuan yang terjun dalam ranah publik atau politik memang masih sangat minim. Akan tetapi secara aplikasi masyarakat sangat membutuhkan perempuan dalam mengambil kebijakan penting. Kebijakan yang diambil tersebut akan membentuk suatu keseimbangan fungsi dan peran dari berbagai aspek kepentingan-kepentingan yang ada di dalam institusi, terutama kepentingan kaum perempuan. Hal ini senada dengan pernyataan H bahwa pada dasarnya masyarakat senang ketika terdapat perempuan yang terjun berpolitik atau menjadi caleg, karena akan mewakili eksistensi perempuan itu sendiri.

Keterlibatan perempuan di bidang politik akan menjadi penyeimbang pembentukan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut akan memberi ruang positif bagi pemerataan kehidupan masyarakat yang beradab, adil dan makmur tanpa membedakan SARA. Hal ini senada dengan pernyataan Ritzer (2007: 455) berikut ini:

Riset Feminis menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok nondominan lainnya tidak mengalami kehidupan sosial sebagai gerakan diantara peran-peran yang terpisah. Sebaliknya, mereka terlibat dalam menyeimbangkan peran, sebuah penggabungan orientasi dan kepentingan yang berkaitan dengan peran dan melalui penggabungan ini, mereka terlibat dalam mengaitkan institusi-institusi sosial (Ritzer 2007:455).

Lovenduski (2008: 106) mengungkapkan bahwa kaum perempuan dibedakan atas penggunaan dua strategi utama, strategi dari dalam (*internal strategy*) dan strategi dari luar (*external strategy*). Strategi dari dalam (*internal strategy*) berjalan baik ketika gerakan kaum perempuan yang otonom berada di sistem dan aktif (memahami) permasalahannya. Kaum perempuan (feminis) mengambil strategi-strategi institusional, bekerja di dalam partai-partai dan menerima peraturan-peraturan permainan yang ada. Strategi dari luar (*external strategy*) merupakan penerapan strategi yang digunakan untuk meningkatkan perwakilan politik perempuan.

Caleg perempuan dapat memanfaatkan persamaan gendernya guna menarik simpati kaum perempuan itu sendiri, seperti yang dikemukakan informan H. Ketika caleg perempuan mampu melakukan pendekatan persuasif yang baik, maka atas nama persamaan gender, kaum perempuan tentu akan membantu pencalonannya tersebut. Strategi ini dilakukan oleh seluruh caleg perempuan yang menjadi informan.

Dukungan masyarakat atas keberadaan perempuan sebagai bagian terpenting dalam mengambil kebijakan terlihat dari jumlah perolehan suara perempuan. B dan D menjadi kandidat terpilih sebagai anggota legislatif di Kabupaten Lampung Selatan dari Dapil 6 Kecamatan Natar. Mengalahkan rekan-rekan sejawatnya dari

satu partai yang didominasi laki-laki. Informan E, F, G dan H memang tidak terpilih sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, sebagai caleg perempuan suara politik mereka secara perorangan sangat membanggakan. E mampu mengalahkan para caleg laki-laki dan menduduki urutan suara terbanyak ke-4 (empat). Suara politik F hanya berbeda tipis dengan D, suara F 896 dan suara D 911, keduanya terpaud 15 suara. Suara politik G sebanyak 250, cukup besar untuk seorang caleg yang tidak begitu berambisi untuk menjadi anggota legislatif. Sedangkan suara H sebanyak 950, hanya saja suara partai dan suara rekan sejawatnya yang tidak bisa bergerak secara maksimal.

2. Peran Partai Politik Dalam Membantu Pembentukan Dan Penerapan Strategi Politik Caleg Perempuan

Menurut Djuhandar (2005: 72) di negara yang menganut sistem demokrasi partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik
- b. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- c. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
- d. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
- e. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik

Partai politik akan memainkan fungsi dan perannya sedemikian rupa sehingga proses demokrasi dan stabilitas masyarakat dapat berjalan maksimal. Melalui kadernya yang terpilih di lembaga legislatif, partai akan mewujudkan sistem tatanan pemerintahan yang berdaulat. Untuk itu, fungsi partai politik harus dapat

dijalankan dengan baik. Apabila fungsi partai politik tidak berjalan maksimal, maka dapat menyebabkan terjadinya kecacatan dalam proses demokrasi.

Titik awal kemajuan suatu partai politik terletak pada sistem perekrutan politik yang dilakukannya. Sistem perekrutan politik memiliki keragaman yang tiada batas. Meskipun demikian, menurut Djuhandar (2005: 104) terdapat dua cara khusus yang harus dilakukan yaitu, seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan. Kedua cara ini memiliki keragaman dengan implikasi penting bagi perekrutan politik partai. Maju dan berkembangnya suatu partai politik sangat ditentukan oleh sistem rekrutmennya.

Menurut Djuhandar (2005: 104) metode tertua untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian, digunakan di Yunani Kuno. Metode sama yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi berkuasa oleh orang atau kelompok tertentu dengan cara giliran atau rotasi. Metode yang berkembang di Amerika dan Inggris zaman dahulu adalah dengan cara *patronage*. *Patronage* merupakan bagian dari sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit.

Untuk itu, partai politik harus mampu membentuk kebijakan perekrutan politik secara baik. Ketika terjadi penyimpangan dalam rekrutmen, maka kehancuran atau kekalahan dalam moment pemilihan umum sangat rentan terjadi. Pimpinan partai politik harus mampu membentuk dan menganalisa kebijakan partai dengan baik. Peran analisis kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan manfaat optimal untuk publik, bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan (Nugroho. 2004: 85).

Menurut Nugroho (2004: 87) analisis kebijakan dibagi menjadi 2, yaitu analisis Deskriptif (analisis yang hanya memberikan gambaran) dan analisis preskriptif (analisis yang menekankan pada rekomendasi-rekomendasi). Menurutnya analisis yang baik perlu menekankan pada analisis preskriptif, karena hal itu berjangka panjang dan berimplikasi yang luas terhadap keberlangsungan organisasi. Sistem ini pulalah yang perlu disikapi oleh caleg perempuan guna merespon perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat sebagai upaya menjadikannya komoditas politik.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif adalah mereka yang sebelumnya pernah aktif berorganisasi dan menggeluti politik. Tingkat pendidikan dan kematangan berorganisasi berpengaruh terhadap pemahaman caleg perempuan dalam menerapkan strategi politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap pola penyampaian informasi serta tingkat penerimaan masyarakat atas gagasan yang ditawarkan caleg perempuan.

Para perempuan yang mendaftarkan diri sebagai caleg sebagian besar merupakan aktifis partai politik. Informan B merupakan kader militan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Informan D, F, dan G berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Informan E dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan informan H berasal dari Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU).

Hal yang membedakan terletak pada pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik perempuan di dalam partai. Pendidikan politik dan tingkat partisipasi kader perempuan di setiap kegiatan kepartaian akan berpengaruh signifikan terhadap

pemahamannya dalam bidang pengelolaan organisasi. B telah mengeluti politik selama dua tahun, sejak 2007 di PDIP, proses kaderisasi yang dijalankan oleh partainya berjalan efektif. D merupakan kader aktif partai politik, 10 tahun di PAN (1998-2008). Pengetahuan politiknya selama di PAN cukup sebagai modal guna merintis partai Hanura di Lampung, terutama Lampung Selatan. Pemahaman dan keterlibatannya dalam politik menjadikan keduanya mampu membentuk strategi politik dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik.

E dan H dapat dikatakan sebagai salah satu korban ketidakmapanan sistem dalam partai politik. Hasil wawancara terhadap E dan H memperlihatkan hal yang berbeda dibandingkan wawancara dengan B dan D. Kehadiran E dan H dalam struktur partai politik terkesan sekedar melengkapi tuntutan Undang-Undang partai politik dan syarat partai peserta pemilu (keterwakilan 30%).

Ketidakmapanan sistem rekrutmen politik dan lemahnya proses kaderisasi yang dilakukan partai politik, menjadi hambatan utama bagi caleg perempuan. Informan E dan H mengungkapkan keberadaannya dalam partai politik terkesan dipaksakan. Tidak ada pembinaan, pendidikan politik terasa kurang, struktur partai pun dibentuk secara mendadak, ketika terpilih atau ditetapkan sebagai calon legislatif, partai terasa melepaskan diri. Menurut informan H bahwa pembekalan dan pengawalan partai pengusungnya hanya dilakukan dalam bentuk motivasi saja. Partisipasi, pola pembentukan strategi politik dan seluruh biaya kampanye diserahkan pada setiap calon legislatif masing-masing.

Berbeda dengan B dan D, pembinaan dan pendidikan politik yang dilakukan partai berjalan secara efektif. A mengungkapkan para kader perempuan diberikan kesempatan menjadi pembawa acara (MC) maupun memimpin rapat di dalam suatu kegiatan. B sempat memimpin rapat di beberapa kali pertemuan parpol, baik tingkat Kecamatan atau Ranting. Partai Politik tidak pernah membedakan antara kader perempuan dan laki-laki. Kader diperlakukan sama di dalam struktur parpol.

Informan F dan G memang merasakan pendidikan politik yang dilakukan partainya, mereka selalu hadir dan dilibatkan di setiap kegiatan kepartaian. Namun, pengalaman dan kepiawaian mereka dalam berpolitik menjadi penghambat sosiologis guna mengaplikasikan kematangan membentuk strategi politik guna menarik simpati masyarakat. F dan G belum mampu menembus jalan-jalan sempit dalam alur permainan politik. Penghalang tersebut yang kemudian membuat gerak aplikasi strategi terasa kurang maksimal.

Pola pendekatan sosiologis dan psikologis guna membangun citra positif atas pragmatisme masyarakat harus digerakkan oleh caleg perempuan secara maksimal. Ketidakmapuan caleg perempuan dalam menyesuaikan diri terhadap kultur pragmatisme masyarakat dapat menjadi penghambat pembangunan demokrasi yang berimplikasi pada mandulnya strategi politik. Caleg perempuan akan terasa hanya membuang-buang waktu dan tenaga yang dimilikinya saja. Untuk itu, para caleg perempuan perlu diberikan pembekalan dalam membentuk aksioma-aksioma politik guna meningkatkan citra mereka dimata publik. Menurut Abdillah (1999: 22) aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa memerlukan pembuktian.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partai politik belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Partai politik hanya berfungsi sebagai sarana recruitmen politik yaitu, mengantarkan kader perempuannya sebagai calon anggota legislatif di daerahnya. Strategi kemenangan seutuhnya diserahkan kepada caleg masing-masing. Hal ini disebabkan oleh belum mapannya sistem dalam partai politik (terutama partai baru) dan sebagian besar pengurus menjadi caleg di daerahnya masing-masing.

3. Strategi Caleg Perempuan Dalam Membangun Rasionalitas Pemilih Guna Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009

Ada dua unsur utama yang mempengaruhi pilihan rasional seseorang, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor (Coleman dan Ritzer, 2007: 394).

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan yang saling membutuhkan...terlibat dalam sistem tindakan...selaku aktor yang membutuhkan tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka (Coleman dan Ritzer, 2007: 395).

Di dalam politik, pemaknaan sumber daya diterjemahkan dalam beberapa hal. Sumber daya tersebut seperti modal (uang), jaringan, kekuasaan/jabatan, dan kepercayaan masyarakat. Berbagai sumber daya atau potensi tersebut sangat bergantung dari calon legislatif dan masyarakatnya (prilaku pemilih).

B dalam mengkampanyekan dirinya sebagai caleg lebih menekankan pada kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. Jabatan struktural yang diemban suaminya digunakan untuk mengukur tingkat besarnya pengaruh serta mengukur tingkat kepercayaan (kesetiaan) masyarakat di lingkungannya. Herry Putra (Suami B) adalah lurah di Desa Negara Ratu, yang sebelumnya dijabat oleh orang tua Herry Putra. Ini adalah kali ketiga keluarga Herry Putra menjabat sebagai lurah. Dengan terpilihnya B sebagai anggota legislatif dapat digambarkan bahwa kekuasaan sangat berpengaruh terhadap pilihan rasional masyarakat.

Tujuan utama dalam mengembangkan hubungan relasional dengan masyarakat adalah menciptakan loyalitas konstituen (masyarakat) terhadap partai politik atau kandidat individu. Loyalitas masyarakat terhadap partai politik bukanlah hal yang mudah diraih. Dibutuhkan ikatan emosional, ideologi dan rasionalitas yang kuat antara partai politik dengan masyarakat. Membangun loyalitas membutuhkan waktu yang relatif lama, karena untuk mencapainya dibutuhkan konsistensi dan bukti nyata dari janji serta harapan yang diberikan.

Loyalitas pemilih paling tidak dapat diukur menggunakan dua dimensi. Pertama, loyalitas harus dicerminkan dengan keterlibatan, ikatan dan dukungan terhadap partai politik atau suatu kandidat. Bentuk dukungan itu terlihat dari partisipasi aktif dalam acara-acara partai seperti tabligh akbar, rapat kerja, musyawarah nasional dan lainnya. Selain itu, dukungan harus tercermin dengan diberikannya suara dalam pemilihan umum. Kedua, loyalitas juga dapat dilihat dengan adanya keinginan, komitmen dan tindakan nyata konstituen (masyarakat) untuk mencoba menarik orang-orang di lingkungannya agar memberikan dukungan dan memilih kandidat atau partai tersebut. (Firmanzah. 2008:57).

Tingkat perolehan suara yang diraih caleg perempuan dapat di kategorikan atas loyalitas terhadap kandidat dibandingkan kepada partai politik. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan jumlah suara calon yang mampu diraih. Di Desa Negara Ratu sekitar 80% masyarakatnya memilih B sebagai caleg idaman.

D menjadi anggota legislatif atas bantuan partai baru (Hanura). Bukan berarti tingkat loyalitas masyarakat terhadap partai Hanura masih diragukan. Akan tetapi, sebagai partai baru, secara kuantitas jumlah kader militan belum maksimal. Jika dibandingkan dengan partai yang telah lama membangun interaksi di masyarakat. Partai-partai lama, memiliki kader-kader yang loyal dan militan serta simpatisan yang cukup baik. Hal itu terbentuk karena adanya proses kulturalisasi ideologi partai secara kontinu terhadap masyarakat.

Pembentukan kader yang loyal dan militan telah dilakukan oleh D sejak aktif sebagai pengurus PAN. Dua tahun menjadi anggota dewan tentu telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dalam menilai D sebagai caleg di periode ini (2009-2014). D tinggal menselaraskan kembali tujuannya mencalonkan diri dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat sekitarnya.

Informan E, F, G, dan H sebelumnya belum pernah terjun berpolitik. Meskipun baru pertama dan tidak memiliki pengalaman berpolitik. Kerja keras dan keseriusannya, mereka mampu meraih suara yang membanggakan bagi masyarakat di Dapil 6 Kecamatan Natar. Jumlah perolehan suara caleg perempuan tersebut dapat membuktikan bahwa di Kecamatan Natar tingkat loyalitas masyarakat terhadap kandidat (caleg perempuan) lebih tinggi dibandingkan kepada partai politik.

Informan E, F, G, dan H juga memiliki jaringan sosial yang sangat baik. E telah melakukan pendekatan terhadap warga jauh sebelum pencalonannya sebagai caleg. Bersama suaminya, E memberikan bantuan terhadap warga-warga yang

membutuhkan, baik berupa sembako atau yang lainnya. Informan F menggunakan jaringan sosial yang dimiliki suaminya untuk mendapatkan kader dan simpatisan partai. Mereka kemudian dijadikan sebagai pengurus di tingkat ranting (desa) dan anak ranting (dusun). Strategi F dengan menggunakan orang-orang dekatnya, secara tidak langsung telah berimplikasi positif terhadap kedekatan emosional pengurus partai. Kedekatan emosional antara pengurus ranting dan anak ranting terasa lebih dekat kepada F dibandingkan dengan caleg-caleg lainnya.

Keluarga H pada dasarnya merupakan keluarga yang taat beragama. H dan suaminya kerap mengisi pengajian di berbagai desa di Kecamatan Natar dan Kecamatan lainnya. Proses ini secara tidak langsung telah membuat dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Natar. H merupakan keluarga elitis dengan tingkat elektabilitas yang tidak diragukan. H tidak perlu turun ke seluruh desa setiap hari. Meraih, mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara dapat digerakkan melalui tim sukses yang tersebar di setiap desa.

Strategi politik caleg perempuan guna meningkatkan perolehan suara yang memanfaatkan jaringan sejalan dengan hasil penelitian Rochana (2000: 68) tentang strategi pengentasan kemiskinan. Pertama, jaringan sosial yang didasarkan pada sistem kekerabatan dan kekeluargaan. Kedua, jaringan sosial berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Ketiga, jaringan sosial yang bersifat vertikal. Jaringan sosial tersebut dipraktekkan melalui tindakan seperti, melakukan halal-bihalal, yasinan, tahlilan, silaturahmi dengan sanak keluarga, mengadakan pengajian rutin, menghadiri acara pernikahan, kunjungan ke desa tertinggal, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara, setiap informan

telah memanfaatkan jaringan-jaringan tersebut untuk memperoleh, meningkatkan dan mempertahankan suara politiknya agar dapat memenangkan pemilihan legislatif 2009-2014 di Dapil 6 Kecamatan Natar.

Menurut Firmanzah (2008: 189) positioning adalah berbagai aktivitas guna menanamkan kesan positif dalam benak masyarakat agar mereka mampu membedakan produk dan jasa yang ditawarkan setiap organisasi. Setiap produk dan jasa yang ditawarkan caleg akan terekam dalam bentuk *image* yang terdapat di sistem kognitif masyarakat. Masyarakat akan dengan mudah mengidentifikasi dan membedakan berbagai produk yang ditawarkan oleh setiap caleg. Semakin menarik dan kreatif produk yang ditawarkan akan meningkatkan *image* politik masyarakat terhadap seorang caleg.

Jaringan dan basis massa yang berbeda dari setiap informan menggambarkan bahwa mereka memiliki target *imaginya* sendiri-sendiri. Mereka memiliki basis massa dengan tingkat capaian hasil yang berbeda. E mampu memperoleh suara terbanyak ke-4 (empat) secara perorangan. F dan D memiliki perbedaan suara politik yang sangat tipis. F memperoleh suara 896 dan D 911 suara, hanya beda 15 suara. Suara politik G sebanyak 250. Sedangkan H memperoleh suara sebanyak 950, hanya saja suara partai dan suara rekan sejawatnya yang tidak bisa bergerak secara maksimal.

Jumlah perolehan suara tersebut menggambarkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat atas keberadaan caleg perempuan sudah sangat baik. Masyarakat tidak memandang dari kultur SARA, tidak ada pembedaan antara caleg laki-laki dan

perempuan. Kedekatan emosional dan proses pembinaan di dalam masyarakat menjadi kunci utama guna meningkatkan perolehan suara caleg perempuan.

Tingkat capaian perolehan suara caleg perempuan yang maksimal tersebut sekaligus mematahkan pendapat dari Inglehart (2003) tentang tiga hambatan bagi perempuan untuk terjun berpolitik. Pertama, hambatan struktural seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Kedua, hambatan institusional seperti sistem politik, tingkat demokrasi, dan sistem pemilu. Ketiga adalah hambatan kultural, yakni budaya politik, perbedaan ideologi, ataupun pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender. Hambatan terbesar justru dihadapi caleg perempuan adalah perkaderan di dalam tubuh partai politik yang dirasa belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara, di dapat bahwa tiga hambatan yang dikemukakan Inglehart (2003) tidak semuanya benar dan cenderung ke arah negatif. Caleg telah berpendidikan menengah ke atas dan juga strata 1 (satu). Caleg DPRD Provinsi, DPR RI atau DPD tingkat pendidikan caleg perempuan kemungkinan besar sudah jauh lebih tinggi. Pekerjaan, latar belakang organisasi dan tingkat sosial ekonomi caleg di Kecamatan Natar berada pada posisi strategis. Caleg perempuan menempatkan posisi sebagai Ketua atau Sekertaris Dharma Wanita, Ketua atau Sekertaris PKK, Dosen, Pengusaha, Pengrajin, Pegawai Bank dan lainnya.

Pada peraturan, pemerintah pun telah mempermudah sistem (undang-undang). Peraturan atau undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang terjun di ranah publik. Sistem politik, tingkat

demokrasi dan sistem pemilu telah memihak pada peningkatan partisipasi perempuan.

Masyarakat kini tidak lagi membutuhkan janji tetapi bukti. Masyarakat tidak pernah membedakan suku, agama, ras, ideologi, ataupun jenis kelamin. Tinggal bertumpu pada kemampuan perempuan dalam memanfaatkan kesempatan, sanggup bersaing, menarik simpati, mempengaruhi persepsi masyarakat atas suatu permasalahan tertentu. Dengan demikian, mereka mampu meraih peringkat teratas diantara caleg-caleg lainnya dan menempatkannya duduk sebagai anggota legislatif dari Dapil 6 Kecamatan Natar.

Indonesia pertama kali melakukan demokrasi (pemilu) tahun 1955 di zaman orde lama. Gerak demokrasi kemudian terus mengalir dan berkembang hingga sekarang di masa reformasi. Budaya politik (kampanye) terasa masih menggunakan sistem lama yang telah terbentuk secara permanen, meski tidak lagi dipraktekkan secara utuh. Budaya politik yang menjadi media mengkampanyekan diri para caleg perempuan tersebut seperti, melakukan pertemuan-pertemuan umum, penyiaran (sosialisasi) melalui media massa dan elektronik, pemasangan dan membagi-bagikan bendera, spanduk, poster, stiker, kartu nama.

Zaman orde baru, kampanye politik dilakukan melalui rapat umum, pawai tanpa kendaraan (karena dapat memicu terjadinya kerusuhan), keramaian umum/pesta umum/pertemuan umum (temu kader, tabligh akbar, dan deklarasi), penyiaran melalui TVRI (saat itu televisi swasta baru berkembang dan tidak diperbolehkan ikut menyiarkan kampanye), melalui radio (RRI), media massa (koran/majalah), penyebaran lambang, simbol, warna dan slogan partai politik, pemasangan umbul-

umbul, bendera, pamflet, brosur, poster, plakat, dan sebagainya (Firmanzah, 2008: XXXV-XXXVI).

Di sejumlah negara berkembang, pemilih nonpartisan lebih tinggi jumlahnya di setiap pemilihan umum. Untuk itu, kekuatan struktur kampanye menjadi hal yang berpengaruh besar. Setiap calon anggota legislatif memiliki tim pemenangan dalam jumlah yang relatif banyak. Hal itu dilakukan untuk menembus berbagai karakteristik masyarakat, mematahkan pandangan atas ideologi tertentu, pandangan atas suku, ras dan agama yang berbeda. Strategi tersebut dilakukan oleh informan E dan H.

Schroder (2008: 71) mengungkapkan bahwa kondisi dan mekanisme komunikasi internal sebuah organisasi menentukan bagaimana informasi, perintah dan umpan balik (*feedback*) disampaikan. Dalam situasi pemilu, komunikasi vertikal dan horizontal sangat diperlukan. Komunikasi vertikal digunakan sebagai upaya mengkoordinasikan berbagai informasi-informasi penting yang selaras dengan kebutuhan kampanye. Untuk itu, penyampaian informasi kepada struktur tim pemenangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Elemen dasar dari masyarakat adalah komunikasi, dan komunikasi dihasilkan oleh masyarakat. Partisipan dalam masyarakat mengacu melalui komunikasi. Untuk itu, tim pemenangan harus mampu berkomunikasi secara maksimal melalui metode yang lugas, efektif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pola penyampaian informasi harus mampu dilakukan secara hati-hati. Sensitifitas masyarakat harus tetap terjaga, karena kesalahan dalam berkomunikasi akan berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara.

Seseorang dalam memilih calon legislatif atau partai tertentu, lebih didasarkan atas keyakinan bahwa kandidat mampu mewujudkan tujuan mereka. Tindakan-tindakan tersebut ditentukan oleh nilai dan pilihan-pilihan tertentu. Ada harapan di masyarakat bahwa kehadiran caleg mampu merubah kehidupan mereka, jangka pendek dan panjang. Masyarakat Indonesia sebagian besar berada pada kelas menengah bawah. Hal utama yang terpikirkan oleh mereka adalah terselesaikannya masalah kebutuhan ekonomi. Untuk itu pembangunan komunikasi yang mengarah pada pemberian nilai kepuasan masyarakat (masalah ekonomi), menjadi kunci utama keberhasilan strategi.

Di samping penguasaan lingkungan (karakteristik masyarakat), caleg harus memiliki pengetahuan akan lawan-lawan politiknya. Informan A mengungkapkan bahwa dalam berpolitik itu harus cerdas, mampu memperhatikan siapa-siapa saja lawan politik kita, jangan sampai main trabas, apalagi hanya bermodalkan kekayaan, itu sama saja bunuh diri. Semua perlu diperhitungkan secara matang, siapa-siapa saja yang mencalonkan diri, dari partai mana, apa latar belakang politiknya, tingkat pendidikan, bagaimana ketokohnya, pengaruhnya dimasyarakat, berapa jumlah uangnya, dan lain-lain.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa caleg harus mampu mengumpulkan berbagai fakta-fakta tentang pesaing politiknya. Dalam kasus-kasus tertentu, pesaing dapat menjadi musuh. Tergantung pada iklim politik yang senantiasa berubah seiring berjalannya waktu. Pesaing politik dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pesaing nyata. pesaing nyata adalah pesaing yang secara jelas/nyata menjadi lawan politik. Perbedaan partai politik, pandangan atau

ideologi politik, dan para calegnya adalah pesaing yang secara jelas menjadi lawan politik. Kedua, pesaing terselubung. Pesaing terselubung adalah pesaing yang tidak terbaca secara jelas menjadi kawan atau lawan. Pesaing terselubung biasanya berada dekat dengan caleg, posisi yang tidak jauh berbeda, memiliki tujuan dan target yang sama.

Menyusun daftar pihak-pihak yang potensial menjadi pesaing, lawan, dan identifikasi musuh merupakan tindakan yang penting. Akan tetapi, tidak harus mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan semua kelompok tersebut. Beberapa kelompok bisa diabaikan, karena mereka tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi hasil yang ingin dicapai.

Mengumpulkan fakta tentang perkembangan pesaing sama dengan pengumpulan fakta untuk struktur dalam organisasi sendiri. Ketidaktahuan atau kesalahan penilaian mengenai maksud, rencana, kekuatan dan kelemahan pesaing akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam membentuk perencanaan strategi. Kehati-hatian dan disiplin dalam membentuk dan merepakan strategi berkorelasi positif terhadap hasil yang dicapai.

Sun Tzu dalam Schroder (2009: 74-75) mengemukakan: “Jika kamu mengenal dirimu sendiri dan orang lain secara mendalam, dalam seratus peperangan pun kamu tidak akan berada dalam bahaya; jika kamu mengenal dirimu sendiri tetapi tidak mengenal orang lain, kamu akan sesekali menang dan sesekali kalah; jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri dan juga tidak mengenal orang lain, maka kamu akan hancur di setiap peperangan”.

a. Penerapan Marketing Mix Dalam Politik

Marketing politik berbeda dengan marketing bisnis (komersial). Marketing politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat tertentu. Konsep ini berfungsi untuk membentuk suatu penawaran strategis bagi masyarakat dalam memandang partai politik atau kandidat tertentu. Kandidat politik dapat membuat dan menawarkan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam dunia marketing terkenal dengan istilah 4Ps (*product, promotion, price dan place*).

Scammel (1995-1996) menyebutkan bahwa kontribusi marketing dalam dunia politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan pada pemilih. Aktivitas politik harus sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Dengan demikian semakin meningkatnya iklim persaingan yang sehat dan terbuka diantara partai-partai, banyak kalangan yang menganjurkan agar partai politik lebih berorientasi pasar (O'cass. 2001; Lilleker dan Negrine. 2006). Firmanzah (2008: 197) mengungkapkan bahwa pesan yang ingin di sampaikan dalam konsep marketing politik adalah

1. Menjadikan pemilih sebagai subjek, bukan objek partai politik atau seorang kandidat
2. Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dengan bingkai ideologi masing-masing partai

3. Marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan *tools* untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga akan terbangun kepercayaan dan selanjutnya akan diperoleh dukungan suara mereka.

Terkait strategi caleg perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif 2009 berikut akan diuraikan strategi politik tersebut dalam bingkai marketing politik. Pada akhirnya kita akan mengetahui apakah penerapan marketing politik memberikan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara caleg perempuan. Penerapan Marketing dalam dunia politik tersebut, 4Ps (*product, promotion, price dan place*) dapat dijabarkan dalam analisis berikut:

1. Produk

Niffeneger (1989) dalam Firmanzah (2008: 200) membagi produk politik dalam tiga kategori, Party Platform (Platform Partai), Past Record (catatan yang dilakukan pada masa lampau), dan Personal Characteristic (ciri pribadi). Produk dalam partai politik sangat terkait dengan sistem nilai (*value laden*); di dalamnya melekat janji dan harapan akan masa depan; terdapat visi yang bersifat atraktif; kepuasan yang dijanjikan tidaklah segera tercapai, tetapi hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat beberapa hal yang termasuk dalam produk politik yang menggambarkan strategi dari masing-masing caleg perempuan, yaitu:

Informan B

- a. B menggunakan partai yang memiliki basis massa cukup besar (loyalitas partai)
- b. B menggunakan konsep pembangunan adil dan merata, terutama dalam bidang pendidikan.
- c. B tergolong keluarga terpandang karena beberapa periode menjadi kepala daerah

Informan D

- a. Tujuan D adalah agar terbentuknya pemerataan pembangunan di Kecamatan Natar
- b. D merupakan lulusan sarjana psikologi dan pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah
- c. D pernah aktif belajar politik di PAN
- d. D merupakan mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 2004-2009

Informan E

- a. Melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah
- b. Warga memandang E sebagai orang yang berkarakter baik dan santun.
- c. E aktif memberikan bantuan pada warga seperti, sembako dan beasiswa, jauh sebelum pencalonannya sebagai caleg

Informan F

- a. F merupakan sarjana ekonomi dan pernah menjadi pegawai asuransi, F aktif membantu warga dalam mengansuransikan dirinya
- b. Sebelum di Partai Hanura F pernah aktif di Partai Golkar

Informan G

- a. Tujuan G mencalonkan diri sebagai caleg adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat terutama kaum perempuan yang selalu merasa tertindas dan disepelekan.
- b. G bekerja sebagai Sekretaris PKK

Informan H

- a. Tujuan F mencalonkan diri sebagai caleg adalah untuk melakukan perjuangan kebangkitan Islam
- b. F dikenal sebagai wanita yang gemar memberikan pengajian (ustadzah)

2. Promosi

Promosi merupakan syarat utama dalam berpolitik. Promosi menjadi alat komunikasi efektif guna menyampaikan aspirasi dan tujuan pencalonan diri seorang caleg. Dengan demikian, proses penyampaian informasi dan hubungan interaksi antar kelompok dapat tersalurkan secara lebih efektif dan efisien.

Promosi akan menggambarkan mekanisme pembentukan dan penerapan strategi politik caleg perempuan. Akan tetapi tidak semua media dapat dijadikan sebagai alat mempromosikan diri. Menurut Rothschild (1978) dan Firmanzah (2008: 204) bahwa pilihan media merupakan salah satu faktor penting dalam penetrasi pesan politik ke publik. Media promosi dapat dibagi menjadi dua, menggunakan advertising (pengiklanan), publikasi dan media debat/pengumpulan massa.

Berdasarkan hasil wawancara strategi promosi caleg perempuan dapat dijabarkan dalam analisis berikut:

Informan B

- a. Menggunakan kaum perempuan sebagai tim pemenangan.
- b. Menggunakan atribut partai politik seperti, bendera, kaos partai, stiker, baleho, banner, spanduk dan kartu nama.
- c. Memanfaatkan moment seperti halal-bihalal, yasinan, tahlilan dan momen pernikahan.
- d. Memanfaatkan nama baik keluarganya.
- e. Membagi-bagikan alat kebutuhan masyarakat seperti, keagamaan (mukena, sejadah, perbaikan msjid), Kebutuhan rumah tangga (sembako) dan bakti social (memberikan pasir, batu dan alat pertanian).
- f. Melakukan pertemuan dengan warga secara kontinu.

Informan D

- a. Menggunakan sistem monopoli
- b. Menggunakan orang-orang yang duduk di PAC dan Ranting sebagai tim pemengangannya.
- c. Menggunakan media lisan (Menghadiri pertemuan-pertemuan dengan rakyat).
- d. Menggunakan media tulisan (banner, spanduk, kartu nama, stiker dll)
- e. Membagi-bagikan atribut kampanye (kaos, bendera, mukena, sembako dll)

Informan E

- a. Mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial (beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, bantuan ke masjid, panti jompo, yatim piatu)
- b. Pemberian perlengkapan salat, pembuatan sumur bor, pemberia kubah, alat-alat pertanian, perbaikan jalan
- c. Mengadakan pasar murah
- d. Mengadakan pelatihan menjahit secara gratis kepada warga
- e. Membentuk tim kampanye dalam jumlah besar (\pm 350 orang)
- f. Pembuatan kue bekerjasama dengan P. Rose Brand ke 22 Desa di Kecamatan Natar
- g. Pemberian baju gamis dan batik kepada warga
- h. Menggunakan media tulisan (banner, spanduk, kartu nama, stiker, kaos dan bendera partai dll)

Informan F

- a. Memanfaatkan kader-kader di setiap ranking dan anak ranking partai
- b. Menggunakan kartu nama, poster, banner, kalender, pamflet, liflet, kaos dan bendera partai.
- c. Melakukan pendekatan emosional kepada warga
- d. Bekerja sama dengan caleg DPRD dan DPR RI melakukan silaturahmi kepada warga (menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, halal bihalal, moment pernikahan, turut bela sungkawa kepada warga yang meninggal dll)

Informan G

- a. Door to door
- b. Memanfaatkan moment pengajian, rakor di tingkat desa dan dusun, arisan
- c. Mengunjungi warga dalam satu forum tatap muka
- d. Memberikan bantuan perbaikan jalan, memberikan mukena dll
- e. Menggunakan kartu nama, poster, banner, kalender, pamflet, liflet, kaos dan bendera partai

Informan H

- a. Membentuk tim pemenangan dalam jumlah besar (di setiap dusun minimal 3 orang)
- b. Door to door
- c. Mengunjungi seluruh desa di Kecamatan Natar minimal 3 kali pertemuan di setiap desanya.
- d. Menggunakan kartu nama, poster, banner, kalender, pamflet, liflet

3. Harga (*Prince*)

Menurut Niffenegger dalam Firmanzah (2008: 205) harga marketing politik digolongkan tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, dan harga *image* (citra) nasional. Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye. Harga psikologis yaitu mengacu kepada kenyamanan masyarakat atas latar belakang dari caleg perempuan seperti, etnis, agama dan pendidikan. Harga *image* nasional yaitu berkaitan dengan citra seorang caleg. Caleg harus dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa dirinya mampu memberikan citra positif bagi daerah dan menjadi kebanggaan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pernyataan caleg perempuan yang termasuk dalam harga suatu marketing politik, strategi-strategi tersebut antara lain:

- Informan B : Latar belakang keluarga informan B (kepala daerah)
Bendahara PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Informan D : Mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 2004-2009
Sarjana Psikologi
Pernah menjadi Dosen di Universitas Muhammadiyah
Wakil Ketua DPC Partai Hanura
- Informan E : Pengusaha pakaian yang Gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial
Mengeluarkan biaya kampanye ± Rp. 400.000.000,-
Bendahara PAC Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- Informan F : Sarjana Ekonomi
Mengeluarkan biaya pembesaran partai ± Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,-
Mengeluarkan biaya kampanye ± Rp. 50.000.000,-
- Informan G : Wakil Sekertasi PAC Partai Hanura
Sekertaris PKK
Mengeluarkan biaya kampanye ± Rp. 50.000.000,-
- Informan H : Seorang ustadzah (aktif mengisi pengajian)
Keluarga pendidik (guru)

Sebagian besar caleg perempuan tidak memberikan jawaban atau gambaran jelas tentang jumlah biaya kampanye yang dikeluarkannya. Dengan pertimbangan sebuah privasi (rahasia) dan informan tidak ingin mengingat-ingat lagi besaran biaya kampanye yang dikeluarkannya.

4. Tempat (*Place*)

Caleg harus memperhitungkan wilayah atau daerah yang menjadi basis suaranya. Dalam berkampanye caleg harus mampu mengidentifikasi, memetakan struktur dan karakteristik masyarakat di setiap daerahnya. Identifikasi dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di setiap daerah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pengetahuan caleg terhadap berbagai hal tersebut akan memudahkan caleg dalam menentukan dan merumuskan strategi yang pantas bagi masyarakat dengan keadaan geografisnya masing-masing.

Pemetaan dapat dilakukan secara geografis, budaya (*culture*), kelas sosial, hingga pengetahuan masyarakat. Pemetaan ini berfungsi bagi penerapan teknis strategi. Penggunaan media seperti, koran, televisi, pamflet, bannner, berkorelasi positif terhadap pengetahuan tempat berkampanye.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap informan melakukan kampanye politiknya secara merata di 22 Desa. Target utama tempat caleg berkampanye adalah di desa-desa yang berada dalam jangkauannya seperti, dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan mudah dijangkau kendaraan bermotor. Setiap celeg akan mengunjungi basis suaranya (evaluasi pilihan warga) minimal 3 kali di setiap desanya.

Penerapan Marketing Mix tersebut apabila disimpulkan dalam kesatuan strategi caleg perempuan, maka dapat dibedakan atas strategi ofensif dan defensif. Strategi ofensif adalah strategi yang digunakan caleg untuk meraih dan meningkatkan atau memperluas suara politiknya. Strategi ofensif yang digunakan oleh caleg dapat dijabarkan dalam beberapa aktivitas, yaitu:

1. Caleg perempuan menggunakan temu kader atau rapat anggota dari tingkat kabupaten (DPC) hingga dusun (Anak Ranting). Tujuan temu kader adalah untuk menyamakan frame berfikir (penyatuan sikap) seluruh anggota partai politik dalam menyikapi moment pemilihan anggota legislatif 2009.
2. Penggunaan media-media kampanye seperti radio, bendera partai, stiker, banner, kalender, penyebaran lambang, simbol, warna dan slogan partai politik, pembagian kaos-kaos partai, pamflet, kartu nama, poster, dan sebagainya.
3. Tabligh akbar merupakan suatu strategi caleg perempuan dalam menarik simpati masyarakat. Tujuan tabligh akbar adalah untuk memperkenalkan dan mendekatkan caleg perempuan dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Natar.
4. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat seperti, aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, preman setempat, pemuda-pemudi, dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut dijadikan sebagai tim sukses ataupun dimasukkan
5. Melalui tim sukses, caleg mengumpulkan warga dalam satu forum guna mensosialisasikan dan memperkenalkan diri, tujuan (visi misi) dan menabur janji. Dalam berkampanye, caleg Kabupaten akan bekerja sama dengan caleg Provinsi dan RI. Selain memperhemat pambiayaan partai, strategi ini

dilakukan sekaligus sebagai proses pencitraan atau menampakkan tokoh-tokoh yang akan menjadi wakil rakyat di senayan nanti.

6. Caleg menggunakan sanak keluarga, kaum kerabat dekat, para tetangga, rekan-rekan kerja dan sahabat-sahabat lama yang telah dimiliki. Metode yang dilakukan dengan cara datang dari rumah ke rumah (*door to door*). Selain untuk bersilaturahmi, strategi ini mereka dapat dijadikan oleh caleg sebagai tim sukses yang mengawal perolehan caleg di masyarakat setempat.
7. Memberikan pelatihan gratis kepada warga, membuat pasar murah, membagi-bagikan sembako dan lainnya.

Strategi defensif adalah strategi yang digunakan caleg untuk mempertahankan dan menjaga stabilitas suara pemilihnya. Untuk melakukan hal tersebut caleg perempuan harus memberikan sesuatu yang baru (model) yang tidak dimiliki oleh caleg atau kandidat lain. Strategi defensif dapat dijabarkan dalam beberapa aktifitas, seperti:

1. Menghadiri moment pernikahan, khitanan (sunatan) dan turut berduka cita atas meninggalnya warga menjadi strategi untuk membangun dan meningkatkan daya emosional warga terhadap caleg perempuan.
2. Caleg perempuan minimal mengevaluasi warga (melakukan pertemuan) sebanyak tiga kali.
3. Tim sukses akan bekerja secara bebas di masyarakat. Mereka harus melakukan pendekatan secara intensif (setiap hari) kepada warga di daerahnya masing-masing. Hal itu dilakukan atas dua hal. Pertama, melihat pergerakan lawan politik, sejauh mana mereka inten melakukan

pendekatan terhadap warga. Kedua, menjaga stabilitas suara agar tidak berpaling terhadap caleg lain yang juga melakukan pendekatan terhadap warga di daerah tersebut.

b. Strategi Terselubung

Masyarakat semakin pintar dalam berpolitik. Kritis, selektif dan sensitifitas masyarakat dalam berpolitik ditularkan oleh dalam bentuk slogan “Kami tidak butuh janji-janji, tetapi bukti”. Secara pragmatis, slogan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sudah lelah dengan retorika perubahan dari caleg. Masyarakat menginginkan bentuk nyata dari sebuah tujuan perubahan yang terlontarkan.

Sikap pragmatisme masyarakat tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh caleg perempuan (informan). Menurut para informan, setiap mereka datang berkampanye warga selalu meminta sesuatu sebagai buah tangan. Buah tangan tersebut bermacam-macam bentuknya, ada yang meminta jilbab, pasir, batu, renovasi masjid, perbaikan jalan bahkan ada yang meminta uang tunai sebagai dalam bentuk serangan fajar. Menurut para informan, selama berkampanye, mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (untuk persiapan pertemuan) dan Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- per pertemuan untuk buah tangan. Apabila caleg perempuan hendak melakukan serangan fajar, kost politik yang akan keluar sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 50.000,- perorang.

Sikap politik masyarakat tersebut justru telah mengarahkan para caleg untuk bertindak pelanggaran. Caleg akan berupaya mematahkan pergerakan lawan politiknya sehingga masyarakat tidak mengetahui atau mengenal lawan-lawan politiknya sebaik dirinya. Wujud dari pelanggaran tersebut seperti, melakukan

kampanye tidak sesuai jadwal, melakukan kampanye ditempat yang dilanggar (tidak diperbolehkan), mencopot atau membelakangi poster, panflet ataupun stiker lawan politiknya, membagi-bagikan sembako, atau bekerjasama penyelenggara pemilu untuk memanipulasi data.

4. Konflik Politik

Strategi politik adalah sesuatu yang sensitif. Tidak semua orang di struktur pemenangan dapat mengetahui strategi yang digunakan caleg perempuan dalam merebut kursi legislatif periode 2009-2010. Hal ini dilakukan karena dalam politik sangat sulit membedakan siapa lawan dan kawan, semua membentuk satu gerakan yang dinamis. Sikap skeptis dan hati-hati dalam memilih dan membentuk struktur pemenangan menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya dalam memilih tim sukses. Tim sukses merupakan media kampanye politik yang berfungsi untuk menyampaikan argumentasi persuasif pencalonan diri seorang caleg perempuan.

Moment pemilu sebagai upaya perebutan atau mempertahankan kekuasaan tidak terlepas dari singgungan, benturan, gesekan, perselisihan atau konflik. Struktur dalam partai politik mulai dari ketua hingga anggota ikut andil berpartisipasi dalam moment pilleg tersebut. Pergesekan dan pertentangan dalam tubuh partai politik maupun antar caleg yang berbeda partai politik kemungkinan besar akan terjadi. Konflik terjadi secara langsung atau tidak langsung. Konflik dapat terjadi melalui partai politik, caleg maupun tim kampanye (pemenangan).

Menurut Simmel dalam Poloma bahwa konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu dan intensitas tunduk pada perubahan. Menurutnya konflik secara positif membantu struktur sosial dan secara negatif dapat menyebabkan melemahnya kerangka masyarakat. Konflik secara instrumental mampu membentuk, menyatukan dan memelihara struktur sosial. Konflik yang bersifat negatif dapat menyebabkan terjadinya perpecahan dan hancurnya tatanan masyarakat.

Model konflik atas gerakan politik caleg perempuan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. Konflik Internal Partai Politik

Konflik internal partai politik dapat dibedakan atas konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi dalam struktur partai politik, antara pimpinan dan bawahan. Konflik vertikal terjadi atas ketidakpuasan anggota terhadap keputusan atau sikap partai politik. Konflik vertikal ini dialami oleh kader Partai Hanura, PDK dan PKNU.

Informan F menuturkan hasil investigasi dan survey yang dilakukan tim tujuh menunjukkan bahwa seharusnya yang menjadi caleg nomor satu dari partai Hanura adalah F. Namun, karena D adalah Koordinator Partai Hanura di Kabupaten Lampung Selatan, Posisi nomor satu diserahkan kepadanya. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya F merasa tidak puas ditempatkan pada posisi nomor dua di pencalonan legislatif 2009 ini.

Selain itu, pembagian kaos dan bendera partai dirasa tidak berimbang atau merata. Tidak semua caleg dari Partai Hanura mendapatkan pembagian atribut partai politik secara adil. G salah satu caleg yang tidak puas atas pembagian bendera dan kaos partai untuk berkampanye. G mengatakan bahwa dirinya memang mendapatkan kaos dan bendera partai tapi, jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar kaos dan bendera partai berada di caleg nomor 1 (informan D). Menurut G terdapat dua hal yang melandasi D mendapatkan lebih banyak. Pertama, D adalah koordinator di Lampung Selatan. Kedua, D merupakan caleg nomor satu, pembiayaan pembesaran partai tentu lebih besar D. Akan tetapi, hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh G.

Konflik vertikal juga dialami oleh kader partai PDK dan PKNU. Informan E dan H merupakan korban dari ketidak mapanan kultur dan struktur dalam partai politik. Selain keberadaan mereka yang terkesan dipaksakan, perhatian dan bantuan partai terhadap pencalonannya terasa tidak tampak. Biaya kampanye seperti, bendera, kaos partai dan berbagai media sosialisasi lain seluruhnya ditanggung oleh informan. Kekecawaan informan terhadap partai pengusungnya ditularkan dalam wujud keluarnya mereka dari kepengurusan parpol. Hal itu diungkapkan oleh caleg ketika ditanyakan,:

Peneliti : “Apakah ibu akan maju kembali dalam pencalonan legislatif 5 tahun mendatang?”

E dan H : “Ya. Tapi sepertinya saya akan memikirkan dan memilih secara matang terlebih dahulu partai politik mana yang cocok untuk dijadikan sebagai perahu politik”.

Konflik horizontal terjadi antara sesama caleg perempuan dalam satu partai politik yang tidak dibatasi ikatan antara atasan dan bawahan. Konflik internal terjadi vertikal dirasakan oleh kader Partai Hanura, PDK dan PKNU. Konflik tersebut, seperti yang dialami F.

Informan F menganggap D telah melakukan monopoli terhadap saksi saat perhitungan suara di Kecamatan Natar. F menganggap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam perhitungan suara tersebut dapat saja terjadi. Pelanggaran tersebut dalam bentuk perubahan jumlah suara. Asumsi ini dilandasi oleh tidak diizinkannya caleg lain untuk memasukkan saksinya dan mendapatkan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

b. Konflik Eksternal Partai Politik

Persaingan memperebutkan simpati masyarakat menjadikan proses pemilihan legislatif 2009 begitu rentan terhadap konflik. Dua puluh dua (22) desa di Kecamatan Natar tentu akan dikunjungi seluruh caleg yang mendaftarkan diri di Dapil 6 Kecamatan Natar, Lampung Selatan, sebanyak 129 caleg (laki-laki dan perempuan), minimal lima puluh persennya (50%). Setiap caleg biasanya memiliki catatan/rekapitulasi jumlah simpatisan dan pendukung politiknya. Lobi-lobi politik, pembangunan pencitraan bahkan pencelaan antar caleg bisa saja terjadi. Ketika suara yang diperoleh caleg dianggap belum maksimal, tentu proses tersebut menyebabkan caleg perempuan akan berusaha lebih keras lagi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konflik akan semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara informan H mengungkapkan bahwa tim suksesnya pernah bersinggungan dengan caleg/tim sukses lain. Persinggungan terjadi atas kesalahpahaman dalam menilai daerah yang dapat dibina atau dimasuki oleh seorang caleg. Menurut H apabila suatu daerah telah dimasuki atau dibina oleh caleg tertentu maka, daerah tersebut tidak boleh lagi dimasuki oleh caleg lainnya.

Sedangkan proses demikian akan sulit dilakukan. Seratus dua puluh sembilan (129) caleg memperebutkan suara politik rakyat di 22 desa. Kursi legislatif yang tersedia hanya ada 6 (enam). Untuk itu, setiap caleg tentu akan menunjukkan yang terbaik dan memperoleh suara terbanyak. Tingkat elitis dan elektabilitas seorang caleg dipertaruhkan dihadapan rakyat. Dengan demikian, tidak mungkin dapat terjadinya pembagian suara yang pas untuk setiap caleg. Proses ini menunjukkan bahwa benturan politik antar caleg tidak mungkin dapat dihindari.

Konflik politik tidak hanya menimpa caleg yang notabene tidak saling mengenal. Konflik politik dapat meluas menyebabkan terjadinya perpecahan dalam hubungan persaudaraan/keluarga. Informan B menjadi salah satu caleg perempuan yang menjadi korban konflik dalam keluarga. Informan B adalah sebagian kecil atas perpecahan yang terjadi dalam keluarga. Perpecahan dalam keluarga yang disebabkan oleh politik juga dialami oleh partai dan caleg lainnya. Bahkan hingga hari ini, keluarga yang berkonflik belum juga berdamai atau bertegur sapa.

5. Kendala Caleg Perempuan Dalam Menerapkan Strategi Politik

Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai informan menjelaskan bahwa terdapat banyak kendala yang dihadapi caleg perempuan dalam menerapkan strategi politiknya. Berbagai kendala tersebut di antaranya adalah:

- a. Keberadaan partai politik tidak mampu memberikan posisi atau nilai tawar lebih terhadap suara caleg perempuannya. Keberadaan parpol hanya sebatas pengawalan kandidat hingga terpilih (ditetapkan) sebagai calon tetap peserta pemilu. Nilai tambah partai guna mengawal kadernya hanya terlihat pada pemberian atribut parpol yang terkadang jumlahnya pun tidak berimbang dan maksimal bahkan terdapat parpol yang tidak memberikan atau membagikan atribut partai politiknya. Seluruh pendanaan kampanye politik diserahkan kepada caleg masing-masing.
- b. Partai politik tidak memiliki strategi khusus yang berfungsi mengagregasikan dan mengartikulasikan keterwakilan perempuan. Keberadaan perempuan sebagai calon legislatif terkesan sebatas syarat agar partai politik menjadi peserta pemilu. Pengurus partai tidak pernah membentuk strategi khusus yang berfungsi untuk meningkatkan perolehan suara caleg perempuan.
- c. Pengurus bekerja bukan atas nama partai politiknya masing-masing. Pengurus bekerja atas ketertarikan dan kedekatan emosional kepada salah satu kandidat politik. Kedekatan emosional tersebut cenderung terhadap pimpinan partai yang didominasi oleh caleg laki-laki. Sikap pengurus tersebut tentu sangat merugikan posisi caleg perempuan.
- d. Orang-orang yang dipercayakan menjadi tim sukses (diluar pengurus partai), tidak semuanya membantu secara ikhlas. Terdapat tim sukses yang hanya

memanfaatkan moment pemilu untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan melakukan manipulasi data atas perolehan suara politik kandidatnya. Selain itu, terdapat tim sukses yang rangkap jabatan (menjadi tim sukses pada caleg lain), baik dalam satu partai maupun berbeda partai.

- e. Posisi caleg semakin miris ketika mereka memilih diusung oleh partai-partai kecil dan baru. Berdasarkan informasi, didapat bahwa tidak semua partai peserta pemilu memiliki struktur pemenangan dan penguasaan strategi yang matang. Lemahnya struktur dan penguasaan strategi politik ternyata didominasi oleh partai kecil dan partai baru. Besar kemungkinan pola kaderisasi partai tidak mampu dijalankan secara efektif dan efisien. Imbas dari proses ini, kandidat yang diusung oleh partai kecil dan partai baru tidak mampu menjalankan roda organisasi dengan baik. Dengan demikian, kecendrungan mengalami kegagalan dalam pemilihan legislatif sangat besar.
- f. Kultur masyarakat Indonesia terkesan sangat pragmatis. Setiap berkampanye sebagai upaya mensosialisaikan diri, memberikan pemahaman akan makna demokrasi, hasilnya selalu berujung pada keinginan berproses secara instant. Masyarakat meminta berbagai cendra mata atau buha tangan dalam bentuk uang maupun barang yang terkadang memberatkan caleg. Berbagai cendera mata tersebut seperti jilbab, pasir, batu, perbaikan jalan, renovasi masjid, pemuda pemudi ingin mengadakan perlombaan bahkan ada yang meminta dalam bentuk uang tunai. Setiap turun ke desa para caleg minimal harus mengeluarkan dana Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- per pertemuan. Tindakan ini tentu sangat memberatkan caleg perempuan. Hal yang

dikhawatirkan bahwa ketika dituruti belum tentu masyarakat akan memilih caleg tersebut.

- g. Sistem pemilihan dan kertas suara yang lebar menjadi kendala substansial caleg perempuan dalam membaca keberhasilan strategi politiknya. Kertas suara yang begitu lebar menjadi kendala substansi bagi warga dalam mencari dan memilih caleg idamannya. Kertas suara yang sangat lebar menjadikan warga salah dalam mencontreng caleg idamannya.
- h. Pengamanan suara hasil perhitungan yang kurang terjaga menjadi kendala yang sangat di sesali oleh para caleg perempuan. Saksi dalam perhitungan suara hanya di izinkan satu orang, yaitu dari partai politik. Saksi dari caleg tidak di izinkan mengikuti forum perhitungan suara. Dengan demikian perubahan akan hasil perolehan suara sangat rentan terjadi.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa kesimpulan, antara lain:

Partai politik tidak memiliki peran yang substansial bagi pemenangan caleg perempuan. Keberadaan perempuan sebagai caleg hanya sebatas untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Partai politik tidak memiliki strategi khusus guna mengangkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Strategi politik seluruhnya diserahkan kepada caleg masing-masing.

Caleg perempuan menggunakan strategi politik yang terbagi atas strategi ofensif dan defensif. Strategi politik caleg perempuan tersebut seperti:

1. Jaringan Sosial
2. Jaringan Media
3. Jaringan Keagamaan
4. Jaringan Kekerabatan
5. Melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis
6. Pendekatan tokoh politik

Caleg perempuan juga mengalami konflik internal partai politik (horizontal dan vertikal) dan konflik eksternal partai politik. Konflik internal secara horizontal terjadi antara sesama caleg (laki-laki dan perempuan) dalam satu partai politik

yang sama. Konflik secara vertikal terjadi antara pengurus dengan caleg perempuan dalam satu partai yang sama.

Berbagai kendala yang dihadapi caleg perempuan dalam menerapkan strategi politik adalah:

1. Pengurus partai bekerja atas kedekatan emosional terhadap caleg tertentu bukan atas nama partai politiknya. Kedekatan emosional tersebut cenderung terhadap pimpinan partai yang didominasi oleh caleg laki-laki.
2. Tidak semua tim sukses (di luar pengurus partai politik) membantu pencalonan secara ikhlas. Terdapat tim sukses yang hanya memanfaatkan moment pemilu untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan melakukan manipulasi data atas perolehan suara politik kandidatnya.
3. Terdapat tim sukses yang rangkap jabatan (menjadi tim sukses pada caleg lain)
4. Selama berkampanye masyarakat banyak menuntut materi yang berlebihan.
5. Kebijakan pemerintah atas sistem pemilihan, lebarnya kertas suara dan lemahnya pengamanan suara hasil perhitungan (dari TPS, PPK hingga KPU) menjadi hal mendasar, kurang efektifnya strategi politik caleg perempuan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kiranya terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi di dalamnya, antara lain:

1. Tidak semua partai politik memiliki struktur yang mapan, tidak ada pembinaan bagi para kader dan lemahnya pendidikan politik partai. Hal ini

menjadi penyebab rendahnya kualitas strategi politik yang digunakan calon anggota legislatif. Untuk itu, kiranya para pengurus partai politik diharapkan dapat melakukan pembenahan di tubuh partainya. Sesuai konsep normatif atas lahirnya partai politik guna menopang demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, anggota legislatif yang terlahir (secara kualitas) merupakan orang yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan memeras rakyat.

2. Sistem pemilu yang menggunakan suara terbanyak memang baik. Akan tetapi, lebarnya kertas suara dan sistem pemilihan yang kurang baik menimbulkan berbagai masalah dalam pemilihan legislatif 2009. Berimplikasi pada strategi politik caleg perempuan yang terkesan kurang efektif. Menciptakan asumsi negatif terhadap strategi politik dan hasil pemilihan legislatif 2009. Untuk itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu membentuk sistem pemilu yang mapan, sehingga berbagai dampak negatif dari proses pemilu dapat diminimalisir.
3. Caleg perempuan hendaknya membentuk strategi politik yang memiliki dampak negatif sangat rendah namun efektif. Hal itu dilakukan agar mengurangi membengkaknya biaya kampanye politik (*cost politics campaign*).
4. Penelitian ini belum mampu menelusuri secara mendalam berbagai penyimpangan atau permasalahan yang terjadi dalam moment pemilihan legislatif 2009. Untuk itu, perlu diadakan penelitian lanjutan terkait pengungkapan berbagai masalah yang terjadi di setiap moment pemilihan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Prasetya. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arkola. Surabaya
- Anugrah, Astrid. 2008. *UU Parpol 2008 (UU No 2 Tahun 2008) Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Parpol*. Pancuran Alam. Jakarta
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Djuhandar, Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Insist Press dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan Dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Lovenduski, Joni. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Kanisius. Yogyakarta
- Moloeng, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Haberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada Universitas Press. Yogyakarta
- Nazir, Muhammad. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta
- Poloma, Margaret. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. CV. Rajawali. Jakarta
- Porter, E. Michael. 1980. *Strategi Bersaing*. Erlangga. Jakarta
- Puspitawati, Herien, Ma'mun Sarma. 2007. *Analisis Gender Terhadap Penggunaan Dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) – BBM Pada Keluarga Miskin Di Kota Dan Kabupaten Bogor – Jawa Barat*. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Jakarta
- Rochana, Erna. 2000. *Buruh Wanita Dan Industri Kecil*. Komunitas, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Lampung. Lampung
- Schroder, Peter. 2009. *Strategi Politik*. Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, Indonesia. Jakarta
- Swastha, Basu, Drs. DH., M.B.A. *Azas-Azas Marketing*. Liberty, Yogyakarta. Yogyakarta.
- Usman, Setiady Akbar. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta

Sumber Lain (Situs Internet)

- Ariedjito. 2008. *Reformasi Parpol dan Soal Calon Independen*.
<http://arieljito.staff.ugm.ac.id>. Di download pada tanggal 28 Mei 2009, pukul 20.00 wib
- Hennida, Citra. 2007. *Menjadi Pemenang Melalui 33 Strategi Perang*. Di download pada tanggal 10 Mei 2009, pukul 15.11 wib
- Lucian Marin. 2007. Pengertian Strategi. <http://strategika.wordpress.com>.
Didownload tanggal 12 April 2010, pukul 19.48 wib

Marwan. 2008. *Merubah Strategi Perang Menjadi Strategi Kita*. Di download pada tanggal 25 April 2009, pukul 15.00 wib

PB Ansor. Konflik Melanda Partai Politik. <http://www.gp-ansor.org>. Di download tanggal 20 maret 2010, pukul 20.00

Riewanto, Agust. 2009. *Desain Ketatanegaraan Keterwakilan Perempuan*. Lampung Post. Selasa, 17 September 2009.

Eryanto Nugroho. 2008. *Dewan Perwakilan Rakyat*. <http://id.wikipedia.org>. Pukul 20.25 wib

_____. 2009. www.kabarindonesia.com. Didownload tanggal 27 Maret 2010, pukul 20.23 wib

_____. 2009. Wikipadia Indonesia. <http://id.wikipedia.org>. Didownload tanggal 27 Maret 2010, pukul 20.00 wib

Sumber Lain (Media Elektronik)

Surat Kabar Harian *Media Indonesia*, edisi 28 Desember 2009 halaman 6 dan 7

LAMPIRAN

PEDOMAN PENELITIAN

(Pedoman wawancara dan observasi ini hanya sebagai penuntun di lapangan penelitian, karena pertanyaan bersifat terbuka dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan penelitian)

Judul Penelitian :

STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2009

(Studi Calon Anggota Legislatif Di Dapil 6, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)

Oleh

Hendra Fauzi

I. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan :
Asal Partai Politik :
Jabatan di Partai Politik :
Masa Jabatan :

II. Partai Politik

- a. Keberadaan Caleg Perempuan di Dalam Partai Politik
- b. Partisipasi Caleg Perempuan Dalam Partai Politik
- c. Budaya Patriarki Dalam Partai Politik
- d. Pendidikan Politik di Dalam Partai Politik

III. Strategi Politik

- a. Strategi Ofensif (Meraih Dan Meningkatkan Suara Pemilih)
- b. Strategi Defensif (Mempertahankan Dan Menjaga Stabilitas Suara Pemilih)
- c. Strategi Menyimpang

IV. Identifikasi Konflik

V. Hambatan Caleg Perempuan Dalam Menerapkan Strategi Politik

Pedoman Wawancara

Assalamualaukum. Wr Wb

Saya Hendra Fauzi, Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Strategi Calon Legislatif Perempuan Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009**”. Penelitian ini hanya sekedar untuk kepentingan ilmiah.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para caleg perempuan yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Dapil 6 Kecamatan Natar. Untuk itu, Peneliti mohon di perkenankan untuk dapat berwawancara dengan ibu. Peneliti mengharapkan kepada ibu untuk dapat menceritakan berbagai pengalaman ibu selama menjadi caleg selengkap mungkin (suka duka menjadi caleg). Terima kasih

Data pribadi Informan

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Asal partai politik :

Beberapa Item pertanyaan dalam skripsi ini adalah :

5. Apakah ibu merupakan anggota aktif partai politik?
6. Sudah berapa lama ibu aktif di dalam partai politik?
7. Apa alasan ibu memilih partai tersebut sebagai perahu politik dalam pencalonan legislatif 2009 ini?

8. Bagaimana proses pendaftaran (seleksi) yang dilakukan partai ibu, sehingga ibu dapat terpilih sebagai salah satu peserta pemilu?
9. Apakah ada kesenjangan yang dilakukan pengurus parpol terhadap caleg perempuan?
10. Apakah ada pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol ibu? Jika ada, dalam bentuk apa?
11. Apakah ibu pernah merasakan adanya persenggangan/konflik dengan caleg dari partai lain?
12. Bagaimana Strategi politik yang ibu lakukan sebagai upaya meraih suara/simpatik rakyat?
13. Berapa jumlah tim sukses ibu, Siapa/dari golongan mana sajakah yang menjadi tim sukses ibu?
14. Apakah 22 desa di Kecamatan Natar ibu kunjungi semuanya? Di setiap desa Berapa kali ibu mengkampanyekan diri dengan masyarakat?
15. Desa mana yang paling sering ibu kunjungi? Mengapa?
16. Kendala apasajakah yang ibu hadapi selama berkampanye?
17. Selama berkampanye adakah sikap masyarakat yang ibu anggap tidak pantas atau keterlaluan? Jika ada, dalam bentuk apa? Contoh.
18. Adakah dukungan partai politik dalam memenangkan caleg perempuannya? Jika ada, dalam bentuk apasajakah dukungan tersebut?
19. Bagaimana cara ibu mempertahankan suara politik yang telah ibu peroleh?
20. Bagaimana cara ibu untuk meraih suara yang kemungkinan telah menjadi suara caleg lainnya (merubah pilihan rakyat)?
21. Mengapa ibu dapat gagal dalam pemilihan legislatif 2009 ini?
22. Berapa jumlah perolehan suara ibu secara perorangan? Dan Adakah suara politik ibu yang hilang ?

23. Apakah ibu menganggap ada kecurangan dalam pemilihan legislatif 2009 ini?
Jika ada, dalam bentuk apa kecurangan tersebut?
24. Berapa dana kampanye yang telah ibu keluarkan?
25. Adakah saran yang ingin ibu sampaikan untuk pemilihan legislatif 5 tahun yang akan datang?

Natar, , 2010

Informan

1






HANURA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1 ✓ **Drs. H. ANDI SURYA, MM.**
Caleg DPRD Prov. Lampung,
Dapil 2 Kab. Lamsel - Pesawaran

2 ✓ **SUGIHARTI, SE**
Caleg DPRD Kab. Lamsel
Dapil 6, Kec. Natar

1



HANURA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT



Rumah :
Tanjung Sari IV RT. 13 RW. 7 No. 101
Tanjung Sari - Natar, Lampung Selatan
Telp. (0721) 92444
HP. 0813 79752371, 0815 41306671

SUGIHARTI, SE.
Calon Anggota DPRD
Kab. Lampung Selatan
DP. 6 : Kec. Natar (No. Urut 2)

2008 Januari							2008 Februari							Maret							April								
MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU		
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11		
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18		
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25		
25	26	27	28	30	31								29	30	31								26	27	28	29	30		
01 Januari Tahun Baru Masehi																													
Maret							April							Maret							April								
MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU		
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8		
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15		
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22		
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29
23-30 Maret																													
Maret							April							Maret							April								
MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINI	SENI	SELASA	REBU	KAMIS	JUM'AT	SABTU		
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	29	30	27	28	29	30	31												
27-28 Maret																													





34



PKNU
PARTAI KEBANGHITAN NASIONAL ULAMA
Mengagakkan Kebenaran dan Keadilan

TIM 17 PENDIRI PKNU
Di Pusaka Perjuangan Lingsar, Tanah

2 HALIMATUS SAKDIAH ✓
(ISTRY Drs. A. SARBANUN)
CALON ANGGOTA DPRD KAB. LAMPUNG SELATAN
DP. 6 : KECAMATAN NATAR
Rumah : Jl. LPTP Negeraratu II Kecamatan Natar
Telp. 0721 91422 HP. 0813 69271498



JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER

MOHON DO'A RESTU SERTA DUKUNGANNYA



H. WIRANTO, SH.
KETUA DPP
PARTAI HANURA

1



2 ✓ **SUGIHARTI, SE.**
CALON ANGGOTA DPRD KAB. LAMPUNG SELATAN
DAPIL 6 : KECAMATAN NATAR




Saatnya HATI NURANI Bicara

JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER

1 **SUGIHARTI, SE.**

